

# P Majalah Parlementaria



| Edisi : 142 TH. XVI. 2016 |

## **MENDESAK DIBENTUK** **BADAN INDEPENDEN** **PENYELENGGARA HAJI**

**GRATIS**  
TIDAK DIPERJUALBELIKAN

KOMERSIALISASI HAJI  
PENYEBAB ANTRIAN  
CALON HAJI

16

PENINGKATAN DANA  
PARPOL PENTING UNTUK  
PERKUAT DEMOKRASI

26



**PENGAWAS UMUM**

Pimpinan DPR-RI

**PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH**

Dr. Winantuningtyas Titi Swasananyo, M.Si.  
(Sekretaris Jenderal DPR-RI)

**WAKIL KETUA PENGARAH**

Dra. Damayanti, M.Si,  
(Deputi Persidangan)

**PIMPINAN PELAKSANA**

Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si  
(Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si  
(Kabag Media Cetak)

**WK. PIMPINAN REDAKSI**

Dra. Tri Hastuti  
(Kasubag Media Cetak)  
Insan Abdirrohman, SH  
(Kasubag Media Sosial)  
Ahyar Tibi, SH  
(Kasubag Analisis Media)

**REDAKTUR**

Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos

**SEKRETARIS REDAKSI**

Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto

**ANGGOTA REDAKSI**

Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati,  
Muhammad Husen, Sofyan Efendi,  
Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi,  
Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega

**REDAKTUR FOTO**

Eka Hindra Sasmita, Iwan Armanias

**FOTOGRAFER**

Rizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,  
Andi M. Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati,  
Jayadi Maulana, Arief Rachman,  
R. Kresno P. D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

**ADMINISTRASI FOTO**

Hasri Mentari

**ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA**

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI  
Gedung Nusantara II Lt. 3  
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta  
Telp. (021) 5715348, 5715350  
Fax. (021) 5715341,  
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com.  
www.dpr.go.id/berita

**PENGANTAR REDAKSI**

**M**asalah haji yang tertuang dalam RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) menjadi topik utama Parlementaria edisi kali ini dimaksudkan untuk mendorong penyelenggaraan haji yang dihelat setiap tahun menjadi semakin baik. Dari pemantauan Tim Pengawas Haji DPR RI memang diakui pelayanan haji pada tahun 2016 lalu berjalan relatif baik dan lancar meski masih ada catatan beberapa hal.

Meski demikian, DPR RI terus mendorong dalam pelayanan bagi warga masyarakat Indonesia yang menjadi tamu-tamu Allah itu tetap harus ditingkatkan. Mereka pergi menunaikan rukun Islam kelima rata-rata sudah berusia, berasal dari pelosok dan baru sekali itu keluar negeri dan naik pesawat dan ada yang menabung puluhan tahun, sehingga harus dilayani secara prima.

Begitu pula, pelayanan haji menyangkut jumlah ratusan ribu orang dan dana sekitar 90 triliun rupiah, maka pengelolaan dan penyelenggaraan haji tidak bisa dengan cara-cara monoton, perlu langkah perubahan menuju era baru yang professional, transparan dan akuntabel.

DPR RI khususnya Komisi VIII menggulirkan revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Ibadah Umrah adalah kata kuncinya pemisahan antara operator dan regulator. Dengan demikian ke depan diharapkan Kemenag yang selama ini menangani kedua bidang itu bisa melepas salah satu fungsi operatornya. Pemisahan ini menurut kalangan DPR RI adalah suatu keniscayaan atau istilah Wakil Ketua DPR RI Korkesra Fahri Hamzah, adalah nafas zaman yang tidak bisa ditentang.

Dengan pemisahan ini maka diharapkan adanya satu badan independen yang bertugas menyelenggarakan haji sementara pemerintah berfungsi sebagai regulator. Dengan badan haji independen ini maka masyarakat akan memperoleh pelayanan yang makin baik, nyaman, aman, mudah dan murah.

Satu lagi laporan yang diangkat dalam edisi ini adalah betapa rawannya negara Indonesia akan bahaya bencana alam. Karena itu pemerintah harus memiliki strategi antisipasi penanganan bencana alam yang baik. Terutama untuk daerah-daerah yang menjadi titik potensial terjadinya bencana alam, karena seharusnya untuk bencana-bencana yang sifatnya berulang seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, pemerintah sudah memiliki sebuah *Grand design* yang jelas, agar lebih mudah dalam mengantisipasi keadaan, baik sebelum ataupun sesudah bencana. ■



**PENERBITAN & DISTRIBUSI**

**PIMPINAN PENERBITAN**  
Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP  
(Kabag Penerbitan)

**WK. PIMPINAN PENERBITAN**  
Mediantoro, SE  
(Kasubag Produksi),  
Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si  
(Kasubag Distribusi)

**STAF PRODUKSI**

Eko Murdiyanto, Farid, SE, Barliansyah, Fathurahman,  
Mujiono, Abdul Kahfi, S.Kom

**SIRKULASI**

Siti Rondiyah, Oji, Remon, Ifan, Arif, Lamin  
Telp: 021-571 5697, Fax: 021-571 5421  
Email: penerbitandpr@gmail.com

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNGJAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**IKUTI AKUN MEDIA SOSIAL DPR RI**  
**Follow, Like & Subscribe**

DPR RI   
 @DPR\_RI   
 @DPR\_RI   
 DPR RI

[medsos@dpr.go.id](mailto:medsos@dpr.go.id) | [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)



# DAFTAR ISI

<b>ASPIRASI</b> .....	<b>4</b>
<b>PROLOG</b>	
Mendesak Dibentuk, Badan Independen Penyelenggara Haji .....	<b>6</b>
<b>LAPORAN UTAMA</b>	
Pemisahan Regulator-Operator Haji, Nafas Zaman Tak Bisa Ditentang .....	<b>8</b>
Mencita-citakan Lahirkan Badan Profesional dengan Etos Kerja Baru .....	<b>10</b>
Badan Profesional Penyelenggara Haji Posisikan Kemenag Lebih Tinggi ...	<b>12</b>
RUU PIHU untuk Perbaiki Layanan Haji .....	<b>14</b>
Komersialisasi Haji Penyebab Antrian Calon Jamaah .....	<b>16</b>
Perlu Payung Hukum untuk Menghindari Penurunan Kualitas Penyelenggaraan Haji .....	<b>18</b>
Badan Penyelenggara Ibadah Haji Sudah Disuarakan Sejak 2011 .....	<b>19</b>
<b>SUMBANG SARAN</b>	
Menghadirkan Pelayanan Ibadah Haji dan Umrah Yang Profesional .....	<b>20</b>
<b>PENGAWASAN</b>	
Ciptakan <i>Grand Design</i> Penanggulangan Bencana Untuk Hindari Kutukan Alam .....	<b>22</b>
Perbaiki Produksi dan Tata Niaga Gula .....	<b>24</b>
<b>ANGGARAN</b>	
Peningkatan Dana Parpol Penting untuk Perkuat Demokrasi .....	<b>26</b>
<b>LEGISLASI</b>	
Jangan Sampai UU ITE Direvisi Mengikuti Perkembangan Medsos .....	<b>28</b>
<b>FOTO BERITA</b> .....	<b>30</b>
<b>PROFIL</b>	
Berpolitik, Ingin Membuat Rakyat Kaya dan Sejahtera .....	<b>36</b>
<b>KUNKER</b> .....	<b>40</b>
<b>SOROTAN</b>	
Padepokan Aliran Sesat Bak Fenomena Gunung Es .....	<b>56</b>
<b>LIPUTAN KHUSUS</b> .....	<b>58</b>
<b>DAPIL</b> .....	<b>64</b>
<b>PERNIK</b>	
Dari Akuntabilitas Parlemen, <i>E-Budgeting</i> Hingga Soal Daging Sapi .....	<b>69</b>
<b>SELEBRITI</b>	
Ustad, Selebriti yang Konsisten Berdakwah .....	<b>72</b>
<b>KIAT SEHAT</b>	
Kontroversi Kopi .....	<b>74</b>
<b>PARLEMEN DUNIA</b> .....	<b>76</b>
<b>POJOK PARLE</b> .....	<b>78</b>



**8 LAPORAN UTAMA**



**30 FOTO BERITA**



**72 SELEBRITI**

## **Keprihatinan Carut Marut Produk Palsu di NKRI**

Saya Ketua LSM Penyelamatan Perjuangan Bangsa Indonesia (PPBI) ingin menyampaikan kepada Ketua Komisi III DPR RI perihal pembaharuan aturan hukum bagi pihak-pihak tak bermoral pembuat produk palsu dengan ancaman penjara seumur hidup atau minimal 20 tahun dan hukuman mati.

Kasus-kasus pemalsuan telah menjadi kondisi darurat bagi NKRI karena hampir 99% pekerjaan sudah diindikasikan palsu seperti ijazah, vaksin, obat-obatan, beras, uang, emas, buku-buku pendidikan, aparat

Polisi dan TNI (gadungan) dst. Pengusutan jenis-jenis produk palsu tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan dan tuntas dengan pengaturan konkrit karena merupakan kebutuhan masyarakat.

Perlunya kewaspadaan akan bangkitnya Komunis PKI, terorisme, dan gerakan separatis yang membuat kondisi Indonesia menjadi tidak aman.

**Ibrahim Yacob  
Sumenep Madura, Jawa Timur**

## **Usulan Menjadi Desa Persiapan (Eks Transmigrasi)**

Kami adalah warga masyarakat Eks. Transmigrasi UPT Lubung Atung Desa Tembeling yang menceritakan bahwa kehidupan masyarakat yang memprihatinkan karena makanan yang bisa dipanen hanyalah ubi-ubian, kondisi tempat tinggal rawan dan berbahaya karena seringnya terjadi pencurian fasilitas umum, kondisi fasilitas kesehatan yang kurang memadai sehingga apabila ada warga masyarakat yang sakit keras harus ditandu sejauh 8 km untuk berobat. Dan kondisi jalan yang sudah hancur bahkan kendaraan roda duapun sulit untuk melewatinya.

Kami mengharapkan bahwa tempat tinggal (wilayah) mereka resmi menjadi Desa Tembeling dengan harapan akan mendapatkan kemudahan untuk urusan administrasi serta mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Eks Desa Transmigrasi Lubuk Atung.

Dalam surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 475.1/05/Nakertrans/RAHBIN/2016 yaitu Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tanggal 31 Desember 2013 Nomor 364 Tahun 2013 tentang Pengembangan Permukiman Transmigrasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2014, memohon kepada Bupati Lahat untuk mempertimbangkan menerbitkan SK Desa Persiapan Eks. Desa Transmigrasi (Lubuk Atung Desa tembeling Jaya) sebagaimana Pemerintah Kabupaten Lahat telah melaksanakan Pengalihan Pengembangan Permukiman Transmigrasi Tahun 2015, Tahun 2016 yang pengalihan Pengembangan Permukiman Transmigrasi menggunakan Dana APBD Kabupaten Lahat.

Kami mengharapkan dukungan Ketua DPR RI agar Pemda Lahat kiranya berkenan memperhatikan dan menindaklanjuti masalah tersebut sehingga menerbitkan SK Desa Persiapan.

**Sunaryo dkk  
Lahat, Sumatera Selatan**

## **Temuan Penyimpangan Dana Desa**

Kami dari NGO Sumenep Corruption Watch menyampaikan hasil investigasi terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Sumenep.

Bahwa berdasarkan hasil investigasi pada tanggal 25 Mei 2015 atas pengelolaan keuangan Desa (Dana Desa/Alokasi Dana Desa) tahun 2015 di Kabupaten Sumenep ditemukan penyimpangan dan diduga terindikasi korupsi.

Hal ini tidak lepas dari keterlibatan camat dalam melakukan verifikasi atas pengajuan dana Pemerintah Desa yang diduga transaksional dan lemahnya pengawasan serta pembiaran dalam meloloskan verifikasi dokumen yang kurang memenuhi persyaratan prosedur meski proses perencanaan hingga realisasi APBDes menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.

Kami memohon agar DPR RI mengingatkan dan memerintahkan Bupati Sumenep meninjau kinerja oknum di kecamatan untuk melaksanakan pengelolaan DD/ADD sesuai aturan serta membantu penyelesaian permasalahan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

**Junaidi  
Sumenep, Jawa Timur**



## Laporan Usaha Perkebunan Tanpa Izin

Kami adalah pengurus dan anggota Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Forum Wartawan Mingguan, menyampaikan hasil investigasi terhadap kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Cakrawala Agrindo Kencana (CAK) dan PT Palma Sukses Abadi (PSA) yang berlokasi di Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.

PT Cakrawala Agrindo Kencana (CAK) sudah melakukan kegiatan usaha perkebunan sejak tahun 2014 pada lahan seluas kurang lebih 1.000 Ha, sedangkan PT. Palma Sukses Abadi sudah melakukannya sejak tahun 2012 dengan luas tanah kurang lebih 250 Ha.

Dalam melakukan kegiatannya, kedua perusahaan tersebut hanya mengantongi persetujuan prinsip dari Pemerintah Kabupaten Batanghari tanpa dilengkapi dengan izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan, Izin Lingkungan, Dokumen Amdal dan tidak mengantongi Rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Selain itu kedua perusahaan tersebut diduga telah merubah fungsi

tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menduga kedua perusahaan tersebut bekerjasama dengan oknum-oknum tertentu di Pemda Kabupaten Batanghari sehingga tidak ada pengawasan maupun tindakan tegas terhadap kegiatan tersebut, dan ada upaya oknum-oknum tertentu untuk melakukan perubahan RT/RW Kabupaten Batanghari, sehingga lokasi perkebunan tersebut keluar dari peruntukan tata ruang yang sudah ditetapkan.

Terkait dengan temuan tersebut, kami sudah berulang kali menyampaikan kepada Pemerintah Daerah, baik melalui surat maupun melalui aksi massa, tetapi tidak ada tindakan tegas yang diambil oleh Pemerintah Daerah.

Kami memohon agar Ketua Komisi III DPR RI membantu menyelesaikan permasalahan dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Hairun Nizom, dkk**  
**Batang Hari, Jambi**

## Surat Penolakan atas RUU Pertembakauan

Kami dari Muhammadiyah Tobacco Control Centre (MTCC) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ingin menyampaikan sikap penolakan terhadap RUU Pertembakauan.

Bahwa pembahasan RUU Pertembakauan hendaknya dihentikan dan dikeluarkan dari Prolegnas dengan pertimbangan sbb :

Produk tembakau adalah zat adiktif yang sifatnya beracun, mutagenic, dan karsinogenik sehingga pengaturannya dalam sebuah undang-undang yang bertujuan untuk mengatur peningkatan produksinya sangat bertentangan dengan etika dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Upaya yang disampaikan dalam RUU Pertembakauan hendaknya memperhatikan dampak produk tembakau bagi kesehatan, lingkungan pertanian, dan sosial ekonomi dan dapat memahami bahwa dalam jangka panjang upaya meningkatkan produksi tembakau dan industrialisasi produk tembakau akan merugikan Indonesia serta menempatkan kelompok masyarakat miskin, generasi muda, dan perempuan sebagai kelompok masyarakat yang paling rentan.

Bahwa kelaziman perokok semakin meningkat, terutama dibawah 15 tahun sehingga hal ini haruslah dipandang sebagai prioritas untuk dilindungi.

**Winy Setyonurgoho**  
**UMY, Yogyakarta**

## Penipuan CPNS

Kami wakil dari Edison Wonatta dkk menyampaikan kepada Ketua Komisi III DPR RI perihal dugaan tindak pidana penipuan oleh Menteri Keuangan RI melalui Biro Kepegawaian terkait pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2005 pada Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Maluku.

Pada tahun 2005 Menteri Keuangan melalui Kepala Biro Keuangan mengangkat CPNS pada Dirjen Pajak Provinsi Maluku sebanyak 20 orang kemudian pada tahun 2007 Dirjen Pajak Provinsi Maluku memberhentikan CPNS tersebut tanpa alasan yang jelas.

Pengangkatan atas klien kami sebanyak 20 orang sebagai CPNS pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2005 diduga merupakan tindak pidana penipuan dan pelanggaran HAM.

Kami mengharapkan agar CPNS yang telah diberhentikan supaya dapat diangkat untuk bekerja kembali.

Kami memohon agar komisi III melakukan pemanggilan kepada Pihak terkait dalam Rapat Dengar Pendapat Umum.

**LSM Berantas, Maluku**



Pisahkan Regulator dan Operator Haji

# Mendesak Dibentuk Badan Independen Penyelenggara Haji

Sebagai lembaga negara yang antara lain mempunyai tugas pokok penyusunan undang-undang dan pengawasan, DPR RI senantiasa berusaha untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya yang muaranya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Termasuk di dalamnya meningkatkan pelayanan publik ibadah haji dan umrah.

**D**engan jumlah penduduk sekitar 250 juta yang mayoritas muslim, maka peningkatan pelayanan ibadah haji menjadi keniscayaan. Khususnya Komisi VIII DPR RI yang membidangi masalah agama dalam beberapa tahun terakhir ini telah berusaha keras meningkatkan pelayanan kepada calon-calon tamu Allah, dari persiapan di tanah air, penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) hingga peningkatan fasilitas selama di Arab Saudi dari pemondokan, transportasi dan catering.

Peningkatan pelayanan bagi calon tamu-tamu Allah itu akan terus ditingkatkan dan DPR RI khususnya Komisi VIII kini menggulirkan Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU). Sebagaimana ditegaskan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, dalam pembahasan RUU PIHU itu kata kuncinya adalah memisahkan antara regulator dan operator. Dengan pemisahan itu ke depan, maka penyelenggaraan haji betul-betul berbasis pada profesionalisme, dan pemerintah sebagai regulator harus semakin baik dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

Dia menekankan lagi, kalau mau profesional pisahkan regulator dan operator, seperti halnya dengan konsep demokrasi. Tidak bisa lagi pakai *mindset* monopoli pemerintah, itu tidak mungkin lagi. Kini sudah abad 21 monopoli sudah tidak dimungkinkan lagi.

Pandangan yang sama dilontarkan Ketua IPHI Abdul Kholiq Ahmad, seharusnya pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dikelola oleh satu badan khusus tidak dirangkap oleh Kementerian Agama. Karena manajemen modern itu meniscayakan ada pembagian tugas yang semakin spesifik, sekarang ini Kemenag ada 3 tugas sekaligus yakni regulator, operator dan pengawasan. Kemenag khusus menangani hal-hal yang terkait regulasi. Sedangkan soal teknis penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji, ada lembaga khusus- lembaga pemerintah non kementerian di bawah presiden.

Dengan lembaga langsung di bawah presiden, artinya ini lembaga resmi



**Seharusnya pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dikelola oleh satu badan khusus tidak dirangkap oleh Kementerian Agama. Karena manajemen modern itu meniscayakan ada pembagian tugas yang semakin spesifik, sekarang ini Kemenag ada 3 tugas sekaligus yakni regulator, operator dan pengawasan. Kemenag khusus menangani hal-hal yang terkait regulasi.**



pemerintah bukan swasta. Munculnya kekhawatiran adanya lembaga swasta hal itu tidak beralasan, bagaimana proses supaya badan ini kredibel dan akuntabel, maka prosesnya melalui seleksi untuk para direksi dan komisisnya. Silahkan badan pengawas dan pelaksana itu DPR yang mempunyai kewenangan.

Badan atau Lembaga independen ini pula akan lebih menyetatkan budaya dan iklim penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Selama lembaga ini tidak dihidupkan atau tidak didirikan, maka dikhawatirkan Menteri Agama akan terjerat kasus korupsi, karena uangnya luar biasa.

Tidak ada kementerian lain yang sedahsyat Kemenag. Jumlah dana Rp 90 triliun itu bukan uang yang sedikit, keuntungannya adalah melancarkan proses pelaksanaan ibadah haji dan pengawasan ibadah haji yang transparan. Dengan lembaga independen ini pula Kemenag tidak terbebani dengan hal-hal teknis yang rutin setiap tahun yang menguras pikiran dan pemborosan dana.

Keuntungan berikutnya adalah, masyarakat bisa secara *enjoy* melakukan proses pendaftaran, transparan melakukan biaya tabungan untuk pergi haji dan lain-lain. Ada kemudahan yang bisa didapat oleh masyarakat. Kemudian yang paling penting adalah soal teknis pelaksanaan ibadah haji misalnya pemondokan, catering itu pasti pelayanan akan prima, karena dilakukan oleh lembaga professional.

Satu hal juga diingatkan Pimpinan Dewan ini, yaitu adanya amanat UU Haji yang harus membentuk Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Diharapkan dengan Badan itu maka pengelolaan keuangan haji mencakup dana sangat besar atau sekitar Rp 90 triliun bisa dikelola secara professional, transparan dan akuntabel. Calon haji akan memperoleh kemudahan dan juga kemurahan serta kepuasan melaksanakan rukun Islam kelima tersebut. Semoga. ■

# Pemisahan Regulator-Operator Haji, Nafas Zaman Tak Bisa Ditentang

**M**eskipun Tim pengawas Haji DPR RI menilai bahwa pelayanan ibadah haji semakin baik, tapi DPR RI akan terus berupaya mendorong supaya Pemerintah meningkatkan kualitas pelayanannya. Untuk itu DPR RI kini menggulirkan inisiatif pengajuan RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PIHU). Wakil Ketua DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat Fahri Hamzah menegaskan bahwa kata kunci dari revisi itu adalah memisahkan antara regulator dan operator sehingga penyelenggaraan haji berbasis profesionalisme. Berikut petikan wawancaranya.

## Apa latar belakang pengajuan RUU Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah?

Sebelum masuk pembicaraan RUU PIHU sebaiknya ada evaluasi karena ada beberapa mandat dari UU Haji yang lama belum dilaksanakan dan itu adalah kesimpulan dari keseluruhan persoalan yang ada dalam penyelenggaraan haji ini. Dua hal perlu dievaluasi.

Pertama, penyelenggaraan dan

pelayanan relatif makin baik, ini yang saya sebut sebagai manajemen haji. Kedua adalah politik haji ini terkait kuota, sikap Pemerintah Saudi serta sikap kita tidak saja penyelenggara haji Indonesia tapi juga ikut membangun infrastruktur haji. Itu semua nanti tergantung pada politik ekonomi haji.

Kita sudah evaluasi rutin. Pemerintah kita tekan terus, kita kontrol terus sehingga situasi semakin terbuka, kerjanya juga tambah baik. Tetapi ini tidak bisa beres kalau sisi politik ekonomi haji ini tidak diperbaiki. Kata kunci dari RUU PIHU adalah memisahkan antara regulator dan operator. Ke depan penyelenggaraan haji betul-betul berbasis pada profesionalisme.

Kedua para penyelenggara pelayanan haji ini swasta dan masyarakat Indonesia yang bikin usaha di bidang haji dan umrah harus betul-betul diberikan regulasi yang tepat sehingga nanti mereka bisa bergerak di dalam regulasi yang kita buat ini.

Baru pengawasan yang dicek terus apa sudah sesuai penyelenggaraannya dengan

regulasi. Nah yang kedua adalah politik ekonomi haji berkaitan dengan beberapa isu pertama kuota. Kita tidak mungkin ngejar itu kalau kuota haji tidak nambah dan kita tidak ada kemampuan untuk mengejar sisa kuota lain yang ada di belahan dunia, termasuk dari Saudi yang digunakan oleh kita. Untuk kepentingan masyarakat kita yang sangat banyak, harusnya orang tua kita yang di atas 70 tahun sudah selesai dan sudah haji semua.

Mekanismenya adalah jaminan dan inilah yang menyebabkan kenapa amanat dari UU Haji yang sebelumnya harus diselesaikan sekarang, yaitu amanat untuk mendirikan Badan Pengelola Keuangan haji. Apa pentingnya? Karena di satu sisi nanti pengelola keuangan haji ini ada yang terkait dengan pengelolaan uang karena jumlahnya besar sekali, saat ini ada 85 triliun.

Nanti ada yang berkaitan dengan jaminan, misalnya kita mau menghabiskan yang senior-senior yang penting mereka



Kata kuncinya adalah memisahkan antara regulator dan operator. Ke depan penyelenggaraan haji betul-betul berbasis pada profesionalisme.



Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat  
**Fahri Hamzah**

foto : kresno/iw

sudah bayar dan diberangkatkan dulu, nanti *nyicilnya* belakangan. Nah ini perlu penjaminan melalui Badan Pengelola Keuangan Haji. Ini yang sudah dimandatkan oleh UU tapi belum diimplementasi. Jadi keharusan mengimplikasikan harus sejalan dengan revisi ini.

Revisi ini harus mengarah kepada meletakkan Indonesia dalam diplomasi haji secara lebih agresif. Dengan kenyataan bahwa Indonesia adalah konsumen haji terbesar di dunia terbesar di dunia. Karenanya komunikasi dengan Saudi dan negara tetangga dan juga asosiasi di dorong harus betul-betul mengambil *leadership*, sehingga kemudian dimasa yang akan datang bisa meletakkan penyelenggaraan haji sebagai pekerjaan orang Indoensia,

Saudi itu perlu teman. Desain kota suci, desain infrastrukturnya, desain pengianapannya dan lain-lain itu sesungguhnya belum maksimal. Dan seharusnya kita bisa mengupayakan agar mungkin bisa diberikan alokasi untuk mengatur atau paling tidak perumahan orang Indoensia disana harus kita yang bangun.

Perumahan itu tidak saja untuk sebulan pemakaian selama haji, tetapi juga 11 bulan lainnya selama umrah. Jadi kalau kita punya kampung Indonesia di kota suci itu Mekkah atau Madinah, maka kampung itu juga menjadi prototype diplomasi indonsesia secara menyeluruh. Jadi kalau misalnya orang mau lihat Indonesia, datang saja ke kampung itu. disitu mereka bisa beli souvenir Indonesia, makanan Indonesia bahkan bisa datang ke pameran penting, ini *mindset* dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah haji dan Umrah.

### **Tanggapan anda atas sikap Kemenag, kelihatannya keberatan?**

Itu tidak mungkin lagi. Ini sudah abad 21 monopoli sudah tidak dimungkinkan dan haji ini sebagian bisnis travel. Sudahlah kalau

pemerintah mau bisnis travel tidak bakalan dia bisa menang menghadapi rakyatnya sendiri. Oleh karena itu istilah orang itu *the busnies of goverment is making regulation and making sure regulation implementasion* (bisnis pemerintah bikin aturan dan menjamin pelaksanaan aturan) yang lain tidak usah.

Doronglah pengusaha kita supaya lebih banyak masuk ke wilayah bisnis haji dan umrah ini, sebab kalau tidak nanti ada orang lain yang ambil, apalagi kita memasuki MEA bisnis begini sudah mulai dimasuki oleh orang lain.

Nanti penyelenggara hajinya datang dari negara-negara yang hanya karena professional tetapi sebetulnya bukan orang Indonesia, negara yang sudah biasa menyelenggarakan perjalanan bisa mengambil alih sehingga kesempatan kita untuk mendidik enterprenuer yang tangguh menjadi gagal.

Pemerintah harus keluar dari bisnis, dari usaha yang rakyatnya sanggup dan hanya fokus kepada rakyat tak sanggup, Menag dibisiki oleh data yang tidak ilmiah. Kini sudah mainset baru di dunia ini. Kalau mau profesional pisahkan regulator dan operator, kan sama juga dengan konsep demokrasi. Maka tidak bisa kita pakai *mindset* monopoli pemerintah, sudahlah, itu sumber korupsi nanti.

### **Apa peran pemerintah nantinya?**

Nah tugas pemerintah itu menstandarisasi, misalnya makan, bahkan kalau menurut saya makanan ini yang susah kalau dibikin terpusat. Biarkan orang nego dengan keinginannya mau makan apa, nanti baru banyak pilihan. Makanya saya bilang Indoesia harusnya sudah masuk diranah bisnis restoran di Arab Saudi, sehingga orang mau makan cita rasa Indoneisa mudah. Apalagi kita ada 270 juta orang Indonesia. Jadi kalau dipisah akan semakin ideal .

### **Kekhawatiran apa dengan belum terbentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji?**

Ini ada lobi departemen agama untuk meniadakan Badan Pengelola Keuang Haji, ini bahaya tidak boleh. Saya sendiri tidak akan setuju BPKH dihapuskan, Pak Jokowi juga waktu kampanye tabung haji kongkritkanlah jangan dilarang.

Dana BPIH sekitar 85 trilliun, bisa dibilang adalah salah satu perusahaan investasi terbesar di Indonesia. Dia bisa macam-macam termasuk kalau pemerintah mau pakai untuk bangun tol, tidak ada masalah, yang penting kan setoran rutinnya Karena yang dipakai dari dana itu setiap tahun maksimal 7 trilliun.

Artinya dana sekitar 80 T uang muter. Kita bisa inves juga di Saudi, misalnya buat perkampungan Indonesia atau membangun RS di Saudi asal mau bicara baik-baik sama pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Selama ini menyedihkan, setiap jemaah haji ditampung di tempat yang bisa dikatakan tidak layak.

### **Harapan anda tentang pemisahan regulator dan operator?**

Itu nafas zaman itu tidak bisa dirubah, tidak ada yang bisa membenarkan penyatuan antara operator dan regulator. Di bidang migas saja sudah dipisah. Semua sudah dipisah, dimana-mana industri sudah begitu.

Di semua bisnis pemerintah begitu, dan kalau pemerintah mengambil alih operator yang tidak boleh di swastakan misalnya TNI ini tidak bisa. Tapi di Amerika sudah di swastakan, melatih orang dikasih amunisi, yang pergi perang orang swasta sehingga kalau mati tidak nangis.

Kita jangan begitu. Urusan haji dan umrah sudah selayaknya tidak dimonopoli pemerintah. Tidak bisa menentang nafas zaman. Menag sebagai regulator tugasnya membuat aturan dan memastikan pelaksanaan aturan. Semua menteri tugasnya begitu, bila perlu lakukan sidak. Ini semua agar Menag lebih tinggi posisinya. ■

(Tim)

Rancangan UU Haji dan Umrah:

# Mencita-citakan Lahirnya Badan Profesional dengan Etos Kerja Baru



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI  
Sodik Mudjahid

foto: jaka/iw

dengan adanya Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, bisa melahirkan badan penyelenggara haji dan umrah yang profesional dengan etos kerja baru. Untuk mengetahui secara rinci bagaimana konsep dari

sekaligus juga melaksanakan.

Alasan ketiga kami mau Kemenag fokus kepada tugas utamanya, pendidikan keagamaan dan bimbingan keagamaan, termasuk didalamnya kerukunana beragama. Haji itu 80 persen ibadah yang berkaitan dengan



Coba perhatikan di media, setiap tahun isu utama Kemenag pasti soal haji, kalau hajinya buruk semua kerjaan di Kemenag buruk.



Seuai dengan hasil keputusan rapat Badan Musyawarah DPR RI Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dibahas di Komisi VIII. Panitia Kerja pun sudah dibentuk, yang diketuai oleh Sodik Mudjahid Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Diharapkan Panja ini bisa bekerja secara efektif, namun menurut Sodik dari pihak pemerintah belum membentuk Panja, sehingga pertemuan pertama terpaksa harus diundur.

Ditargetkan awal masa sidang dua, tahun 2016-2017 Panja dari DPR RI dan Pemerintah bisa mulai bekerja, membahas rancangan undang-undang tersebut. DPR RI mencita-citakan

RUU PIHU tersebut, Parleментарia berkesempatan mewawancarai Ketua Panja Sodik Mudjahid di Gedung Nusantara II DPR RI, baru-baru ini. Berikut petikan wawancaranya:

### **Kenapa perlu ada Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah?**

Penyelenggaraan haji dan umrah oleh negara sudah hampir 70 tahun, tetapi masih saja ada kesalahan elementer yang berulang. Itu alasan yang pertama. Yang kedua kita ingin Kemenag terpisah posisinya antara operator dan eksekutor.

Sekarang yang berjalan tidak jelas, Kemenag yang membuat aturan

*tour and travelling* soal spiritual agamanya hanya 20 persen.

Tetapi haji ini amat sangat menyita perhatian Kementerian Agama. Coba perhatikan di media, setiap tahun isu utama Kemenag pasti soal haji, kalau hajinya buruk semua kerjaan di Kemenag buruk, padahal haji 20 persen soal spiritual agamanya. Sedangkan sisanya 80 persen ibadah yang berkaitan dengan *tour and travelling*. Di sinilah banyak kelemahan, makanya kita mau, haji ini diserahkan kepada lembaga yang lebih profesional dalam hal *tour and traveling*.

Meskipun lebih banyak *tour and traveling*, tetapi tidak mungkin kita serahkan kepada Kementerian Pariwisata, karena haji sangat berkaitan

dengan agama. Makanya, solusi dari itu, dibentuklah badan khusus. Yang keempat, sebenarnya tidak nyaman kalau orang Kemenag mendengar ini, sampai saat ini profesionalismenya masih kurang, masih ada feodalisme didalam pengelolaan haji.

### **Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dinilai memangkas kewenangan Kemenag?**

Terkait mempreteli saya ingin membantah, saya beri contoh begini, kami ini ada Panja Pendidikan Islam. Panja ini merekomendasikan beberapa hal. Satu agar Dirjen Pendidikan

pengembangan Dirjen, itu bukti kami bahwa pengambilan haji buka untuk mempreteli tetapi memang karena haji 80 persen tour dan travelling, makanya serahkan saja ke badan agar Kemenag fokus. Justru kita ingin mengembangkan. Tapi kita paham mungkin mereka berpikir akan kehilangan pekerjaan. Saya katakan jangan khawatir tentang pekerjaan, kita akan kembangkan, mudah-mudahan dalam proses pembahasan ada titik temunya.

### **Bagaimana bentuk badan profesional yang akan mengurus soal haji dan umrah?**



foto : dok pri/iw

Ketua DPR RI Ade Komarudin saat meninjau tenda penginapan jamaah ibadah haji.

Islam yang selama ini mengurus TK sampai perguruan tinggi, itu kami rekomendasikan agar dikembangkan. Itu salah satu bukti komitmen kita kepada Kemenag, dengan haji tidak ada niat kita ingin mempreteli.

Tapi kami tidak ikhlas menyerahkan pendidikan Islam kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena ada misi yang lebih penting, misi pendidikan Islam yang mungkin tidak sepenuhnya bisa ditangani oleh Dikbud. Itu menunjukkan bahwa dalam hal mendasar kita komit ke Kementerian Agama, walaupun ada rekomendasi melepaskan pendidikan Islam ke Dikbud kita pertahankan di Kemenag.

Bahkan kita sarankan ada

Isu terkait badan yang akan dibentuk ini katanya swatanisasi itu tidak benar. Karena kalau swata badan hukumnya harus PT, Tbk. Jangankan swasta dalam bentuk BUMN pun kita tidak berani, karena ada kewajiban untuk mencari keuntungan. Dan terkait soal SDM kita katakan jangan khawatir karena bisa jadi nanti ada rekomendasi baru, antara lain diprioritaskan SDM dari Dirjen PH (Dirjen Haji saat ini) ditambah dengan SMD-SDM di luar. Orangnya bisa jadi sebagian besar sama tetapi *corporate cultur* (budaya kerja) yang tidak birokratis, memberikan pelayanan prima. Kami melihat masalah haji itu hanya bisa diubah dengan menjadi badan baru agar ada brand baru, etos kerja baru.

### **Optimis dengan badan baru bisa lebih baik?**

Saya optimis sekali, hanya saja tahun pertama sampai ketiga jelas belum sempurna. Seperti misalnya soal badan baru OJK bisa langsung *running*. Karena sekali lagi kita perlu etos kerja baru, *corporate culture* baru yang melayani masyarakat. Apalagi sekarang antrian sudah semakin panjang, tidak bisa dengan sistem sekarang. Tinggal mudah-mudahan fraksi tetap solid mendukung ini. Di awal ada 10 fraksi mendukung, sekarang ada pergeseran, dua fraksi menolak, mudah-mudahan dalam pengembangannya semua bisa bersatu. Sekali lagi, kita tidak punya kepentingan apa-apa, kita hanya ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi bangsa Indonesia terutama bagi para calon Jemaah.

### **Bagaimana dengan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), sudah diamanatkan dalam undang-undang tapi belum juga dibentuk?**

Ini juga kita terus mendorong Kemenag, apakah mereka setengah hati soal BPKH yang belum selesai sampai saat ini. Harusnya Oktober tahun 2015 kan sudah terbentuk, jadi sudah terlambat. Ini memperkuat indikasi Kemenag belum sepenuhnya mau melepas. Memang mereka mengatakan ada hambatan birokrasi dalam pembuatan lembaga ini, oleh sebab itu kita terus mendorong. Tetapi saya khawatir belum 100 persen keiklasan mereka untuk melepas itu.

### **Di mana posisi Kemenag jika nanti badan profesional penyelenggara haji sudah terbentuk?**

Nanti Kemenag akan kita masukkan ke majelis amanah haji, nanti mungkin bisa saja Menag menjadi Ketua majelis amanah haji, *ex official*, tetapi dalam rumusan kemarin belum dibahas detail.

### **Kapan target penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah?**

Mudah-mudahan dalam dua atau tiga masa sidang lagi. Namun saya khawatir pembahasan ini akan berjalan alot. ■

(eko/rnm)



Pimpinan Komisi VIII DPR RI

foto:Kresno/iw

## Badan Profesional Penyelenggara Haji Posisikan Kemenag Lebih Tinggi

**H**al yang mendasar dan menjadi pertimbangan Komisi VIII DPR RI melakukan inisiasif dan mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan perwujudan komitmen dan kesungguhan Komisi VIII.

Revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah merupakan penataan dan perbaikan manajemen penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sehingga jemaah haji dan umrah dapat menunaikan ibadahnya dengan khushuk dan mendapat haji yang mabrur.

Mengapa dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah perlu dilakukan penataan yang mendasar dengan mengganti Undang-Undang

No. 13 tahun 2008 dengan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji? Dari aspek filosofis negara harus hadir, negara harus menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Salah satu jaminan negara atas kemerdekaan beribadah adalah memberikan pelayanan bagi warga negara untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan aman, nyaman, tertib, dan sesuai ketentuan syariah.

Dari aspek sosilogis, dari segi jumlah jemaah haji dan jemaah umrah, Indonesia adalah negara terbesar di dunia yang memberangkatkan jemaah haji. Selain itu, saat ini animo masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah terus meningkat.

Namun, dari sisi hukum,

pengaturan penyelenggaraan umrah belum memadai sehingga banyak jemaah umrah yang tidak terlayani dengan baik bahkan kerap kali terlantar. Sehingga selain menimbulkan banyaknya keluhan dari para jemaah haji dan umrah, juga menyebabkan menurunnya citra penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Dengan latar belakang tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII Deding Ishak menjelaskan, saat ini Komisi VIII sedang menyusun rumusan yang ideal untuk aturan penyelenggaraan haji dan umrah. Memberikan tempat yang proporsional untuk Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji, pasalnya menurut Komisi VIII penyelenggaraan haji dan umrah merupakan pekerjaan teknis. Sehingga diperlukan badan khusus

yang mengerjakan pekerjaan teknis secara profesional.

Jika Kementerian Agama terlalu disibukkan dengan pekerjaan teknis maka, dikhawatirkan banyak tanggung jawab besar lain dalam sektor agama yang terabaikan. Karena yang diurus oleh Kementerian Agama tidak hanya agama Islam saja, tapi seluruh agama yang ada di Indonesia, beserta turunan masalah-masalah keyaninan yang ada dalam agama.

Meskipun saat ini Komisi VIII telah memberikan pujian atas

lebih tinggi dari badan profesional yang dimaksud.

### Lebih Fokus dan Profesional

“Makanya kami memandang yang sifatnya teknis bisa diserahkan kepada badan yang fokus, yang profesional itu jauh lebih baik, jadi pertimbangannya ke sana, dengan menempatkan Kemenag pada tempat yang layak dalam negara. Karena kalau Kemenag yang menjalankan dan juga mengawasi kan kurang bagus. tumpang tindih jadinya,” ujar Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Deding mengatakan saat ini yang

telah disetujui, di dalamnya ada yang mengatur badan khusus dan profesional yang mengurus haji dan umrah, posisi Kemenag akan dominan dalam pengawasan, termasuk melakukan sanksi terhadap badan itu, jika terbukti melakukan kesalahan.

“Dirjen Haji juga tetap ada, namun nanti pembinaan sesuai dengan tugas. Eksekutor teknis serahkan ke badan yang akan dibentuk, dan ini akan bersinegri dengan badan keuangan haji, sehingga tidak ada tumpang tindih, sudah ada tugasnya masing-masing. Jadi nanti Kemenag hanya

foto : kresno/iw



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI  
Deding Ishaq



RUU ini adalah inisiatif dewan. Selama ini kita mengapresiasi apa yang baik untuk diteruskan, tetapi kita juga mengkritisi dan memberikan masukan terhadap ibadah haji dan umrah ini.



kinerja Kementerian Agama dalam penyelenggaraan haji tahun 2016, namun hajat menuju perbaikan tetap ada. “RUU ini adalah inisiatif dewan. Selama ini kita mengapresiasi apa yang baik untuk diteruskan, tetapi kita juga mengkritisi dan memberikan masukan terhadap ibadah haji dan umrah ini,” ujar Deding saat diwawancarai Parlementaria.

Dia mengungkapkan, dalam urusan haji, Kemenag seringkali terlibat hal-hal yang teknis. Menurutnya tidak sepatutnya bagi Kemenag terlalu sibuk mengurus persoalan teknis, maka sebaiknya hal teknis diserahkan kepada badan yang lebih profesional, sedangkan Kemenag bertugas mengawasi badan tersebut, dan Kemenag memiliki posisi yang

terjadi, Kemenag berfungsi sebagai operator haji dan umrah, sekaligus mengurus beragam persoalan agama yang lainnya. Karena itu banyak masalah substansial agama-agama dan keyakinan yang luput dari jangkauan kementerian ini. Pembentukan badan profesional yang fokus mengurus haji dan umrah bukan untuk memisahkan Kemenag dari tanggung jawab haji dan umrah, tapi untuk mengoptimalkan peran pembinaan agama yang belum terjangkau oleh Kemenag.

“Dia yang mengawasi dan operator kurang optimal. Itu lah yang sebetulnya gagasan, bukan pemisahan tetapi pengaturan, jadi peran yang ingin kita dorong yang selama ini kurang,” tutur Deding.

Menurutnya, jika RUU PIHU

tinggal mengawasi dan melakukan lobi kepada raja untuk meminta kuota negara lain yang tidak terpakai,” jelas Deding.

Bahkan Anggota Dewan dari dapil Jawa Barat III ini, menganggap dengan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah akan menempatkan Kemenag di tempat yang lebih tinggi dalam penyelenggaraan hajat rukun Islam kelima ini.

“Jadi badan ini tidak akan menggeser atau mengambil ladang Kemenag, tetapi ada peran teknis yang sesungguhnya bisa dilaksanakan oleh badan yang profesional, dan peran Kemenag yang lebih besar. Dengan RUU ini menempatkan Kemenag pada tempat yang tinggi,” jelas Deding. ■

(eko/rnm)



Anggota Komisi VIII DPR RI **Maman Imanul Haq**

## RUU PIHU untuk Perbaiki Layanan Haji

bertajuk RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah” di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Namun, lanjut Maman, hingga kini Kementerian Agama sebagai penyelenggara haji tetap ingin pihaknya yang melakukan hal tersebut. Bukan melalui lembaga baru. “Itu tarik ulurnya kuat, karena Kemenag masih ingin dia yang menyelenggarakan. Tapi ada juga yang ingin independen, ada juga usulan lembaga yang setingkat kementerian. Itu masih digodok. Kita masih dapat argumen-argumen penolakan dalam merumuskan RUU ini,” tuturnya.

Komisi VIII menginginkan dibentuknya badan penyelenggara independen, karena menurut Maman selama ini terjadi tumpang tindih fungsi antara regulator dan operator dalam penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Agama. Kemenag, harusnya tidak bersikap hegemonik untuk urusan haji dan umrah ini.

“Yang harus diperbaiki adalah sikap Kementerian Agama yang tidak boleh *hegemonik*, karena masalah haji dan umrah ini tidak sekedar mengurus orang berangkat dari Indonesia ke Arab Saudi, tapi bagaimana para jemaah ini di luar negeri. Terkait hal ini, perlu kerja sama lintas menteri, yaitu Kementerian Luar Negeri dalam melakukan lobi-lobi dengan negara lain,” tuturnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyampaikan selain ingin

Untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan ibadah haji, DPR RI berinisiatif membentuk Panitia Kerja untuk membahas revisi atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah (PIHU). Dengan demikian pelaksanaan haji dan umrah dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib, dan lancar sesuai ketentuan syariah dengan menjunjung tinggi prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Salah satu rekomendasi memperbaiki penyelenggaraan Haji dan Umrah, menurut Anggota Komisi VIII Maman Imanul Haq adalah, dibentuknya lembaga khusus penyelenggara ibadah haji agar penyelenggaraan ibadah haji lebih fokus dan berkualitas.

“Melalui lembaga khusus, kita harapkan penyelenggaraan ibadah haji akan lebih efisien dan akuntabel,” katanya pada diskusi “Forum Legislasi

Yang harus diperbaiki adalah sikap Kementerian Agama yang tidak boleh *hegemonik*, karena masalah haji dan umrah ini tidak sekedar mengurus orang berangkat dari Indonesia ke Arab Saudi, tapi bagaimana para jemaah ini di luar negeri.

membentuk lembaga penyelenggara haji di luar Kementerian Agama, juga ingin membentuk lembaga pengawasan haji.

“Nah kita, DPR RI, minta ada pengawasan haji, sehingga Kementerian Agama atau lembaga yang terbentuk nanti akan ada yang mengawasi. Itu nanti tugasnya memantau, misal ada transaksi-transaksi liar. Kita kan tidak tahu,” jelas Maman.

### Lima Hal Krusial

Selain persoalan lembaga baru penyelenggara haji dan lembaga pengawas haji, diungkapkan Maman terdapat lima hal lain yang krusial

Pihaknya juga mempertanyakan komitmen dan transparansi dari pemerintah dalam pengelolaan dana milik jamaah haji. Karena sejak RUU Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Uang Haji disetujui hingga saat ini, pemerintah masih belum membentuk badan pengelola dana haji.

“Kami sesalkan karena sampai sekarang negara belum juga membentuk Badan Pengelola Uang Haji,” tuturnya. Bahkan dia mencurigai ada yang disembunyikan pemerintah di balik sikap tersebut karena anggaran yang luar biasa besar. Belum lagi ada wacana dana abadi mau dipakai untuk infrastruktur,”

lainnya,” ungkap Maman

Dengan kehadiran badan tersebut maka dana yang disetorkan oleh masing-masing calon jamaah akan tercatat atas nama sendiri. Pasalnya yang terjadi selama ini, dana yang disetorkan disimpan di bank atas nama Kemenag. “Sehingga kalau ada optimalisasi jamaah tidak bisa menerima langsung. Sedangkan kalau telah dikelola oleh badan tersebut maka bukan tidak mungkin jamaah bisa menerima pengembalian atas kelebihan dana haji yang disetkan,” terang politisi PKB Dapil Jabar ini.

Dana Abadi Umat (DAU) yang begitu besar di setorkan haji, memang



foto : garudaindonesia.com

Calon jamaah haji saat keberangkatan menuju tanah suci. DPR RI kini tengah berjuang untuk memberikan fasilitas yang lebih dari yang mereka dapat sekarang ini.

dalam RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Di antaranya perihal asuransi jiwa dan kesehatan, dan penguatan KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji).

“Mengenai asuransi, sekarang baru ada asuransi jiwa, kita ingin ada jiwa dan juga kesehatan. Lalu, penguatan KBIH. Karena kita melihat bimbingan haji hanya ritual. Orang diajarkan doa terus, padahal sebenarnya yang penting ialah bagaimana mereka memahami kultur Arab, bagaimana bisa masuk ke penginapan dengan hotel yang modern, sehingga orang-orang tua kita datang ke sana tidak panik,” ucap Maman.

ujarnya

Padahal, jika badan pengelolaan dana haji dibentuk oleh pemerintah, lanjutnya, jemaah haji Indonesia bisa mendapatkan manfaat yang sangat besar. Maman mencontohkan salah satunya adalah pemondokan yang jauh lebih baik bagi jamaah haji Indonesia.

“Kalau badan sudah terbentuk, tentu kita akan bisa membangun pemondokan bagi jemaah kita dan bisa membeli pesawat yang bisa digunakan untuk mengangkut mereka, termasuk bisa dipakai untuk menghadirkan catering lebih baik bagi jamaah, dan kelebihan-kelebihan

butuh pengelolaan yang professional. Apalagi kalau kilas balik, berapa banyak pejabat Kemenag yang terjebak dalam kasus korupsi dana haji. “Berkaca pada banyak kasus dan pengelolaan ibadah haji, maka pembentukan badan penyelenggaraan haji yang independen jadi keniscayaan,” tegasnya.

Ini yang harus dimulai dari sekarang jangan jadikan jemaah haji sebagai komoditas yang terus diperas, jangan sampai jemaah haji dipermainkan karena tidak kejelasannya regulasi. “Perbaikan regulasi ini arahnya peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji,” Ia menambahkan. ■

(mm/as)

# Komersialisasi Haji Penyebab Antrian Calon Jamaah

Setiap bulan Dzulhijah tiba maka perhatian dunia khususnya umat Islam di berbagai belahan bumi akan tertuju pada proses Ibadah Haji di Mekkah. Di Indonesia, menunaikan ibadah haji merupakan dambaan jutaan umat muslim Indonesia

Namun, terkadang keinginan menunaikan ibadah haji itu terhalang oleh sistem pendaftaran calon jamaah haji, karena besarnya kuota jamaah haji yang diberikan oleh Kerajaan Saudi Arabia kepada Indonesia tidak mampu mengakomodir jumlah calon jamaah haji yang ingin berangkat ke tanah suci, akhirnya berimbas semakin membengkaknya daftar tunggu (waiting list).

Selain karena animo tinggi umat islam untuk menunaikan ibadah haji, yang menyebabkan semakin membengkaknya daftar tunggu menurut Anggota Komisi VIII DPR RI Khatibul Umam Wiranu karena adanya program setor haji yang diberikan oleh perbankan baik itu Bank Konvensional maupun Bank Syariah yang sifatnya komersial.

“Ini menjadi pemicu panjangnya daftar antrian tunggu calon jamaah haji, karena dengan adanya program setor haji yang diberikan Bank ini, maka seseorang dapat mendaftarkan untuk mendapatkan nomor porsi atau *seat* calon jamaah haji melalui bantuan pinjaman dana dari bank yang kemudian diangsur dalam kurun waktu tertentu,” kata Umam dalam forum legislasi “RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU)” di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Adanya uang setor awal itu, karena



Calon jamaah haji Indonesia

foto : Jaka/iw

dalam sistem pengelolaan keuangan haji setiap tahun pemerintah menentukan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang meliputi biaya penerbangan, biaya pemondokan di Makkah dan Madinah serta *living cost* jamaah haji.

“Makanya saat mendaftar itu setiap calon jamaah haji harus menyetor awal dana tabung haji ke Bank untuk mendapatkan porsi atau *seat* kemudian melunasi sesuai BPIH ketika jamaah haji tersebut berangkat. Padahal sebenarnya mereka belum wajib secara finansial, ini hanya memperpanjang antrian, hentikan saja lebih baik,” katanya.

## Hentikan Program Setor Haji

Lebih lanjut Politisi Demokrat ini mengatakan, program setor haji tersebut dianggap mereduksi syarat istita'ah atau kemampuan secara finansial sebagai salah satu syarat



Manajemen keuangan haji mulai tidak beres ketika sifat komersial haji ini ada, karena dengan adanya setor haji ini, seseorang punya kewajiban menyetor untuk haji, padahal sebenarnya dia belum wajib berangkat haji.



seseorang menunaikan ibadah haji, sehingga Umam meminta program tersebut dihentikan saja sebagai solusi untuk mengurangi tunggu calon jamaah haji.

“Manajemen keuangan haji mulai tidak beres ketika sifat komersial haji ini ada, karena dengan adanya setor haji ini, seseorang punya kewajiban

“Misalnya gini, orang setor haji, namun baru berangkat 10 tahun lagi uangnya disimpan di bank ada bunganya sebagian dari bunga atau uang jamaah haji yang belum berangkat dipakai untuk orang yang mau berhaji tahun ini, uangnya *subhat*. Jelas menurut saya ini mengurangi kemuliaan haji itu

belum transparan dan akuntabel apalagi Badan Pengelola Dana Abadi Ummat secara *ex official* masih dijabat oleh pejabat Kementerian Agama yang seharusnya sesuai dengan amanah Undang – Undang disyaratkan melibatkan unsur masyarakat didalam pengelolaan DAU,” katanya.



Misalnya gini, orang setor haji, namun baru berangkat 10 tahun lagi uangnya disimpan di bank ada bunganya sebagian dari bunga atau uang jamaah haji yang belum berangkat dipakai untuk orang yang mau berhaji tahun ini, uangnya *subhat*.



Anggota Komisi VIII DPR RI  
Khatibul Umam Wiranu

foto : Rumi/fw

menyetor untuk haji, padahal sebenarnya dia belum wajib berangkat haji, bahkan karena takutnya tidak mendapat kuota orang tua yang memiliki uang berlebih mendaftarkan anaknya yang usai 10 tahun karena takut tidak mendapat kuota, ini kan tidak benar, anak itu kan belum wajib, kasian orang yang sudah tua menunggu lama,” katanya.

Legislator daerah pemilihan Jawa Tengah VIII ini menilai tabungan haji dari setor awal oleh calon jamaah haji yang dikelola oleh Kementerian Agama dipergunakan untuk mensubsidi kebutuhan jamaah haji yang berangkat lebih dahulu namun pratek ini minim sandaran hukum. Peralnya penggunaan bunga dari tabungan jamaah haji juga tanpa persetujuan calon jamaah haji yang belum berangkat. Secara garis besar bunga tabungan berpotensi rawan penyimpanan atau penyelewengan.

sendiri yang mewajibkan *manis tato'a ilaihi sabil*, bunga dari yang di tabung calon jamaah itu juga dampaknya tidak dirasakan calon jamaah karena tidak ada *feedback* dari perbankan,” katanya.

Umam juga mengkritisi terkait pengelolaan Dana Abadi Ummat (DAU) karena sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan Dana Abadi Ummat dan/atau sisa biaya operasi penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber halal yang tidak mengikat. Padahal sesuai amanat pasal 47 ayat 1 UU no 13 Tahun 2008 Dana Abadi Ummat haruslah dikelola dan dikembangkan untuk kemaslahatan ummat. Namun prakteknya pemerintah lebih memilih menempatkan DAU ini dalam bentuk sukuk (Surat Berharga Syariah Negara/SBSN) dan berupa Suku Dana Haji (SHDI).

“Pencatatan dan pelaporan DAU

Umam juga berharap agar Badan Pengelola Keuangan haji segera dibentuk oleh kementerian agama untuk mengurani praktik yang tidak diinginkan, karena uang jamaah haji sangat banyak.

“Amanah ini tidak pernah dijalankan oleh departemen agama, yang utama dalam pembahasan haji selama ini, Kementerian Agama ingin tetap menjadi penyelenggara haji,”katanya.

Selain itu terkait badan penyelenggaraan ibadah haji, Umam menegaskan sekali lagi, dibentuknya Badan nanti bukan untuk mengecilkan peran Kementerian Agama, tapi untuk memperkuat tugas Kemenag agar lebih fokus ke permasalahan agama di Indonesia. Menurut dia, banyak sekali tugas-tugas lain di luar haji yang harus dilaksanakan oleh Kementerian Agama, tapi belum dilaksanakan dengan baik. ■

(nm/as)

# Perlu Payung Hukum Hindari Penurunan Kualitas Penyelenggaraan Haji

**P**ada akhir September Ketua DPR RI Ade Komarudin didampingi Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan beserta para Pimpinan Komisi I, V, VIII, IX, melakukan rapat konsultasi dengan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, serta perwakilan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, Menteri Luar Negeri, Perwakilan Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat ini membicarakan tentang penyelenggaraan haji tahun 2016 yang sudah berlalu. Hasil rapat menyimpulkan, DPR RI mengapresiasi penyelenggaraan haji 2016 dengan catatan perbaikan.

Meskipun DPR RI mengapresiasi pemerintah, namun juga tetap memberikan catatan, antara lain DPR RI dan pemerintah akan terus berupaya merasionalisasikan jumlah kuota jamaah haji. Salah satu upaya tersebut, DPR RI akan melakukan muhibah ke Arab Saudi, menggunakan fungsi diplomasi parlemen. Selain kuota, fasilitas permukiman untuk jamaah haji juga menjadi sorotan, DPR RI bersama penyelenggara haji akan meminta kepada bank-bank yang menjadi tempat penyimpanan uang tabungan haji untuk berkontribusi dalam perbaikan fasilitas pemondokan jamaah.

Karena sudah dinilai mengalami perbaikan, dalam penyelenggaraan haji, maka untuk menghindari terjadinya penurunan kualitas penyelenggaraan. Sudah selayaknya penyelenggaraan yang baik ini dibarengi dengan perbaikan dan penguatan payung hukum. Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna meneguhkan hal

tersebut, dengan harapan terus ada perbaikan.

“Kalau ini tidak kita kasih payung hukum maka periode ini selesai, kita buat UU supaya kedepan akan lebih bagus ada payung hukumnya, jadi kita harapkan bahwa ini pelayanan yang lebih bagus,” ujar Choirul kepada Parlemenaria.

Menurut Choirul Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah semata-mata hanya untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk umat. “Oleh karena kami dari fraksi NasDem, akan melihat sesuatu yang menguntungkan untuk umat, yang jelas substansi dari UU kita dorong supaya pengelolaan haji ini lebih profesional, efektif dan efisien,” ungkapnya.

Seperti hanya para Anggota Komisi VIII lainnya yang ingin memisahkan antara operator haji dan regulatornya, Choirul pun begitu. Dia beralasan, dalam ranah ubudiyah Kemenag dapat melakukan intervensi langsung, namun soal eksekutor perjalanan haji, pengurusan pemondokan jamaah, sampai dengan urusan keuangan haji sebaiknya dibentuk badan khusus yang profesional.

“Kalau ibadahnya Kemenag, namun kalau lembaganya adalah seperti pengurusan keuangan tidak bisa Kemenag seenaknya saja tanpa sepengetahuan DPR RI menggunakan uang. Karena beberapa kali Kemenag menggunakan uang tanpa pengetahuan DPR RI ini menyalahi UU. Oleh karenanya kita mau memisahkan agar masalah keuangan bisa tertangani secara profesional, tidak asal-



foto : kresno/iw

Anggota Komisi VIII DPR RI **Choirul Muna**

asalan seperti yang ada sekarang ini,” tandasnya.

Choirul menjelaskan, Badan Pengelola Keuangan Haji seharusnya sudah dibentuk oleh Kemenag, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014. Namun sampai saat ini lembaga tersebut belum direalisasikan oleh yang bertanggung jawab, dia menilai keterlambatan ini telah melanggar undang-undang.

“Tapi sampai sekarang Kemenag belum mau mengundangkannya. Ini menyalahi UU, oleh karenanya kita segera mendorong Kemenag untuk membuat badan pengelola keuangan haji, supaya lebih baik. Karena tidak tanggung-tanggung uang haji ada 84 triliun tidak kecil, dan itu setiap tahunnya mendapatkan dana optimalisasi sekitar 4,1 triliun,” papar Choirul. ■

(eko/rnm)

# Badan Independen Penyelenggaraan Haji Sudah Disuarakan Sejak 2011

Munculnya usulan perlunya badan independen tentang penyelenggaraan haji, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) sudah menyuarakan sejak 2011 dan sudah disampaikan draf RUU kepada Komisi VIII DPR RI. Kemudian juga bergulir dalam bentuk rapat-rapat di panja dan bersama pakar menjadi narasumber untuk memperkaya pengetahuan.

“Memang seyogyanya dan seharusnya pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dikelola oleh satu badan khusus tidak dirangkap oleh Kementerian Agama. Karena manajemen modern itu meniscayakan ada pembagian tugas yang semakin spesifik, sekarang ini Kemenag ada 3 tugas sekaligus di dalamnya. Ada fungsi regulator, operator dan pengawasan,” tandas Ketua IPHI Abdul Kholiq Ahmad.

Fungsi pengawasan baru beberapa tahun dicopot dengan hadirnya komisi pengawas haji Indonesia tetapi masih ada itjen disitu, jadi 3 fungsi itu yang masih melekat. Katakanlah fungsi pengawasan sudah ada dan dilimpahkan kepada KPH (Komisi Pengawasan Haji) tinggal ada 2 fungsi disini operator dan regulator.

Seyogyanya operator ini juga harus dipisah, Kemenag khusus menangani hal-hal yang terkait regulasi. Sedangkan soal teknis penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji, ada lembaga khusus- lembaga pemerintah non kementerian di bawah presiden.

“Kami usulkan adalah, lembaga pemerintah non kementerian berada langsung di bawah presiden, artinya ini lembaga resmi pemerintah bukan swasta. Munculnya kekhawatiran adanya lembaga swasta hal itu tidak beralasan, bagaimana proses supaya badan ini kredibel dan akuntabel, maka prosesnya melalui seleksi untuk para direksi dan komisarisnya. Kami mempersilahkan badan pengawas dan



Ketua IPHI Abdul Kholiq Ahmad

pelaksana itu DPR RI yang mempunyai kewenangan,” jelas Abdul Kholiq.

## Terjerat Korupsi

Saat ditanya apa keuntungan dari adanya lembaga independen ini, Kholiq menegaskan, tentu akan menyehatkan budaya dan iklim penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. “Jadi selama lembaga ini tidak kita hidupkan atau tidak didirikan, maka cepat atau lambat Menteri Agama akan terjerat kasus korupsi, karena uangnya luar biasa,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, tidak ada kementerian lain yang sedahsyat Kemenag. Jumlah dana Rp 90 triliun itu bukan uang yang sedikit, keuntungannya adalah melancarkan proses pelaksanaan ibadah haji dan pengawasan ibadah haji yang transparan.

Manfaat lain, Kemenag tidak terbebani dengan hal-hal teknis yang rutin setiap tahun. “Kita lihat kalau sudah musim haji pejabat yang tidak ada kaitannya dengan hajipun turun semua ke Mekkah, padahal tidak ada kaitan langsung dengan

tupoksinya dengan urusan haji. Inikan pemborosan uang negara,” tekan dia.

Keuntungan berikutnya adalah, masyarakat bisa secara *enjoy* melakukan proses pendaftaran, transparan melakukan biaya tabungan untuk pergi haji dan lain-lain. Ada kemudahan yang bisa didapat oleh masyarakat. Kemudian yang paling penting adalah soal teknis pelaksanaan ibadah haji misalnya pemondokan, catering itu pasti pelayanan akan prima. Karena dilakukan oleh lembaga profesional yang disebut sebagai lembaga penyelenggaraan ibadah haji *independen* itu, dan itu status lembaga negara. Jadi banyak keuntungan yang bisa diperoleh dengan hadirnya lembaga khusus tentang penyelenggaraan ibadah haji.

Kemudian, bagaimana dengan proses regulasi dari lembaga ini? “Saya kira RUU PIHU dibuat sebenarnya fokusnya tidak semata-mata bagaimana bisa memunculkan lembaga baru, sebagai badan pelaksana haji yang bersifat independen. Tetapi lebih jauh lagi adalah bahwa RUU ini, mestinya menjadi semacam UU Induk yang nanti akan keluar pengelola aset dan keuangan haji. Kemudian UU yang terkait pelaksanaan dan pengawasan ibadah haji, tidak seperti sekarang.

## Tak Perlu Amirul Haj

Selanjutnya, kata Kholiq, tinggal memanfaatkan bagaimana peluang untuk meyakinkan bahwa lembaga penyelenggaraan ibadah haji independen ini perlu dibentuk dan ini akan efektif dan efisien. Berikutnya, hal-hal yang menurutnya mubajir adalah lembaga amirul haj. Lembaga ini tidak perlu ada, karena sudah ada panitia, panitia itu bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan ibadah haji. ■

foto: Rumi/iw

(tim)

# Menghadirkan Pelayanan Ibadah Haji dan Umrah Yang Profesional

Handrini Ardiyanti \*



Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat istitaah, baik secara finansial, fisik, maupun mental. Sementara ibadah umrah merupakan ibadah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat ditekankan. Pengaturan pelayanan ibadah umrah yang selama ini belum memiliki payung hukum perlu diatur bersamaan dalam pengaturan pelayanan ibadah haji. Disisilain, secara demografi, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Dengan demikian pelaksanaan ibadah haji dan umrah merupakan hal yang patut mendapat perhatian serius karena secara konstitusional, negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya

masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Sejumlah terobosan yang telah diupayakan pemerintah dalam rangka memperbaiki pelayanan penyelenggaraan ibadah haji terus dilakukan. Salah satu upaya nyata yang telah dilakukan pemerintah adalah adanya SSKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu), kini berhasil menjadikan seluruh jaringan komputerisasi haji bisa *on line* dari Kementerian Agama di pusat Jakarta hingga seluruh Kantor Wilayah Kementerian Agama, embarkasi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia maupun Arab Saudi (Jeddah, Madinah, Mekkah dan Masyair).

Namun kenyataannya, hingga kini penyelenggaraan haji masih membutuhkan berbagai perbaikan. Berbagai upaya perbaikan yang diharapkan tersebut tentunya membutuhkan payung hukum. Saat ini, dasar dan payung hukum dari penyelenggaraan ibadah haji adalah UU No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji. Namun dalam prakteknya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 belum menjawab tuntutan dan harapan masyarakat karena substansi dan cakupannya belum sepenuhnya dapat mempresentasikan terselenggaranya pelayanan ibadah haji dan umrah secara profesional, sehingga penyelenggaraan ibadah haji menjadi permasalahan kompleks yang dihadapi Pemerintah setiap tahun. Karenanya tulisan ini secara ringkas akan menganalisis permasalahan

penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sebagai bentuk pelayanan publik.

Sebelum melanjutkan pembahasan, penulis ingin menegaskan bahwa penulis memilih menggunakan terminologi “pelayanan” ibadah haji dan umrah bukan “penyelenggaraan” ibadah haji karena pada hakikatnya, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah pada hakikatnya merupakan bentuk pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam kaitan pengelolaan ibadah haji ada tiga bentuk pelayanan yang mesti diberikan, yakni pelayanan pembinaan manasik haji baik sebelum dan sesudah penyelenggaraan ibadah haji, pelayanan transportasi, pelayanan pemondokan, katering, dan kesehatan.

Alasan kedua penulis menggunakan terminologi “pelayanan” ibadah haji menghadirkan konsekuensi bahwa

Hingga kini penyelenggaraan haji masih membutuhkan berbagai perbaikan. Berbagai upaya perbaikan yang diharapkan tersebut tentunya membutuhkan payung hukum

konteks yang dilaksanakan dalam pelaksanaan kewajiban pemerintah terkait ibadah haji tidak “sekedar” menyelenggarakan melainkan “melayani”. Dengan demikian, segala upaya perbaikan dalam regulasi penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh pemerintah haruslah sesuai dengan berbagai prasyarat yang harus dipenuhi dalam pelayanan publik.

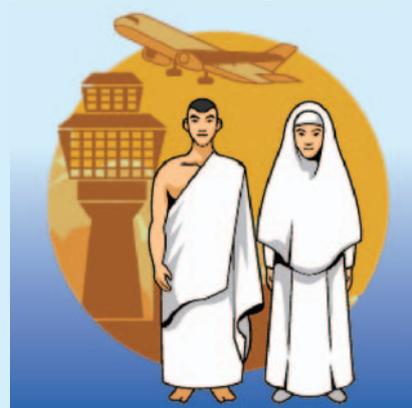
### Menghadirkan Pelayanan Haji Profesional

Sama halnya dengan pelayanan publik lainnya, pelayanan ibadah haji di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Masih juga ditemukan aparat yang tertangkap tangan korupsi. Belum lagi pelayanan yang kurang profesional karena berbagai macam kendala.

Namun dengan dipahaminya penyelenggaraan ibadah haji sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang beragama Islam, maka setidaknya ada sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi dalam upaya mewujudkan pelayanan ibadah haji yang profesional diantaranya sesuai dengan berbagai ketentuan dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam dimensi penyelenggaraan ibadah haji sebagai bentuk pelayanan publik, maka keinginan DPR RI akan adanya badan khusus di luar pemerintahan yang mengurus masalah penyelenggaraan ibadah haji dan umrah menjadi sangat relevan. Dalam terminologi pelayanan publik maka secara otomatis regulator dan operator tidak bisa berada di satu instansi atau kelembagaan. Sama halnya dengan pelayanan publik seperti yang dilaksanakan pada sistem jaminan sosial. Pada sistem jaminan sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bertindak sebagai operator sedang pemerintah bertindak sebagai regulator. Demikian pula dalam

pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimana fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Urgensi perubahan substansial dalam UU No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji menjadi sangat penting dalam sistem penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia karena sebagaimana disinggung dalam Naskah Akademik Revisi UU No.13 Tahun 2008 tertanggal 8 Juni 2015, pelayanan ibadah haji yang dilaksanakan pemerintah dari tahun ke tahun mengalami sejumlah permasalahan yang serupa diantaranya: *pertama*, pendaftaran, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan/keamanan. *Kedua*, pemondokan, transportasi, dan



- 1 Pendaftaran, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan/keamanan.
- 2 Pemondokan, transportasi, dan *catering* yang mana persoalan ini terjadi dari tahun ke tahun, tetapi tak kunjung ada solusi yang bersifat komprehensif.
- 3 Daftar tunggu haji yang sangat lama/panjang
- 4 Kurangnya koordinasi antara petugas/panitia pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.

*catering* yang mana persoalan ini terjadi dari tahun ke tahun, tetapi tak kunjung ada solusi yang bersifat komprehensif. *Ketiga*, daftar tunggu haji yang sangat lama/panjang serta *keempat*, kurangnya koordinasi antara petugas/panitia pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.

Karena itu dalam rangka mewujudkan pelayanan ibadah haji dan umrah yang profesional, perlu adanya perubahan kebijakan yang berupaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan ibadah haji, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyelenggaraan pelayanan ibadah haji dan umrah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan ibadah haji dan umrah. Dalam kerangka upaya mewujudkan pelayanan ibadah haji dan umrah yang profesional itulah, pemerintah kemudian Undang-Undang memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan berbagai standar, mengatur, dan memantau sektor swasta dan/atau badan khusus yang mengurus masalah penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Hal yang tidak boleh dilupakan, dalam penyiapan Standar Pelayanan ibadah haji dan umrah, wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Selain itu harus mengatur pula mekanisme ganti rugi pelayanan publik sebagai salah satu wujud konsekuensi nyata upaya mewujudkan pelayanan ibadah haji dan umrah yang profesional.

\* *Peneliti Madya pada Pusat Penelitian BKD DPR RI*

# Ciptakan *Grand Design* Penanggulangan Bencana Untuk Hindari Kutukan Alam

**Bencana alam merupakan peristiwa alam yang menyebabkan kerugian di berbagai sudut. Bencana alam ini dapat disebabkan karena murni kejadian alam maupun disebabkan karena adanya ulah manusia. Ada banyak sekali jenis bencana alam di dunia, seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Bencana-bencana alam tersebut sangat sering melanda di wilayah negara Indonesia.**

**M**engingat betapa rahunya negara Indonesia akan bahaya bencana alam, pemerintah harus memiliki strategi antisipasi penanganan bencana alam yang baik. Terutama untuk daerah-daerah yang menjadi titik potensial terjadinya bencana alam, karena seharusnya untuk bencana-bencana yang sifatnya berulang seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, pemerintah sudah memiliki sebuah *Grand design* yang jelas, agar lebih mudah dalam mengantisipasi keadaan, baik sebelum ataupun sesudah bencana.

Anggota Komisi VIII DPR RI Kuswiyanto menyatakan bahwa masih lemahnya koordinasi antar lembaga terkait, baik yang di pusat

ataupun yang secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Kota.

“Hal ini harus segera diperbaiki, jika pemerintah benar-benar menggunakan sistem komando yang baik, serta menggunakan alat komunikasi yang canggih, maka ketika sewaktu-waktu terjadi resiko, hal itu bisa dikomando dari mana saja berada,” tegas Kuswiyanto.

Dengan adanya *link* antara nasional, provinsi dan kabupaten kota, maka seluruh daerah dapat segera memberikan respon, lanjutnya, dan masyarakat dapat mengantisipasi dirinya.

“Pemerintah harus sudah melakukan *mapping* atau pemetaan secara tuntas dan menyeluruh. Dengan pemetaan tersebut dapat diketahui sistem dan kesiapan sumber daya manusia yang bisa dipersiapkan,” tutur politisi F PAN itu.

Menurut Kuswiyanto, dengan kondisi geografis Indonesia yang seperti ini, anggaran penanggulangan bencana yang disiapkan pemerintah termasuk yang sangat minim. Akibatnya proses *recovery* menjadi sangat lama. Pada saat terjadi bencana seringkali tidak ada koordinasi yang baik antar institusi yang berwenang, padahal kalau hal itu diorganisir dengan benar, maka jatuhnya korban bisa diminimalisir dengan sedemikian rupa.

“Pemerintah harus menganggarkan dana yang cukup untuk anggaran pra bencana, dan pasca bencana. Bencana Alam akan menimbulkan kemiskinan baru, dan *recovery* nya untuk



foto : Kresno/iw

Anggota Komisi VIII DPR RI **Kuswiyanto**

membangun daerah atau kampung yang terkena bencana membutuhkan waktu. Baik dari sektor pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, serta dalam hal membangun perekonomian kembali, karena mata pencaharian masyarakatnya terganggu,” jelasnya.

Kuswiyanto mengutarakan, bahwa *recovery* pasca bencana memerlukan dana yang besar, harus melibatkan secara penuh peranan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota dan seluruh *stakeholder* LSM.

## Perbanyak Desa Siaga Bencana

“Komisi VIII DPR RI telah berusaha keras supaya anggaran penanggulangan bencana dapat dipenuhi, dan meminta agar kampung-kampung dan desa siaga bencana

diperbanyak, terutama bagi daerah-daerah yang sangat rawan. Dewan juga meminta agar diadakan pelatihan kepada masyarakat, sebab pelatihan tersebut bertujuan agar ketika terjadi bencana maka masyarakat, pemerintah daerah, dan seluruh institusi terkait mengetahui apa yang harus dilakukan,” ungkap legislator Dapil Jawa Timur IX tersebut.

Pemerintah harus siaga penuh untuk menyiapkan segala sesuatunya

menjadi tinggi apabila masing-masing lembaga dan institusi berjalan sendiri-sendiri, seharusnya simultan dan berjalan bersama-sama. Kalau semua tertata secara sistemik, maka sesuatu yang mahal akan menjadi lebih murah. Komitmen inilah yang hingga kini belum bisa diwujudkan, dan masih terjadi ego-ego sektoral.

Hal itu juga yang menyebabkan kinerja pemerintah dalam penanganan bencana alam masih terkesan lambat,

Astuti mengatakan, mitigasi BNPB harus valid. Hasil mitigasi terkait perkiraan-perkiraan bencana yang akan menimpa daerah harus segera disampaikan kepada daerah-daerah yang bersangkutan. Sehingga masing-masing daerah yang memiliki karakteristik berbeda itu, dapat mempersiapkan dan mengantisipasi bila terjadi bencana.

“Instrumen BPBD harus selalu di *update* mengenai *capacity building* dalam penanganan bencana. Para anggotanya perlu di latih dengan berbagai simulasi bencana yang berbeda. Selain BPBD ada Instrumen lain yang terpenting yaitu masyarakat, sebab ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana sangat diperlukan, agar mereka dapat memproteksi dirinya dari bencana yang mungkin terjadi,” tutur Endang.

Politisi Golkar dari Dapil Jateng ini meminta agar Seluruh *stakeholder* dapat bersatu untuk menanggulangi bencana alam secara bersama-sama.

“Komisi VIII mendorong agar masyarakat tanggap mengenai kearifan lokal, karena pada saat ini masalah kearifan lokal telah mulai memudar. Masyarakat harus diperkenalkan kembali dengan kearifan lokal sehingga mereka mengerti akan tanda-tanda terjadinya bencana,” ucapnya.

Senada dengan Kuswiyanto, Endang juga menilai bahwa anggaran untuk penanggulangan bencana yang ada, ternyata masih sangat minim. Sebab dalam konteks Indonesia sebagai negara yang berada dalam *ring of fire* dan berpotensi akan berbagai tipe bencana, maka jumlah anggaran yang dipersiapkan untuk penanggulangan bencana pada saat ini sangat tidak memadai.

“Semua pihak harus bergerak bersama dalam upaya mengantisipasi bencana dan merealisasikan suatu komitmen. Bila komitmen telah dipegang dan realisasinya dilaksanakan, maka jatuhnya korban akibat bencana bisa diminimalisir,” pungkasnya. ■

(dep/mp)



foto : Kresno/iw

Anggota Komisi VIII DPR RI **Endang Maria**



Anggaran memang penting, namun bagaimana pemerintah harus hadir dan mengajari kepada masyarakatnya untuk ikut berpartisipasi secara bersama-sama.



dengan baik, sehingga jumlah korbannya semakin lama semakin kecil. Menurut pandangan Kuswiyanto, selama ini institusi pemerintah masih berjalan sendiri-sendiri dalam upaya mencegah dan mengantisipasi bencana, seharusnya antara BNPB, Kementerian LHK, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, dan seluruh yang terkait saling bersinergi.

“Jangan sampai aktifitas eksplorasi sumber daya alam berakibat pada kerusakan alam dan lingkungan, dan menyebabkan terjadinya kutukan alam. Alam boleh dieksploitasi dan diambil segala hasil yang terkandung dalam perut bumi, tetapi jangan lupa sebagian hasilnya dikembalikan lagi kepada alam untuk perbaikan,” tandasnya.

*Unit cost* yang ditimbulkan akan

karena tidak jelasnya pembagian tugas yang ada. Dan *recovery* terhadap masyarakat yang menjadi korban tidak dapat segera dituntaskan, hingga menyebabkan keresahan pada masyarakat.

“Anggaran memang penting, namun bagaimana pemerintah harus hadir dan mengajari kepada masyarakatnya untuk ikut berpartisipasi secara bersama-sama. Kalau semua dikeroyok secara bersama-sama, maka tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semua akan lebih mudah dan gampang diselesaikan, dan *recovery* nya akan berjalan dengan cepat,” tukasnya.

#### Mitigasi Harus Valid

Sementara ditempat terpisah, Anggota Komisi VIII Endang Maria

# Perbaiki Produksi dan Tata Niaga Gula

**Indonesia pernah menjadi salah satu eksportir gula terbesar di dunia pada masa penjajahan Belanda (1930-an). Tanah yang subur, ketersediaan lahan yang mencukupi dan jumlah tenaga kerja sepadan dapat dimaksimalkan dengan baik oleh kolonial untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai produsen gula andal di eranya**



Anggota Komisi VI DPR RI **Eka Sastra**

foto: Rumi/iw

Kalau di negara lain itu rata-rata produksi 10 ton gula per ha sementara di Indonesia sendiri hanya 8 ton per ha,” katanya.

Menurut dia, harus ada perbaikan mulai dari pemupukan, bibit dan kredit untuk petani tebu. “Jadi kita perbaiki dari sisi produksi targetnya. Kita menaikkan produksi menjadi 10 ton per ha. Kita perbaiki sisi produksi sambil memperluas lahan untuk tebu kita,” ujarnya.

Belum lagi dilihat dari sisi tata niaga, menurut dia, karena gula dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu, misalnya gula rafinasi, hanya ada beberapa pabrik yang mengimpor barang mentah kemudian diolah menjadi gula lebih baik dari gula Kristal di Indonesia.

“Belum lagi pabrik gula lain, sehingga menyebabkan harga gula kita menjadi mahal. Ini mahal mungkin karena rantai produksi yang panjang atau ada permainan kartel di dalamnya,” katanya.



Jadi kita perbaiki dari sisi produksi targetnya. Kita menaikkan produksi menjadi 10 ton per ha. Kita perbaiki sisi produksi sambil memperluas lahan untuk tebu kita.



**N**amun keadaan saat ini sangatlah berbeda. Indonesia tidak mampu mempertahankan reputasinya sebagai salah satu negara pengeksportir gula terbesar di dunia.

Bahkan lebih buruk lagi, produksi gula dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan nasional sehingga menjadikan Indonesia sebagai pengimpor gula. Kondisi ini tentu saja sangat disayangkan. Pemerintah belum mampu merealisasikan salah satu program unggulannya untuk mewujudkan Indonesia swasembada.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Eka Sastra mengatakan dari data yang ada, kebutuhan gula dilihat dari kebutuhan dan pasokan sangat tidak berimbang. “Supply kita hanya 2 juta ton, sementara demand kita 5-6 juta ton

per tahun. Artinya ada kebutuhan sekitar 2,5 sampai 3 juta ton per tahun kebutuhan gula kita,” kata Eka Sastra kepada Parlemen, di Gedung DPR RI, Jakarta, baru-baru ini.

Dengan kondisi seperti itu, lanjut Eka Sastra, pilihannya sangat terbatas dan dilematis. Pilihannya adalah tidak mengimpor gula yang kemudian akan terjadi kelangkaan gula yang berdampak akan melambungnya harga gula di pasaran, atau melakukan impor gula dengan resiko mematikan kedaulatan para petani gula.

Eka Sastra mengatakan ada yang salah dari sisi produksi gula yang dianggapnya tidak efisien, diantaranya jumlah lahan yang semakin sedikit ditambah biaya pupuk yang mahal dan tidak unggul.

“Terlalu banyak masalah sehingga produksinya jadi tidak maksimal.

Yang pasti kata politisi dari Partai Golkar itu, solusinya adalah bagaimana pemerintah bekerja sama dengan pabrik gula mencari lahan sehingga tidak perlu lagi mengimpor bahan baku *raw sugar* dari luar negeri.

“Target swasembada gula harus tercapai dengan cara kita perluas lahan kita dan meningkatkan produktifitas lahan kita sehingga produksi gula dari tiap ha menjadi lebih meningkat lagi,” tegasnya.



Anggota Komisi VI DPR RI **Lili Asdjudiredja**

Soal *raw sugar* atau gula mentah, Anggota Komisi VI Lili Asdjudiredja mengatakan *raw sugar* menurut ketentuan yang berlaku harus ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian untuk disampaikan ke Dirjen Perdagangan Luar Negeri.

“Kita ingin terus terang saja, banyak sekali gula-gula rafinasi berdampak ke pasar. Oleh karena itu kami mau tahu alur rafinasi ini,” ujarnya.

Yang dikhawatirkan, lanjut Lili, jangan sampai terjadi *raw sugar* diimpor kemudian diproses jadi rafinasi kemudian merembes kemana-mana. “Sedangkan rafinasi itu biasanya dipakai untuk industri makanan dan minuman. Kalau itu

merembes, pabrik-pabrik gula lokal ini bisa mati,” katanya.

Lili mengatakan pemberdayaan secara maksimal pabrik-pabrik gula lokal. “Karena pabrik gula lokal itu produktivitasnya rendah, tentunya kita akan lebih suka kalau industri gula lokal itu berkembang. Harapannya sebenarnya kita ingin swasembada gula,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VI lainnya, Endang Srikarti mengatakan bahwa ketentuan rafinasi *raw sugar* itu pertama industri-industri yang besar, seperti industri minuman dan pangan, kedua, diperuntukan untuk pertanian dimana diwajibkan membuat lahan terlebih dahulu untuk bibitnya.

“Idealnya dari UU ketentuannya seperti itu, tetapi lama kelamaan aturan itu tidak dilakukan, sehingga Komisi VI DPR RI membuat Panja untuk mengetahui, mengaudit mana yang kurang pelaksanaannya,” kata Endang.

Namun, Endang menjelaskan, dilapangan Panja menemukan, bahwa sampai sekarang, petani justru gulung tikar dan tidak diperhatikan. “Nah ini yang perlu disosialisasikan dengan keadaan rafinasi *raw sugar* yang peruntukannya untuk itu, bukan dijual dipasaran. Lebih-lebih yang namanya kiloan, padahal yang untuk industri pangan dan minuman saja harus minimal 50 kg dalam 1 sak. Tidak boleh diparsialkan,” tegas Endang.

Selanjutnya, tambah Endang, kita juga harus bekerjasama dengan perdagangan untuk stop impor. “Kita harus berani mengatakan stop! Beras saja dengan Mendag sekarang Pak Enggar berani untuk menyetop, kenapa gula tidak berani, khususnya untuk pengecer,” tegasnya.

“Kalau memang untuk pangan dan minuman kita masih banyak kekurangan, boleh lah (impor-red) tapi tetap ada standarisasi kebutuhan bukan dipaksakan, nanti malah importer-importer ini yang menjadi rajanya,” lanjut Endang.

“Sekarang kita benahi, agar semangat untuk petani tebu menjadi hidup lagi, karena Indonesia ini dulu lumbungnya gula,” tambah Endang.

Disisi lahan, ungkap Endang, dirinya menyoroti banyak lahan-lahan yang perlu dibenahi, pasalnya sekarang lahan banyak disulap menjadi Mall, “Ini kan juga godaan-godaan untuk menjual lahan, oleh karena itu, pemerintah wajib untuk sosialisasi dan memberikan suatu pelarangan ijin untuk pengeringan



Anggota Komisi VI DPR RI **Endang Srikarti**

sawah dijadikan mall,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Endang pun menghimbau kepada pemerintah untuk memberikan benih dan pupuk secara gratis atau pinjaman, “Pemerintah jangan pelit beri benih termasuk pupuk, misalnya juga pinjaman untuk sementara, nanti pada saat panen diangsur. Nah ini kan terobosan, supaya kita dapat merangsang petani,” terangnya.

Lalu, saran Endang, pemerintah juga perlu lakukan sosialisasi di media massa seperti TV, “Nah di TV itu nanti coba disosialisasikan, jangan hanya anggota dewan yang mensosialisasikan ke daerah-daerah. Bagusnya lagi koordinasi dengan kami anggota dewan,” ujarnya. ■

(nt)



# Peningkatan Dana Parpol Penting Untuk Perkuat Demokrasi

Partai politik adalah pilar penting dalam penguatan demokrasi. Namun demokrasi yang baik tidak akan terwujud tanpa adanya kelembagaan partai politik yang baik pula. Oleh karenanya, partai politik adalah kunci untuk memperkuat demokrasi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

**R**encana pemerintah untuk merevisi PP No 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dinilai positif untuk memperbaiki kondisi partai politik di Indonesia. Dengan adanya peningkatan bantuan dana partai politik, maka partai politik akan semakin kuat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sebelumnya, jumlah bantuan dana partai politik yang senilai Rp 108,- per suara dinilai masih jauh dari cukup untuk mendukung kerja partai politik.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria memberikan apresiasi terhadap usulan penambahan bantuan keuangan parpol dari APBN, menurutnya jumlah bantuan yang kini diterima parpol masih belum mencukupi kebutuhan partai.

“Memang dana parpol selama ini hanya Rp 108,- per suara. Itu yang kita terima soal pendanaannya, dana tersebut sangat penting. Partai yang besar saja cuma mendapat sekitar 2 miliar, apalagi partai kecil. Bisa



dibayangkan, dana 2 miliar sekian untuk kebutuhan partai selama 1 tahun sangat tidak cukup,” ujarnya saat ditemui Parleментарia di ruang kerjanya pada Senin, (17/10/2016).

Menurut politisi yang akrab dipanggil Ariza ini, besaran dana yang kini diterima amat minim untuk membiayai operasional sehari-hari partai yang kepengurusannya tersebar hingga tingkat kelurahan. Ia menjelaskan untuk membiayai kesekretariatan saja tidak cukup, apalagi untuk membiayai program. Padahal menurutnya, anggaran terbesar parpol adalah untuk membiayai program.

“Saat ini uang Rp 108,- per suara itu untuk pembiayaan kesekretariatan saja tidak cukup, apalagi untuk membiayai program. Padahal anggaran parpol yang terbesar itu kan untuk membiayai program. Sekretariat itu bagian yang kecil, namun demikian itu juga belum mencukupi dari anggaran yang diterima,” jelasnya.

Dalam era demokrasi saat ini, menurut Riza Patria, parpol perlu

didukung pembiayaan yang cukup agar dapat menjalankan tugasnya secara memadai. Ia pun mengaku tidak menuntut, namun besar harapan partai politik mendapat perhatian serius dari pemerintah. “Sebagaimana tugas parlemen sangat berat. Parpol ini perlu didukung pembiayaan yang cukup agar memadai. Kita tak menuntut lebih, kita hanya meminta agar ada perhatian yang serius dan dukungan pemerintah terhadap parpol,” terangnya.

Politisi Gerindra ini mengatakan, meskipun keadaan ekonomi Indonesia saat ini sedang sulit, pihaknya pun menyerahkan peningkatan besaran dana parpol tersebut pada kemampuan pemerintah, sehingga agar penambahan dana parpol tidak dijadikan beban pada pemerintah.

“Mengenai besaran, Saya kira ini juga harus disesuaikan dengan kemampuan pemerintah. Saat ini kita tahu pemerintah sedang defisit anggaran. Pemerintah tak memiliki dana yang cukup, atas dasar itu kita minta pemerintah juga bisa menyesuaikan antara kebutuhan yang memang dibutuhkan disesuaikan dengan belanja negara,” tuturnya.

Ariza menambahkan, kekurangan dana yang dialami partainya juga banyak dibantu oleh sumbangan para pendiri, kader dan simpatisan. “Begitu juga Gerindra, selama ini jadi partai yang mandiri dan dibiayai oleh pendiri, pengurus dan kader serta simpatisan untuk membiayai kegiatan parpol,” tutur Riza.

“Biaya yang ada saat ini kita cukupkan dengan kemampuan yang ada. Namun demikian biaya yang ada tidak memenuhi sebagaimana diharapkan. Saya kira semua parpol juga mendukung usul Kemendagri untuk meningkatkan dana bantuan parpol,” sambungnya.

Mengenai kesiapan parpol



foto : Jayadi/iw

Wakil Ketua Komisi II DPR RI  
**Ahmad Riza Patria**



**Karena ini pakai dana APBN maka dipertanggungjawabkan sesuai peraturan keuangan negara dan diperiksa BPK. Maka parpol sudah seharusnya tidak hanya menggunakannya secara baik, efektif dan efisien, tapi juga dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan sesuai ketentuan akuntansi negara.**



untuk mengelola tambahan anggaran yang diberikan negara, Riza Patria mengingatkan agar seluruh parpol harus siap dengan segala laporan pertanggungjawaban yang berstandar pada akuntansi negara, sehingga jika tidak mampu mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan bisa dikenakan sanksi pidana. Agar dana yang diberikan betul-betul bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

“Saya kira masalah kesiapan parpol untuk mengelola dana, parpol harus siap. Karena ini pakai dana APBN maka dipertanggungjawabkan sesuai peraturan keuangan negara dan diperiksa BPK. Maka parpol sudah seharusnya tidak hanya menggunakannya secara baik, efektif dan efisien, maka juga dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan sesuai ketentuan akuntansi negara,” terangnya.

Ia pun menegaskan harus diberikan sanksi bagi parpol yang tidak menggunakan anggaran tersebut dengan baik atau dilakukan penyelewengan. “Bagi parpol yang tidak menggunakan dengan baik bantuan parpol itu akan ada sanksi, setiap penggunaan keuangan negara termasuk parpol memiliki sanksi yg mengikat,” tegasnya.

Anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat III ini menuturkan, keberadaan parpol yang kuat akan menghasilkan hasil dari demokrasi yang baik pula, mengingat, partai politik adalah bagian dari kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945.

“Ya saya kira kan berserikat, berkumpul, berpendapat diatur dalam UUD, sudah jadi hal wajar apabila parpol dapat bantuan dana dari pemerintah yang bantuannya disesuaikan kemampuan pemerintah, kita tidak pernah memaksakan. Berdirinya parpol atas kehendak masyarakat yang mendapat dukungan dari rakyat. Ini juga baik untuk perkembangan demokrasi kedepan,” tutup Riza Patria. ■

(hs)

# Jangan Sampai UU ITE Direvisi Mengikuti Perkembangan Medsos



foto : Runi/iw

Forum Legislasi mengangkat tema “Mendesak RUU ITE Disahkan” di Gedung DPR RI, Senayan

## Pembahasan revisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hampir selesai dan siap dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.

Menurut Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha, hal itu karena tidak ada perbedaan mendasar antara DPR RI dan pemerintah, yang mengusulkan RUU ITE yang terdiri dari 75 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tersebut.

“Pembahasan RUU ITE itu tidak ada perubahan mendasar antara DPR RI dan Pemerintah, maka sebelum 28 Oktober nanti sudah akan dibawa ke Paripurna DPR RI untuk disahkan,” tegas Syaifullah Tamliha dalam forum legislasi “Mendesak RUU ITE Disahkan” bersama Ketua Panja RUU ITE Pemerintah (Kominfo RI), Henri Subiakto, dan Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/2016).

Politisi dari Fraksi PPP ini menegaskan, bahwa UU ITE sangat dibutuhkan, terutama menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia mengaku, PPP sendiri tidak akan melakukan *black campaign* (kampanye hitam).

Misalnya tidak akan menjelek-jelekkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) – Djarot maupun Anies – Sandiaga Uno. “Untuk Pilkada DKI Jakarta, dan daerah lain kita serahkan kepada rakyat untuk memilih,” ujarnya.

Ia menyatakan, bahwa yang terpenting jangan sampai UU ITE ini terus dilakukan revisi dalam mengikuti perkembangan media sosial (Medsos). Karena itu kata Syaifullah, UU ITE ini juga harus mengakomodir Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dikabulkannya gugatan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, terkait rekaman saham PT. Freeport yang diajukan oleh mantan Menteri ESDM Sudirman Said tersebut.

Ada beberapa poin penting dalam revisi ini. Salah satu poin penting dalam revisi UU ITE ini adalah ancaman hukuman tentang pencemaran nama baik. Ancaman hukuman terhadap pidana ini menjadi lebih ringan. Jika dahulu maksimal 6 tahun, sekarang menjadi 4 tahun, sehingga si pelaku tidak bisa langsung ditahan.

Poin penting berikutnya adalah revisi UU ITE juga mengatur soal penyadapan. Penyadapan dengan alat apapun, hanya boleh dilakukan oleh institusi penegak hukum.

pidana terhadap pelanggaran dalam pasal 27 ayat (3) mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. Sanksi pidana terhadap pelanggaran pasal 27 itu yang semula dipidana 6 tahun atau denda Rp 1 miliar, diubah menjadi 4 tahun dan denda Rp 750 juta. Untuk tambahan 2 pasal, yaitu pasal 45 A dan 45B, namun hanya terkait penulisan dalam UU.

Sementara itu, Ketua Panja RUU ITE Pemerintah (Kominfo RI), Henri Subiakto menyatakan, jika revisi UU ITE ini belum juga disahkan sampai

situs yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. “Jadi, pemerintah berwenang melakukan pencegahan dan penegakan hukum,” pungkasnya.

Irman Putra Sidin menegaskan jika tak ada masalah dengan pasal 27 UU ITE tersebut karena dampaknya dahsyat dan tanpa batas. Dimana negara tidak mampu mengontrol transmisi profil-profil seseorang yang direndahkan dan tidak lagi menghormati orang lain yang tidak mampu dikontrol negara.

Instrumen pidana untuk mengawal



**Jangan sampai UU ITE ini terus dilakukan revisi dalam mengikuti perkembangan media sosial (Medsos). Karena itu UU ITE ini juga harus mengakomodir Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dikabulkannya gugatan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, terkait rekaman saham PT. Freeport yang diadakan oleh mantan Menteri ESDM Sudirman Said tersebut**



Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha



foto: Iwan Armanias/iw

Poin lainnya, adalah seseorang berhak untuk meminta mencabut postingan yang tidak benar tentang dirinya di media sosial. Setelah permintaan pencabutan itu dibawa ke pengadilan, Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kemenkominfo) yang kemudian mencabut itu.

Menurut Tamliha, hanya 4 pasal yang berubah, dan 2 pasal tambahan. Sedangkan pasal 27 (3) sudah diatur dalam pasal 310 dan 311 KUHP berdasarkan delik aduan. Sementara pasal 31 terkait intersepsi, penyadapan serta menghapus ayat (4) sesuai dengan putusan MK No.5/PUU-VIII/2016 dimana penyadapan merupakan pelanggaran HAM sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, maka jika negara ingin menyimpangi hak privasi warga negara harus dalam bentuk UU, dan bukan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP).

Pasal 45 diubah terkait ketentuan

akhir Desember 2016 nanti, maka UU ITE yang lama yang berlaku. Khusus terkait pencemaran nama baik dalam pasal 27 UU ITE tersebut, polisi tidak boleh lagi melakukan penahanan sebelum ada keputusan pengadilan.

Demikian juga bagi situs bahwa semua situs yang bisa diakses oleh publik menurut Henri, kena UU ITE ini. Baik yang dibuat di dalam negeri maupun di luar negeri (extra territorial). Termasuk situs yang disebut abal-abal.

“Dulu Kominfo menutup 22 situs yang dinilai bertentangan dengan NKRI dan Pancasila, dan hanya satu dua pemilik situs yang protes ke Kominfo RI, selebihnya berarti abal-abal. Bahkan ada yang dibuat di Suriah, dan negara Timur Tengah lainnya,” tambahnya.

Sejauh itu, RUU ITE ini lebih demokratis dimana pemerintah tetap melindungi kepentingan umum dengan memblock medsos atau

hak-hak martabat seseorang, yang sebelumnya gugatan tersebut selalu ditolak oleh MK. Karena itu dengan UU ini jangan sampai hak-hak orang terus terancam. Dimana pasal 27 UU ITE tersebut secara konstitusi tidak ada masalah, dan hanya masalah implementasi. Seperti tak boleh ditahan sebelum ada putusan pengadilan.

Karena itu kata Irman, dalam mengadili kasus ini penegak hukum harus menghilangkan hak-hak subyektifnya untuk mempermudah hak-hak orang lain. Sehingga perlu merubah paradigma untuk mempersulit paradigma penahanan itu dipersulit melalui revisi UU KUHP, bukan UU ITE.

“Jadi, tanpa revisi UU ITE ini tetap bisa ditegaskan menjelang Pilkada untuk mencegah pencemaran nama baik seseorang. Bahwa yang menjadi masalah adalah implementasi penegakan hukum pidana itu yang harus direvisi,” pungkasnya. ■

(sc)

# FOTO BERITA

Wakil Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso didampingi Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany membuka acara Kopi Darat Admin Media Sosial dan Website Lembaga Negara, di ruang KK I, Gedung Nusantara DPR RI.  
Foto: Iwan Armanias/iw





*Tim Panja RUU Sistem Perbukuan Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Sutan Adil Hendra meninjau Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov.Jambi. Foto: Jaka/iw*





*Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Michael Watimena meninjau infrastruktur perhubungan, pembangunan saluran air bersih di Provinsi Papua Barat.  
Foto: Nita/iw*





*Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dipimpin Wakil Ketua Benny K Harman meninjau Lapas Klas II Bengkulu. Foto: Ayu/iw*





*Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Deding Ishak meninjau Pembangunan Asrama Haji Embarkasi di Sungai Buluh, Batang Anai, Padang Pariaman.  
Foto: Iwan Armanias/iw*





*Komisi IV DPR RI meninjau persemaian permanen bibit aren dan gudang penyimpanan hasil panen jagung di Kabupaten Gorontalo. Foto: Rizka/iw*



# Berpolitik, Ingin Membuat Rakyat Kaya dan Sejahtera

Sutan menjalani masa kecilnya, di Desa Huta Beringin, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Menjadi seorang anak dari pendiri sebuah sekolah pesantren terbesar di Madina, membuat kehidupan Sutan lekat dengan agama Islam. Selain menjadikan agama sebagai dasar dalam menjalani kehidupan, Sutan menjalani masa Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas dengan penuh kegigihan dan perjuangan.

“Jarak rumah dengan SMP saya bersekolah, yakni SMP Negeri di Kayu

**“Jika agama melekat dengan kita, berarti Allah pasti mengetahui apa yang kita lakukan dan dimana kita berada. Inilah yang menjadi filter kita dalam menjalani aktivitas apapun”. Hal itulah yang selalu menjadi pedoman Sutan Adil Hendra, yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR dalam menjalani kehidupannya sebagai pejuang politik, maupun saat memimpin keluarga.**



foto: Andri/iw

**T**erlahir dalam tradisi pesantren dan kultur Islam Tapanuli Selatan, atau kini telah dimekarkan menjadi Kabupaten Mandailing Natal (Madina), membuat seorang politisi Partai Gerindra ini kental dengan nilai-nilai idealisme. Bagi anak ke-8 dari 10 bersaudara ini, taat pada ajaran agama idealisme Islam itu identik dengan konsepsi pendidikan.

Laut, berjarak sekitar 11 kilometer. Karena angkutan umum masih sangat minim, walaupun ada itu hanya sekali di pagi hari, jadi jam 06.00 pagi sudah harus berangkat. Jangan bayangkan bisa duduk nyaman di dalam angkutan, kadang saya sampai harus bergelantungan di pintu angkutan,” kisah Sutan.

Perjuangannya tidak hanya berhenti di situ. Minimnya jumlah ruang kelas belajar, membuatnya harus memulai kelas pada siang hari pada saat kelas 1 SMP. Hal itu menyebabkan kelas diakhiri pada pukul 17.30 sore, yang berarti Sutan harus menyiasati untuk dapat sampai di rumah tidak terlalu malam. Pasalnya, berada di lingkungan perkebunan, membuat jalanan tampak lebih sepi dan berbahaya.

“Ada angkutan pada sore hari, tapi cuma sekali. Dan itu pun hanya berjalan sepanjang 7 kilometer dari total perjalanan 11 kilometer. Sisa perjalanan harus saya lakukan dengan berjalan kaki. Makanya tak heran, saya sampai di rumah bahkan lebih dari jam 8 malam, bahkan bisa sampai jam 9 malam. Hal itulah yang menyebabkan tidak semua teman SD saya yang melanjutkan ke SMP,” ungkap Sutan.

Memasuki masa Sekolah Menengah Atas pun, Sutan

terlihat ketika memasuki jenjang SMA. Ia didaulat menjadi Ketua OSIS, ketika baru menginjak kelas 1 SMA. Padahal, biasanya jabatan ini diemban oleh murid kelas 2 atau 3 SMA. Berkat kepemimpinan Sutan, sekolahnya pun mendapat banyak penghargaan.

Selama menjalani kehidupannya di seragam putih abu-abu, Sutan pun tetap aktif di berbagai organisasi. Tentu, ia tak melupakan kewajiban utamanya sebagai pelajar, untuk selalu belajar dan meningkatkan prestasi.

“Alhamdulillah dari kelas 1 sampai

ke sepuluh anaknya. Semuanya sampai di perguruan tinggi. Alhamdulillah, kini semua telah berhasil. Ada yang berwiraswasta, PNS, hingga menjadi pejuang politik,” bangga Sutan.

Sutan mengaku, banyak pelajaran yang didapatkan dari kedua orangtuanya. Sang Ayah, tak pernah absen dalam memberikan wejangan dan pandangan hidup. Orangtua Sutan selalu berpesan, dimana pun manusia berada, mendapat baik derajat di sisi manusia maupun di hadapan Allah, tergantung dari ilmu pengetahuan yang dimilikinya.

“Saya melihat ilmu pengetahuan bisa menyelesaikan berbagai permasalahan, makanya saya berjuang dengan kerja keras, berpikir cerdas, saya harus tuntaskan cita-cita saya, dan saya harus ikhlas menjalani semua proses yang harus saya lalui ini. Sehingga saya berhasil melanjutkan ke perguruan tinggi,” ingat Sutan.

Sutan mengaku, dirinya selalu berpegang teguh kepada nasihat-nasihat orangtua. Ia pun tak lupa, dalam setiap mengambil langkah-langkah apapun dalam menjalani kehidupan ini, ia selalu meminta izin dan doa dari kedua orangtua. Dengan niat baik dan ridho Allah, ia yakin lebih tenang dalam melangkah dan mengambil suatu keputusan.

“Saya menyadari betul, tidak akan kita dapatkan ridho Allah tanpa adanya ridho dari orangtua. Hal itu pula yang mengantarkan saya hingga dapat menyelesaikan pendidikan pasca sarjana saya dengan predikat *summa cum laude* (4.00). Hal ini tidak bisa saya raih begitu saja. Ini tidak terlepas dari semua dukungan terutama dukungan dari kedua orangtua,” imbuh Sutan.

### Warnai Dunia Politik

Memasuki dunia kerja, Sutan menekuni usaha perkebunan karet dan sawit. Walaupun sibuk dengan berbagai kegiatan usaha ini, ada satu hal yang mengusik pikirannya. Ia ingin juga melibatkan diri dalam berbagai kegiatan sosial. Tahun 2011, Sutan



foto : Jaka/iw

Saat memimpin Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI ke Jambi

harus berjuang dalam menjalani pendidikannya. Untuk membantu membiayai pendidikannya selama jenjang SMA Negeri di Tanobato, Sutan pun mencari beasiswa, hingga mengikuti berbagai perlombaan, untuk mendapatkan hadiah yang digunakan untuk membiayai sekolah.

Kendati demikian, peringkat 1 atau 2 di kelas dari tingkat SD hingga SMA pun tak pernah lepas dari Sutan. Bahkan, jabatan Ketua Kelas pun selalu diembannya. Bahkan, ketika SMP pun dia menjabat Ketua OSIS. Selama di SMP pun, ia menjadi Ketua Koperasi Sekolah. Berkat kerjasama yang baik, Koperasi Sekolahnya berhasil menjadi koperasi terbaik se Kabupaten Madina.

Jiwa kepemimpinan Sutan semakin

kelas 3 SMA, saya mengambil jurusan IPA, dan tidak pernah absen dari peringkat lima besar di kelas. Bahkan saat saya kelas 2 SMA itu ada lomba pidato tingkat SMA seKabupaten Madina, dan saya mendapat juara satu dengan mendapat hadiah TV. Dan itu luar biasa,” jelas Sutan.

Walaupun syarat akan kesibukan selama menjadi pelajar, Sutan tentu tak lupa berbakti kepada orangtuanya. Kala itu, Sutan selalu terlibat dalam usaha keluarga, yaitu penggilingan padi. Lelah selama belajar di sekolah dan menggiling padi di sela-sela kegiatan sekolah, terbayar lunas, ketika orangtua bangga dengan apa yang dihasilkan oleh sang anak.

“Saya tidak bisa membayangkan, bagaimana Ayah dan Ibu membiayai

mulai menggeluti berbagai organisasi, bahkan ia juga menjabat ketuanya. Bahkan, ia memimpin pengurus organisasi yang bisa dikatakan tidak memiliki anggaran dari Pemerintah untuk menjalani kegiatannya.

“Untuk menjadi ketua organisasi itu, dibutuhkan keikhlasan dalam berorganisasi. Saya melihat ini adalah salah satu upaya mensyukuri nikmat dari yang telah Allah berikan, karena saya sangat yakin dengan Firman Allah, apabila kamu syukuri nikmat yang aku berikan niscaya aku akan tambahkan. Dan jika kamu kufur dalam nikmat itu, azabku sangat pedih,” kata Sutan.

Pada tahun yang sama, Sutan pun dipercaya oleh Ketua Umum Partai Gerindra, untuk memimpin DPD Partai Gerindra di Provinsi Jambi. Ia mengaku, sebelum dirinya menjabat Ketua DPD Gerindra Jambi, Anggota DPRD Kabupaten dan Kota dan Provinsi, hanya ada 13 orang. Padahal untuk DPRD Tingkat I dan II ini terdiri dari 11 kabupaten dan kota. Semenjak dipimpinnya, pada pemilu 2014, Partai Gerindra mendulang perolehan suara yang cukup tinggi, yakni mencapai 46 anggota untuk DPRD Tingkat I dan II.

“Alhamdulillah saya juga terpilih menjadi Anggota DPR RI. Malah saya merupakan suara terbanyak, untuk di daerah pemilihan Jambi. Tentu hal ini menjadi sesuatu beban yang sangat berat terhadap saya karena masyarakat Jambi memberikan kepercayaan kepada saya,” kata Sutan.

Sutan mengaku, dalam menjalankan kampanyenya, ia bersama tim tidak melakukan hal-hal yang dikatakan tidak baik. Ia mengedepankan kemampuan yang dimilikinya, tidak dengan membayar suara kepada masyarakat. Ia berniat untuk memperjuangkan amanah dari masyarakat. Namun jika ia tidak mampu, ia akan berusaha membenarkan tatanan politik yang selama ini salah.

“Saya ingin mewarnai dari pada seluruh tatanan berbangsa dan bernegara ini dengan politik yang

baik sesuai dengan konstitusi, karena saya terus terang melihat bangsa kita kaya raya bangsa dan bangsa yang besar, bahkan wilayah bangsa kita adalah terbesar nomor 4 di dunia, tetapi sungguh-sungguh sangat naif dalam kondisi bangsa yang kaya raya ini, rakyatnya mati kelaparan,” kecewa Sutan.

Sutan mengibaratkan, situasi ini seperti ayam mati dilambung beras dan padi. Menurutnya, ada yang tidak beres dengan pengelolaan negara ini, sehingga ia mengingatkan, kalau bangsa ini ingin bermartabat dan rakyatnya sejahtera, maka harus kembali kepada UUD 1945.

“Kita tahu, bangsa kita ini adalah bangsa yang besar. Kita juga sudah punya

33 UUD 1945 ini diterapkan secara konsekuen dan konsisten, maka tidak akan mungkin lagi BUMN Indonesia dibajak, atau dijual, atau dimiliki bangsa asing.

“Mari kita selamatkan kembali Indonesia. Kalau tidak kita siapa lagi, kalau tidak sekarang, kapan lagi,” pesan Sutan.

### **Antara Pendidikan dan Masyarakat Kaya Dunia Akhirat**

Sutan memiliki pemikiran, akar dari masalah bangsa ini baik itu kemiskinan, kebodohan dan ketimpangan adalah pendidikan Tanah Air yang masih tertinggal. Pendidikan itu membuat masyarakat kaya dunia dan akhirat.



**Keluarga Sutan Adil Hendra**

foto: dokpr/iw

konsitusi luar biasa yang diberikan oleh para pendiri bangsa kita. Tapi sungguh sangat naif, niat baik ini dilukai itu oleh kepentingan-kepentingan elit politik. Yang mereka juga tahu sebenarnya itu salah. Oleh karenanya, saatnya kita kembali menata bangsa ini. Agar kita tidak terus menerus merasakan seperti dijajah,” tegas Sutan.

Ia khawatir, jika hal ini dibiarkan terus terjadi, kedepannya anak bangsa akan menjadi tamu di negaranya sendiri. Untuk itu, ia mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menyelamatkan aset dan bangsa ini kepada pasal 33 UUD 1945. Jika pasal

Namun sebaliknya, tanpa pendidikan masyarakat akan dekat dengan kebodohan, dan hal ini sangat dekat sama kemiskinan.

Hal ini diperkuat dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an yang secara nyata menyebutkan Allah akan meninggikan derajat orang beriman dan berilmu. Ayat ini sangat jelas sebagai motivasi kepada umat-NYA, untuk mencari ilmu, dan mengembangkan pendidikan agar menjadi manusia bermartabat dalam artian sejahtera hidupnya kaya dunia dan akhirat.

Dengan alasan itu, Sutan pun memilih berkiprah di Komisi X yang

membidangi pendidikan ketika terpilih menjadi Anggota DPR RI pada tahun 2014. Padahal, ketika itu fraksinya menyiapkannya untuk duduk di Komisi V yang dianggap sebagian kalangan paling “seksi” karena mengurus pembangunan fisik.

Tapi berkat kesadaran yang tinggi untuk membangun pendidikan bangsa, Sutan memperlihatkan keistiqomahannya dalam berjuang. Menurutnya, komisi pendidikan lebih dekat dengan nilai-nilai Islam untuk memerdekakan, membantu dan menyetarakan umat secara bermartabat.

“Tantangan pendidikan kita selain mutu yang perlu dikejar, juga peningkatan akses agar semua anak

pintu kebijakan agar mengarah pada revitalisasi pendidikan tahap II.

“Kondisi sekarang kita harus bergantung pada pembangunan pendidikan. Jika dulu kita sudah menyadari arti penting bagi kemajuan bangsa, maka di tahap kedua ini harus di bangun kesadaran pendidikan bagi kekayaan bangsa, kemakmuran masyarakat. Pendidikan di Eropa dan Amerika pun sudah mengarah kesana, kualitas pendidikan di ukur dari nilai nominal dari paten yang di hasilkan,” kata Sutan.

### Perlu Komunikasi Intensif

Menjadi politisi di Senayan, tentu memiliki jadwal yang sangatlah padat. Tentu, waktu bersama keluarga akan terkuras. Namun, Sutan bersama keluarga sudah mengantisipasi hal itu. Sutan memastikan, kuncinya adalah pada komitmen dan komunikasi.

“Keluarga sangat mendukung karir saya di politik, sehingga ini sangat membantu saya. Karena dukungan dari keluarga luar biasa, makanya saya juga memutuskan mau menerima Ketua DPD Partai Gerindra di Provinsi Jambi,” imbuh Sutan.

Dukungan penuh juga datang dari sang istri, Efi Herawati. Berawal dari pertemuan di Kota Jambi, perempuan yang dinikahinya pada tahun 1996 itu, selalu mendukung langkah Sutan. Hal itu pula yang mendorong Sutan untuk menempatkan keluarga pada skala prioritas. Belajar dari Rasulullah SAW dalam memimpin keluarga, Sutan mengedepankan komunikasi dalam keluarga.

“Ajaran Nabi Muhammad SAW itu adalah acuan saya dalam mengambil sesuatu keputusan. Jadi pedoman saya, baik dalam menata manajemen, baik menata keluarga, menata anak, maupun semua pedoman saya adalah apa yang digariskan oleh Rasulullah. Jika kita masih hidup di dunia, tentu kita harus berbuat banyak untuk umat. Karena Allah SWT mengatakan, belum dinyatakan seseorang itu beriman sebelum ia menyayangi saudaranya seperti menyayangi dirinya sendiri,” kata Sutan, mengakhiri wawancara. ■ (S)



Kita tahu, bangsa kita ini adalah bangsa yang besar. Kita juga sudah punya konsitusi luar biasa yang diberikan oleh para pendiri bangsa kita. Tapi sungguh sangat naif, niat baik ini dilukai itu oleh kepentingan-kepentingan elit politik.

bangsa bisa memperoleh pendidikan dengan baik, karena jika pendidikan bisa diperoleh masyarakat secara berkeadilan secara langsung mereka punya daya saing untuk memperbaiki kehidupan,” jelas Sutan.

Namun tak dipungkiri, akhir-akhir ini ia merasa risau dengan kondisi pendidikan Indonesia. Menurutnya, dengan tuntutan pendidikan yang semakin besar, namun tak diimbangi dengan anggaran yang memadai, justru malah semakin berkurang. Untuk itu, ia mengaku sedang menggalang dukungan dari masyarakat untuk mendesain satu

## BIODATA

### Ir. H.A.R Sutan Adil Hendra, MM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI  
Fraksi Partai Gerindra

#### Tempat, Tanggal Lahir:

Tapanuli Selatan, 2 Agustus 1968

#### Pendidikan:

1. S1 Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan.  
Lulus tahun 1992
2. S2 Universitas Jambi, Jambi.  
Lulus tahun 2007

#### Keluarga:

Istri : Ir. H. Efi Herawati, MM  
Anak : M. Herpian Nugrahadil,  
M. Qowi Fikri Hadil,  
Hulwa Atika Adillita

#### Pengalaman Pekerjaan:

1. Penasehat / Staff Khusus  
Walikota Jambi
2. Ketua DPD Partai Gerindra  
Provinsi Jambi
3. Ketua Himpunan Kerukunan Tani  
Indonesia (HKTI) Provinsi Jambi
4. Ketua I Palang Merah Indonesia  
(PMI) Provinsi Jambi
5. Ketua Masyarakat Agribisnis &  
Agro Industri Indonesia (MAI)  
Provinsi Jambi

#### Pengalaman Organisasi:

1. Ketua Penasehat Ikatan Sarjana  
Nahdatul Ulama (ISNU)  
Provinsi Jambi
2. Ketua Penasehat Pengurus Besar  
Al Jamiatul Washliyah Indonesia  
Provinsi Jambi
3. Ketua Kewirausahaan & Ekonomi  
Ummat, Ikatan Cendekiawan  
Muslim Indonesia (ICMI)  
Provinsi Jambi
4. Ketua Komisi Pembinaan Dana  
Ummat, Majelis Ulama Indonesia  
(MUI) Provinsi Jambi
5. Ketua Dewan Penasehat Ikatan  
Keluarga Mandailing (Madina)  
Provinsi Jambi

# Mewujudkan DPR yang Mandiri dan Independen



foto : Husen/iw

Wakil Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso berbicara didampingi Asisten Sekda Provinsi Jawa Timur saat kunjungan kerja.

**K**arakteristik legislatif sangat berbeda dengan eksekutif. Perlakuan anggaran dan kepegawaian pun berbeda. Desakan untuk memisahkan anggaran dan sistem kepegawaian parlemen mengemuka. Inilah yang coba dikampanyekan oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI kepada publik. Butuh anggaran dan kepegawaian yang independen.

Para akademisi dan pejabat Pemda di dua kota, Yogyakarta dan Surabaya, menyimak dengan serius sosialisasi rencana strategis (Renstra) DPR RI yang disampaikan delegasi BURT. Capaian dan rencana ke depan sudah dirumuskan dalam Renstra 2017. Dan BURT menjadi dapur perumus Renstra DPR RI selama ini.

Yang menarik dari setiap kali sosialisasi Renstra adalah perlunya memisahkan anggaran dan sistem kepegawaian parlemen dari tangan

pemerintah. Dalam setiap Renstra selalu muncul wacana lama, yaitu independensi anggaran dan kepegawaian DPR RI. Ini harus dipahami semua pihak termasuk para akademisi.

“Anggaran parlemen di banyak negara terpisah dari anggaran eksekutif. Kami harus punya anggaran sendiri dan kami kelola sendiri. Tapi, tetap ada laporan yang transparan. Nanti kami buat bagaimana sistemnya, karena kami lembaga yang unik dan berbeda dengan eksekutif,” jelas Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso di Surabaya, Jatim, awal Oktober lalu. Adalah ironis, ketika DPR RI mengawasi kinerja keuangan pemerintah, tapi anggaran lembaganya sendiri diatur pemerintah.

Independensi DPR RI juga harus diterapkan pada sistem kepegawaian. Pegawai parlemen tidak boleh disamakan dengan pegawai pemerintah.



**Anggaran parlemen di banyak negara terpisah dari anggaran eksekutif. Kami harus punya anggaran sendiri dan kami kelola sendiri. Tapi, tetap ada laporan yang transparan. Nanti kami buat bagaimana sistemnya, karena kami lembaga yang unik dan berbeda dengan eksekutif.**



“Di beberapa negara, pegawai parlemen itu terpisah dari pegawai eksekutif. Kami ingin betul-betul mandiri. Yang dinamakan kemandirian anggaran dan kepegawaian itu sekarang tidak ada. Hanya ada kemandirian perencanaan. Penggunaan dan pelaporannya kami masih disetir oleh eksekutif,” ungkap Agung lebih lanjut.



foto : Husen/iw

Wakil Ketua BURT DPR RI **Novita Wijayanti**

Di waktu dan tempat yang sama, Wakil Ketua BURT lainnya, Novita Wijayanti juga menyampaikan, sudah sejak lama DPR RI menyuarakan independensi anggaran dan kepegawaian. Ini masih jadi PR besar DPR RI dan pemerintah. Setiap kali menyusun anggarannya sendiri, DPR RI harus berkonsultasi dengan pemerintah.

“Kita harus jadi lembaga tersendiri, lepas dari intervensi pemerintah. Tetapi, selama ini anggaran kita selalu dikonsultasikan dahulu dengan Kementerian Keuangan. Ini masalah yang masih terus dibahas. Justru kita ingin meminta masukan juga dari masyarakat, agar lembaga DPR RI bisa lebih baik,” ungkap Anggota F-Gerindra ini.

Sebelumnya, di Yogyakarta, BURT juga melakukan sosialisasi yang sama kepada para akademisi dan pejabat Pemprov setempat. Sorot negatif



**Konsep berita yang mengedepankan isu negatif sebagai bahan berita yang punya nilai jual, diakui Agung, telah membentuk opini masyarakat penuh dengan sinisme terhadap DPR RI.**



publik terhadap parlemen kerap mewarnai media massa nasional. Menurut Agung, media sudah bersikap tak adil terhadap parlemen. Mayoritas para wakil rakyat di DPR RI sudah bekerja maksimal untuk rakyat. Ironisnya, hanya Karena ulah satu anggota, media langsung menyorot negatif semua wakil rakyat.

Hanya media internal DPR RI yang bersikap adil dan seimbang. Seperti diketahui, DPR RI punya media internal sendiri, yaitu media

cetak berupa majalah dan buletin Parlementaria plus website resmi DPR RI. Bahkan, kini ada sosial media sendiri berupa twitter, facebook, dan instagram. Sementara untuk media elektroniknya ada TV dan Radio Parlemen. Inilah yang selalu setia meliput semua kegiatan para anggota DPR RI, baik di Senayan maupun di daerah.

Agung mencontohkan, parlemen di Amerika punya saluran televisi khusus yang menyiarkan seluruh kegiatan parlemen selama 24 jam. “Siaran televisi ini penting untuk menjawab sinisme publik selama ini, akibat dari pemberitaan media yang mengedepankan prinsip *bad news is good news*,” jelas Agung.

Konsep berita yang mengedepankan isu negatif sebagai bahan berita yang punya nilai jual, diakui Agung, telah membentuk opini masyarakat penuh dengan sinisme terhadap DPR RI. “Kami awalnya ingin mendorong TV Parlemen sebagai lembaga penyiaran publik. Namun, karena terbentur undang-undang, akhirnya kami coba menjajaki kerja sama dengan TVRI yang memiliki stasiun perwakilan di daerah-daerah agar menyiarkan berbagai kegiatan dewan,” ungkap politisi Dapil Jabar I ini. ■

(mh/oji)



foto : Naefurodji/iw

Delegasi BURT DPR RI bersama Gubernur DI Yogyakarta.

# Komisi III Soroti Kasus Dimas Kanjeng Dan Kejahatan Narkoba

**K**omisi III DPR RI menghormati masyarakat Indonesia yang berada di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Mereka datang ke padepokan dari bermacam-macam agama, seperti Islam, Budha, Hindu, Khonghucu, Kristen, bahkan Katholik.

“Tempat ini diciptakan sedemikian rupa sehingga menjadi tempat yang kondusif bagi para santri untuk lebih mendekatkan diri dengan Yang Maha Pencipta. Itu sisi positifnya,” ungkap Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman kepada Parle usai pertemuan tim kunjungan spesifik Komisi III DPR RI dengan Ketua Yayasan Dimas Kanjeng, Marwah Daud Ibrahim di Masjid Padepokan, Probolinggo, Jawa Timur, baru-baru ini.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengatakan, ada cerita bahwa Dimas Kanjeng memiliki kemampuan metafisika, yakni kemampuan untuk menggandakan uang. Walaupun belum diketahui, apakah uang yang digandakan Dimas Kanjeng ini asli atau palsu. “Komisi III DPR RI meminta aparat melakukan penanganan hukum sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku tanpa menghilangkan hak para santri untuk tetap melakukan meditasi dan mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa di sini,” ungkapnya.

Saat ditanya, apakah ada rencana paksa pemulangan para santri yang ada di padepokan, Benny menjawab tidak ada rencana itu, karena itu menyangkut hak setiap individu. Karena ini padepokan, jadi setiap orang punya hak di sini. Tapi kalau ada kriminalitas di padepokan, tentu pihaknya akan minta aparat penegak hukum untuk menindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

“Saya tegaskan sekali lagi, apabila ada kriminalisasi, ada penipuan, dan ada masalah yang melanggar hukum di

sini, tentu itu menjadi urusan penegak hukum,” pungkas politisi asal Dapil NTT itu. Sementara Ketua Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng, Marwah Daud Ibrahim mengatakan, kegiatan di padepokan ini beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, seperti umat Kristiani mengadakan ibadah sendiri, begitu juga yang Hindu. Sedangkan bagi umat Islam, mereka istigosah atau berdoa bersama.

apakah Dimas Kanjeng bisa mengadakan uang atau tidak.

## Pemberantasan Narkoba Harus Diperkuat

Tim Kunjungan Kerja Komisi III lainnya menyorot soal tingginya kejahatan narkoba di Provinsi Bali. Kebetulan Komisi III telah membentuk Panja Pengawasan Penegakan Hukum Sindikat Narkoba, awal September lalu.



Tim Kunjungan Spesifik Komisi III DPR RI dipimpin Benny K Harman saat mengunjungi Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Probolinggo, Jawa Timur.

foto : Iwan Armanias/iw

“Jadi, yang diingatkan kepada santri adalah mereka harus mengikuti konstitusi dan mengikuti perintah agama masing-masing,” kata Marwah Daud. Jadi menurut Marwah, tidak ada penggandaan uang. Tapi, pengadaan uang atau mengadakan uang, yaitu dari tidak ada menjadi ada. “Silakan nanti tim Komisi III DPR RI bertemu dengan Dimas Kanjeng Taat Pribadi untuk membuktikannya di Mapolda Jatim. Saya dan para santri setuju,” tutupnya.

Tim Komisi III pun berkunjung ke Mapolda Jatim untuk membuktikan

Sebagaimana dirilis berbagai media, Direktur Reserse Narkoba Polda Bali, Komisaris Besar Franky Haryanto Parapat telah dicopot sesuai rekomendasi Propam karena diduga melakukan pemerasan terhadap sejumlah orang yang terlibat tujuh kasus narkoba di bawah 0,5 gram. Franky juga dilaporkan atas dugaan keterlibatannya dalam pemotongan anggaran DIPA 2016 dengan barang bukti uang tunai Rp 50 juta di brankas.

“Apakah aparat kepolisian sudah on

the track dalam hal pencegahan dan penindakan kasus narkoba di Bali, dari pihak Kejaksaan kenapa para terpidana narkoba seolah tidak jera, sudahkah hukuman penjahat narkoba memenuhi rasa keadilan masyarakat,” ungkap Bamsuet menjawab pertanyaan media perihal maksud dan tujuan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI kali ini.

Lebih lanjut Komisi III DPR RI juga ingin mendalami perihal dugaan keterlibatan petinggi aparat kepolisian yang membekup praktek jual-beli narkoba di Bali. Berdasarkan data BNN Provinsi Bali terbaru, terdapat 61.362 pengguna narkoba yang cukup mengkhawatirkan jika tidak

sebagai *extraordinary crime*.

Selain kasus tersebut, lanjut Bamsuet, Panja juga menginvestigasi kasus teranyar yang mengungkap keterlibatan aparat TNI dan Polda Bali berdasarkan pengembangan tertangkapnya dua orang warga negara asing asal Australia dan Inggris. “Penangkapan yang dilakukan aparat penegak hukum selama ini hanya pengedar kecil-kecil. Kita meyakini masih ada bandar besar, produsen besar, atau pengedar besar yang belum disentuh penegak hukum di Bali,” jelasnya.

Kita tidak ingin di Bali ini muncul pabrik ekstasi, pabrik sabu, dan sejenisnya. Kita ingin aparat bekerja lebih baik lagi, mulai dari

melanggar pasal 112 yaitu memiliki 1-70 gr narkoba. Yang terjerat Pasal 113 (menyimpan) 1-30 gr narkoba sebanyak 21%, Pasal 114 (mengedarkan) 1-50 gr narkoba 19% dan terjerat pasal 127 (penyalahgunaan) hanya 4%.

“Kendala yang dihadapi jaksa dalam menuntut kasus kejahatan narkoba karena kurang barang bukti, sehingga juga sulit mengungkap bandar. Sedangkan terkait pasal 117, jika tersangka adalah warga negara asing (WNA), maka jaksa penuntut umum (JPU) diharuskan menyiapkan juru bahasa (penerjemah), sementara anggarannya tidak ada (tidak masuk DIPA),” jelas Abdul Muni.

Muni melanjutkan, bahwa saat ini



Penangkapan yang dilakukan aparat penegak hukum selama ini hanya pengedar kecil-kecil. Kita meyakini masih ada bandar besar, produsen besar, atau pengedar besar yang belum disentuh penegak hukum di Bali



foto : Naefurodji/w

Tim Kunjungan Spesifik Komisi III DPR RI dipimpin Bambang Soesetyo saat pertemuan dengan Kapolda Bali, Kajati, Bea Cukai dan Kemenkumham.

dilakukan tindakan pencegahan secara serius dan melibatkan semua pihak.

Menanggapi hal tersebut, Kapolda Bali Sugeng Priyanto menegaskan bahwa Polri sangat konsen dalam pemberantasan narkoba karena masuk dalam kejahatan luar biasa. “Kita tidak segan langsung mencopot aparat yang terbukti bermain dalam kasus narkoba,” tegas Sugeng meyakinkan. Lulusan Akpol 1983 dan berpengalaman dalam bidang reserse ini secara tegas tak ada kompromi terhadap siapapun terkait kejahatan narkoba

pintu imigrasi, Lapas, dan tempat-tempat hiburan lainnya. Dampak narkoba itu melahirkan pergaulan bebas, kriminalitas, dan penyakit HIV AIDS. Kita ingin mengidentifikasi pemain-pemain besar di setiap daerah walaupun itu sifatnya dugaan atau belum dipastikan kebenarannya tapi itu penting bagi kami, terang politisi asal Dapil Jateng VII ini.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Abdul Muni dalam paparannya menjelaskan bahwa mayoritas kasus narkoba di Bali sebanyak 56% tersangka

di Bali ada 3 terdakwa hukuman mati terkait kasus narkoba, 2 warga negara Australia dan 1 warga Afrika. Namun, belum dilakukan eksekusi karena mereka masih melakukan upaya hukum.

“Upaya pencegahan, penyelundupan, dan peredaran narkoba dilakukan petugas imigrasi berkoordinasi dengan instansi terkait seperti BNN, Bea dan Cukai, dan Kepolisian melalui pertukaran informasi orang asing yang terindikasi sebagai penyelundup atau pengedar narkoba,” pungkas Ida Bagus. ■

(oji/iwn)

# Komisi IV Pantau Bendungan, Ketersediaan Pakan Ikan dan Pengolahan Pasca Panen Jagung



foto: Eka Hindra/iw

Tim Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau tanggul aliran Sungai Air Dingin Balai Gadang, Koto Tengah, Padang.

**B**endungan hingga ketersediaan pakan tak luput dari perhatian Komisi IV DPR RI yang merupakan unsur penting sebagai pendukung keberhasilan peningkatan sektor pangan.

Bendungan dibuat sebagai penyedia air untuk irigasi dan lahan pertanian serta pencegah banjir. Sedangkan ketersediaan pakan ikan merupakan pendukung untuk peningkatan hasil budidaya perikanan yang tidak bisa disepelekan.

Untuk itu, Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Spesifik ke Provinsi Sumatera Barat meninjau tanggul yang terletak di aliran Sungai Air Dingin Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, dan berkesempatan berdialog

dengan masyarakat dan unsur pemerintah daerah, terkait jebolnya tanggul bendungan tersebut yang menyebabkan banjir yang melanda Kota Padang.

Menurut Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto yang memimpin kunjungan spesifik ini, akibat jebolnya tanggul ini maka kawasan sekitar 84 ha lahan pertanian tidak teraliri irigasi. Pemerintah diminta melakukan berbagai langkah guna menyelamatkan daerah aliran sungai.

Mengingat anggarannya terlalu besar dan kemampuan Kota Padang terbatas, Komisi IV mendorong supaya pemerintah pusat untuk bisa memperbaiki tanggul tersebut, sekaligus juga memperbaiki irigasi sekunder dan tersiernya.

"Pemerintah melalui Kementerian

harus mengalokasikan anggaran mulai dari penelitian sampai pada upaya pemulihan kembali fungsi aliran sungai ini. Kalau hal ini terlambat dilakukan, maka akan merugikan lingkungan khususnya para petani yang semestinya bisa memanfaatkan air sungai ini sebagai sumber mata pencaharian," kata Hermanto, dari Fraksi PKS, Dapil Sumatera Barat.

Anggota Komisi IV DPR RI lainnya, dari Fraksi PDIP Ono Surono, meminta Dinas PU dan PSDA, segera mengatasi guna menyelamatkan sawah petani. "Bendungan jebol, ribuan hektar lahan pertanian masyarakat kekeringan. Untuk mengatasinya, sesegera mungkin Dinas PU atau PSDA menurunkan alat berat, untuk menanggulangi sementara demi menyelamatkan pertanian warga," ujarnya.

## Ketersediaan Pakan Ikan

Selain itu, terkait ingin memastikan ketersediaan pakan ikan dan udang Tim Komisi IV DPR RI mengunjungi PT. Matahari Sakti yang memproduksi pakan ikan dan udang di Surabaya. Anggota Komisi IV Guntur Sasono yang memimpin Kunjungan Spesifik ini mengatakan apabila pakan harus selalu dapat tersedia dalam jumlah dan kualitas yang mencukupi serta harganya ekonomis, maka peluang pengembangan budidaya perikanan menjadi semakin terbuka.

"Industri pakan diharapkan dapat mensupport ketersediaan pakan ikan dan perkembangan serta pertumbuhan sektor budidaya ikan yang ada di Indonesia," kata Guntur Sasono, saat memimpin Tim Kunjungan Spesifik Komisi IV di Surabaya, Rabu (12/10).



foto : Agung/iw

Tim Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR RI mengunjungi PT. Matahari Sakti yang memproduksi pakan ikan dan udang di Surabaya.

Menurut Politisi Demokrat ini, perkembangan budidaya perikanan secara langsung membutuhkan pasokan berbagai sarana produksi dalam jumlah dan mutu yang memadai, seperti benih ikan, peralatan dan mesin, obat-obatan dan yang paling penting adalah pakan dengan jumlah yang cukup dan harga ekonomis.

Pakan merupakan komponen yang memberikan kontribusi cukup besar (50-70%) dari total biaya produksi budidaya ikan. Prosentase kontribusi pakan tersebut berkaitan erat dengan intensitas pembudidayaan ikan yang semakin intensif sehingga konsumsi pakan pun semakin tinggi. Peran strategis pakan terhadap biaya produksi tersebut menjadikan pakan sebagai faktor penghambat atau pembatas dalam budidaya perikanan harus segera ada solusi.

"Berbagai jenis sarana produksi yang dibutuhkan, pakan ikan merupakan komponen yang sangat penting dalam mendukung efisiensi dari biaya produksi," jelasnya.

Presiden Direktur PT. Matahari Sakti, mengharapkan dengan kunjungan Komisi IV ini dapat memberikan solusi kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi industri perikanan. Seperti halnya bahan baku yang selama ini sebagian masih impor dengan pengenaan PPN sehingga

mengakibatkan harga pakan naik.

"Harapan kami dengan adanya kebijakan untuk mereview ulang agar bahan baku impor dapat turun, sehingga harga pakan di daerah dapat terjangkau oleh pembudidaya," katanya

### Pasca Panen Jagung Tidak Digarap Petani

Sementara itu pada Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR RI di Gorontalo, Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron menyayangkan produksi pasca panen tidak digarap oleh petani, tetapi

diserahkan kepada perusahaan lain. Padahal, proses-proses meningkatkan kesejahteraan petani sesungguhnya ada pada pasca panen.

"Kita harus mendorong keberadaan koperasi petani jagung, sehingga pasca panen tidak hanya dikuasai oleh korporasi, tapi ada koperasi yang mampu memproses hingga siap dikirim ke pabrik pakan menjadi *benefit* tambahan bagi petani," jelas Herman.

Hal ini disampaikan saat memimpin kunjungan spesifik meninjau budidaya jagung Gorontalo pasca panen di gudang PT Harim Gorontalo yang terletak di Desa Isimu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Selasa (25/10).

Menurutnya, jagung yang menjadi salah satu program prioritas Kementerian Pertanian memang telah menjadi budidaya yang produktif di Gorontalo, dengan peningkatan yang sangat signifikan di tiap tahunnya. Hanya saja bagaimana penanganan setelah panen yang masih harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

Kunjungan dilanjutkan ke Persemaian Permanen di desa Toyidito, Pulubala Kabupaten Gorontalo, melihat para penyemai mempersiapkan bibit dan penanaman bibit Aren oleh petani setempat. ■

(as, ray)



foto : Rizka/iw

Tim Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau gudang jagung bahan pakan ternak.

# Pemerintah Perlu Prioritaskan Pembangunan Perbatasan

Pembangunan Indonesia dari perbatasan sangatlah penting, karena daerah perbatasan merupakan garda terdepan Indonesia dengan negara sahabat. Hal ini sesuai dengan misi Presiden Jokowi untuk membangun pembangunan Indonesia dari luar (perbatasan). Hal ini sebagai upaya untuk pemberdayaan dan meningkatkan perekonomian dan taraf kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Komisi V DPR RI, sebagai Alat Kelengkapan Dewan yang membidangi infrastruktur pun mendorong Pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan di daerah perbatasan. Wujud nyata Komisi V DPR RI dalam hal ini adalah melakukan pengawasan ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, yang dipimpin oleh Ketua Komisi V Fary Djemi Francis, baru-baru ini.

Selain ke Kalimantan Utara, Komisi V DPR RI juga mengirimkan timnya ke Minahasa Utara, Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V Lasarus, dan ke Surabaya, Jawa Timur yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V Michael Wattimena.

“Masih banyak daerah perbatasan Indonesia yang terisolir akibat sulitnya akses antar daerah karena terbatasnya infrastruktur transportasi yang ada. Pembangunan infrastruktur transportasi di daerah perbatasan sangat penting, terutama untuk menghubungkan antar daerah satu dengan daerah lainnya,” ungkap Fary.

Politisi F-Gerindra itu menjelaskan, Kabupaten Nunukan merupakan salah satu Kabupaten di Kalimantan Utara yang langsung berbatasan dengan Malaysia, tentu ini menjadi sangat penting dimana Nunukan menjadi



Tim Komisi V DPR RI meninjau Pelabuhan di Nunukan, Kalimantan Utara.

foto : Singgih/w

garda terdepan Indonesia.

“Kita meminta agar Pemerintah memprioritaskan percepatan pembangunan di daerah tersebut terutama infrastruktur transportasi yang menghubungkan antar daerah di Kabupaten Nunukan, seperti Sebatik, Krayan, dan Lumbis Ogong yang saat ini kondisinya masih jauh dari ideal sebagai teras negara,” jelas Fary.

Fary pun berjanji akan meminta pemerintah merealisasikan berbagai pembangunan titik-titik vital di Nunukan ini, diantaranya perluasan Bandara Nunukan agar terkoneksi dengan Bandara Sepinggian Balikpapan, perbaikan sarana dan administrasi di Pelabuhan Tunontaka.

“Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan yang merupakan garda terdepan bangsa Indonesia akan terus kita perjuangkan,” komitmen politisi asal dapil NTT itu.

## Percepatan Pembangunan Infrastruktur Minut

Di Sulawesi Utara, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan, pihaknya serius membantu pembangunan infrastruktur di daerah ini. Hal itu bisa terlihat dari beberapa proyek infrastruktur yang tengah dibangun diantaranya, jalan tol Manado-Bitung, Bendungan Kuwil Kawangkoan, jalan strategis Matungkas- Pinili dan Jalan Kereta Api di Sulut sebagai bagian dari KA Lintas Sulawesi.

Perkembangan Manado yang semakin pesat, hingga menyebabkan banyaknya kemacetan pun harus diimbangi dengan pembangunan yang memadai. Menurutnya, saat ini sedang dibangun tiga *ringroad*, *ringroad* I dan II sudah selesai dan *ringroad* III dalam proses pembangunan.

“*Interchange* ini dimaksudkan untuk memecah jalur Bitung-Manado maupun yang menuju Lintas Sulawesi.



foto : Mastur/iw

Tim Komisi V DPR RI meninjau proyek Interchange di Minahasa Utara, Sulut.

Perkembangan Manado yang semakin pesat, hingga menyebabkan banyaknya kemacetan pun harus diimbangi dengan pembangunan yang memadai.

Kita lihat sendiri betapa macetnya jalur Bitung menuju Manado ini. Perkembangan yang luar biasa ini harus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai.” kata politisi PDI Perjuangan itu

Terkait pembangunan jalur KA, menurut politisi asal dapil Kalimantan Barat itu, hal ini sebagai salah satu program yang dicanangkan Kementerian Perhubungan untuk wilayah Sulawesi dan akan menjadi rangkaian KA Lintas Sulawesi yang sudah dimulai peletakan batu pertama di Sulawesi Selatan.

### Optimis Tanjung Perak Bisa Kurangi Dwelling Time

Komisi V berharap Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dapat mengurangi *dwelling time*, yang selama ini menjadi keluhan kesah dari Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Presiden menyoroti secara tajam permasalahan *dwelling time* di beberapa pelabuhan besar di Tanah Air.

“Kami mendapat penjelasan, sebelumnya *dwelling time* sekitar lima hari lebih, tapi kini sudah menurun menjadi 4,9 hari. Mudah-mudahan ke depan ini bisa jadi cukup 3 hari. Sama dengan apa yang dilakukan di Tanjung Priuk dan

pelabuhan lainnya. Pelabuhan ini menjadi sorotan karena pelabuhan ini bongkar muat untuk ekspor dan impor,” jelas Wakil Ketua Komisi V DPR RI Michael Wattimena.

Michael menilai, perkembangan terkait dengan *dwelling time* di Tanjung Perak ini, baik dari sisi Kementerian Perhubungan maupun Pelindo III sudah sesuai dengan keinginan Pemerintah. Namun di satu sisi Michael mencatat, perlu koordinasi dari 18 kementerian yang terlibat dalam *dwelling time*. Apalagi dengan adanya 118 peraturan yang melingkupi hal ini, semakin membutuhkan koordinasi yang baik.

“Bagaimana bisa mengintegrasikan

satu kementerian dengan kementerian yang lain, dua saja sudah sulit apalagi jika ada 18 kementerian,” kritik politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

Michael juga menekankan, jika bongkar muat bisa dikurangi rasanya juga menguntungkan terhadap konsumen sebagai pemakai barang-barang. Karena tidak dibebankan biaya lamanya kontainer di pelabuhan.

“Jika kita bisa mengurangi *dwelling time* ini, obsesi kita untuk berkompetisi di Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) itu menjadi hal yang baik bagi sebuah perkembangan perekonomian sebuah negara,” harap politisi asal dapil Papua Barat itu. ■

(skr/mp/stf)



foto : Sofyan/iw

Suasana Pertemuan Tim Komisi V DPR RI dengan Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

# Tumbuhkan Koperasi Demi Ketahanan Ekonomi Bangsa

**D**engan banyaknya Koperasi di Indonesia yang mengalami mati suri, hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah masih belum berpihak pada nasib perkoperasian Indonesia. Keberadaan Koperasi dibutuhkan untuk peningkatan ketahanan ekonomi negara kita. Lalu bagaimana bangsa Indonesia bisa bersaing dalam masyarakat ekonomi asean (MEA), bila koperasi dan perekonomian negeri ini masih lemah.

“Kita hanya akan mejadi pasar bagi mereka. Koperasi harus ditumbuhkan kembali, supaya ekonomi kita kuat,” tegas Anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso saat Kunjungan Spesifik ke Provinsi Sulawesi Tenggara, baru-baru ini.

Komisi VI mengirim 4 Tim Kunjungan Spesifik untuk memantau perkembangan koperasi dan UMKM selain ke Sulawesi Tenggara juga ke Maluku, Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat. Lebih lanjut politisi FPG ini menyatakan, bahwa dirinya akan meminta kepada Menteri Koperasi supaya dilakukan perubahan terhadap anggaran koperasi. Dengan anggaran yang kecil pada saat ini, maka akan berdampak terjadinya ketidakmampuan dalam menjangkau 34 provinsi yang ada di Indonesia.

“Anggaran koperasi harus dirubah, kita akan minta kepada pemerintah pusat. Bila memang pemerintah berpihak pada ekonomi kerakyatan maka Koperasi harus diperkuat,” tandasnya.

Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI DPR RI ke Nusa Tenggara Barat menyoroti masalah bagaimana Usaha Kecil dan Menengah



Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI DPR RI meninjau UKM Piala di Sultra.

foto : Devi/iw

dapat menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Semenjak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), para pengusaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) harus terus didorong agar bisa berdaya saing yang tinggi dan dapat memenuhi standar-standar tertentu (SNI).

“Bagaimana peran pemerintah ini melakukan terobosan untuk menembus pasar-pasar baru sehingga produksi lokal ini yang mempunyai nilai seni luar biasa masuk ke pasar yang lebih luas,” ungkap Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Farid Al-Fauzi (Partai Hanura).

Menurut politisi Partai Hanura, selama ini kendala pelaku usaha dalam melakukan ekspor melalui daerah lain terletak pada kepercayaan *buyer* yang rendah pada daerah Nusa Tenggara Barat. Hal ini membuat pelaku usaha Nusa Tenggara Barat jarang melakukan *direct selling* untuk ekspor atas nama Nusa Tenggara Barat.

Persoalan tersebut, lanjutnya, karena Nusa Tenggara Barat tidak

terkenal seperti Bali yang mudah mendapat perhatian dan kepercayaan dari pihak asing. Namun seiring dengan berkembangnya pariwisata Nusa Tenggara Barat tentu pihak asing secara tidak langsung akan mulai membuka peluang untuk bisnis kreatif Nusa Tenggara Barat.

“Ini yang akan kita *design* bersama nanti dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan di Komisi VI DPR RI, agar Industri Kecil Menengah juga memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni dan memiliki kelengkapan administrasi sebagai pelaku usaha untuk meminimalisir kendala-kendala dikemudian hari,” jelasnya.

## Dukung Anggaran Koperasi dan Industri Kecil

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan perkembangan sektor koperasi, industri menengah dan kecil sebagai penggerak perekonomian Indonesia.



foto: Iwan Armanias/iw

Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI DPR RI meninjau IKM Produk Perhiasan Ragenda Mop di Mataram, NTB.

“Komisi VI mendorong kepada Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar kepada mitra kerja yang membidangi BUMN, UMKM, Koperasi, Industri dan Perdagangan, sebagai penggerak perekonomian Indonesia,” kata Hekal, saat memimpin Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI meninjau Koperasi Borneo Agrosindo, di Desa Martadah, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurut Politisi Partai Gerindra ini, anggaran mitra kerja Komisi VI itu tergolong kecil, maka sudah terlihat bahwa politik anggaran Pemerintah tidak Pro kemandirian rakyat. Jika anggaran sektor Koperasi, Industri Menengah dan Kecil difokuskan anggarannya, akan terlihat perhatiannya.

“Sekarang kita lihat anggaran koperasi dan Industri Kecil dan Menengah dipotong dan adanya isu pemberhentian kemitraan dari BUMN maka keberpihakannya hanya *lip service*. Kita harap pemerintah melaksanakan program lebih efisien dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” Tegasnya. Di Provinsi Maluku tim Kunjungan Spesifik komisi VI DPR RI menyoroti masalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

### Dorong Perkembangan UMKM di Maluku

Komisi VI DPR RI mendorong PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan BUMN Perbankan di Provinsi Maluku untuk melakukan pengembangan di sektor ekonomi kreatif dalam hal ini Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga koperasi.

Anggota Komisi VI DPR RI, Andriyanto Johan Syah memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap kinerja PT Permodalan Nasional Madani dalam mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan

ekonomi kerakyatan, Tim Komisi VI tersebut juga melakukan dialog dengan beberapa pengusaha mikro, kecil dan menengah binaan PT Permodalan Nasional Madani, di Ambon, Provinsi Maluku.

“Masih banyak masyarakat Indonesia yang kesejahteraannya belum merata. Hanya dengan penguatan sektor usaha mikro kecil dan menengah, maka pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat. PT Permodalan Nasional Madani telah berperan cukup optimal meningkatkan pertumbuhan UMKM di daerah ini,” ujar Andriyanto.

Kunjungan ini, lanjutnya sebagai bentuk dukungan DPR RI dalam mewujudkan pengembangan sektor ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM dan Koperasi. Selain dari segi pembiayaan PT Permodalan Nasional Madani juga membantu peningkatan manajemen usaha para pelaku UMKM di Provinsi Maluku melalui program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU).

“Program pengembangan ekonomi kerakyatan yang dilakukan PT Permodalan Nasional Madani harus terus ditingkatkan. Diharapkan ke depan PT Permodalan Nasional Madani melalui program PKU mampu menciptakan wirausaha baru yang memiliki kemampuan dan daya saing di pasar global,” pungkasnya. ■

(ryan/iw/as/andri)



foto: Andri/iw

Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI DPR RI meninjau UMKM binaan PT Permodalan Nasional Madani di Ambon, Provinsi Maluku.



foto : Suci/iw

Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR RI dipimpin Ketua M. Ali Taher foto bersama dengan pengurus KUBE NAKETI 3 Desa Kolhua, Kota Kupang.

## Komisi VIII Apresiasi NTT Entaskan Kemiskinan Melalui Koperasi

**K**omisi VIII DPR RI yang membidangi agama dan sosial melakukan Kunjungan Spesifik pada Masa Persidangan ke I Tahun Sidang 2016-2017, tanggal 30 September- 2 Oktober 2016 dengan menurunkan tiga Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) ke tiga daerah. Tiga Tim Kunjungan Spesifik mengunjungi tiga wilayah, yakni, NTT, Lampung dan Solo. Dengan fokus pada permasalahan kampus IAIN dan mengawasi program pemerintah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Komisi VIII DPR RI mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) mengembangkan koperasi guna mengentaskan masalah kemiskinan.

"Kami apresiasi apa yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi NTT, mengambil pokok utama dari kultur di sini yaitu kultur kebersamaan dan

gotong royong," kata Anggota Komisi VIII Ledia Hanifa saat pertemuan Tim Komisi VIII dipimpin Ketua Komisi VIII M. Ali Taher dengan Gubernur NTT Frans Lebu Raya di Kantor Gubernur di Kupang, NTT, baru-baru ini.

Ia melihat angka kemiskinan di NTT prosentasenya antara 9 persen bahkan sampai 32 persen. Menurutnya ini suatu masalah yang berat dan harus diatasi oleh Pemprov NTT.

Koperasi ini, lanjut Ledia, lumayan cukup berkembang di NTT, ada sekitar 3.000 koperasi dan yang berjalan dengan baik ada sekitar 2.050. "Ini potensi besar, dimana dua per tiga koperasinya bisa berjalan, kemudian usahanya 2,5 triliun dan SHU nya 211 miliar," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ledia mengusulkan adanya pendampingan kepada jajaran Kementerian Sosial yang turut serta dalam kunjungan tersebut. "Jangan membiarkan mereka bergerak sendiri," harapnya.

Karena menurut Ledia, Program

Keluarga Harapan (PKH) nanti yang akan diarahkan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan PKH, arahnya perlu dikumpulkan jadi sebuah koperasi KUBE sehingga mereka akan bergerak bersama.



Ada sekitar 3.000 koperasi dan yang berjalan dengan baik ada sekitar 2.050. "Ini potensi besar, dimana dua per tiga koperasinya bisa berjalan, kemudian usahanya 2,5 triliun dan SHU nya 211 miliar.





Anggota Komisi VIII DPR RI  
Endang Maria Astuti

foto: Jaka/iw

## Transformasi STAIN Jurai Siwo ke IAIN

Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Fauzan Harun, mengatakan, tujuan dari Kunjungan Spesifik ini untuk melihat secara langsung kondisi riil di daerah dan menyerap aspirasi. "Kami datang kemari karena ingin mengetahui informasi secara faktual di STAIN Jurai Siwo ini," jelas dia.

Keinginan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Kota Metro bertransformasi menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ditanggapi baik Komisi VIII DPR RI. Ini diungkapkan pada Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR RI ke STAIN Jurai Siwo belum lama ini.

Terkait usulan STAIN naik status menjadi IAIN, pihaknya mengaku setuju dan siap mendukungnya. Termasuk dari segi anggaran bagi peningkatan sarana dan prasarana.

"Tahun depan kami sudah merencanakan untuk memberikan anggaran sebesar Rp 24,3 miliar kepada STAIN Jurai Siwo untuk perluasan dan pembangunan fasilitas gedung. Kita dukung peningkatan status ini, dengan catatan STAIN Jurai Siwo dapat menyiapkan segala hal terkait persyaratannya," ujarnya.



Kalau mau dijadikan UIN, inti dari keilmuan agama jangan malah menjadi pudar, justru itu adalah ruh dari perguruan tinggi islam. Para alumni lulusannya diharapkan menjadi pelopor revolusi mental.



Namun Komisi VIII meminta komitmen pemerintah daerah untuk ikut mendukung majunya lembaga pendidikan agama Islam negeri. Seperti dengan memberikan bantuan lahan kepada Kementerian Agama untuk mendirikan MAN IC. ■

(sc/jk/eno)

## Tak Menggerus Nilai Keislaman

Anggota Komisi VIII Endang Maria Astuti tak mempermasalahkan keinginan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta untuk mengubah status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Namun yang terjadi selama ini, tergerusnya esensi keilmuan agama saat IAIN menjadi UIN. Hal inilah yang sering menjadi perdebatan kami.

"Kalau mau dijadikan UIN, inti dari keilmuan agama jangan malah menjadi pudar, justru itu adalah ruh dari perguruan tinggi islam. Para alumni lulusannya diharapkan menjadi pelopor revolusi mental," kata Anggota Komisi VIII Endang Maria Astuti saat memimpin Tim Kunjungan Spesifik di IAIN Surakarta.

Ditambahkannya, dengan kondisi IAIN Surakarta yang memiliki jumlah tenaga pengajar dosen terbatas dan adanya moratorium PNS, serta sarana dan prasarana yang minim, hal ini menjadi buah simalakama jika adanya gagasan perubahan status IAIN Surakarta.

"Disatu sisi menginginkan adanya perubahan status, namun banyak spek yang belum bisa terpenuhi. Jangankan penambahan dosen, guru saja sampai saat ini Kementerian Agama masih banyak tanggungan. Saya menyarankan agar manajemen dari IAIN ditata dulu kualitasnya" ujar Politisi F-Golkar itu.



foto: Kresno/iw

Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR RI pertemuan dengan jajaran STAIN Jurai Siwo di Metro, Lampung.

# Tenaga dan Infrastruktur Kesehatan Cegah Peredaran Obat dan Vaksin Ilegal

Pada pertengahan tahun 2016 ini tepatnya pada bulan Juni, publik dikejutkan oleh terbongkarnya kasus vaksin palsu. Dari hasil penyidikan Bareskrim POLRI, ditemukan adanya penawaran vaksin impor tertentu yang bukan vaksin program dengan harga yang lebih murah. Bareskrim menetapkan 14 rumah sakit dan 8 klinik atau bidan yang telah menerima distribusi vaksin palsu.

Selain itu Bareskrim juga telah menyerahkan 72 sampel untuk dilakukan pengujian oleh Badan POM. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 25 sampel palsu, terdiri dari 21 vaksin palsu, 2 antisera palsu dan 2 tuberculin palsu. Jenis vaksin palsu adalah Tripacel, Pediacel, Engerix B (Adults), Engerix B (Paed), Euvax B (Paed), dan Havrix Junior.

Sedangkan BPOM telah melakukan penelusuran terhadap fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia dan menemukan 37 fasilitas kesehatan dari 9 provinsi, yang memperoleh vaksin bukan melalui sumber resmi. Dari hasil penelusuran tersebut ditemukan 60 sampel vaksin atau antisera, kemudian dilakukan pengujian dengan hasil terdapat 12 sampel vaksin atau antisera palsu, terdiri dari 5 vaksin palsu dan 7 antisera palsu.

Komisi IX DPR RI berpendapat bahwa terungkapnya peredaran vaksin palsu tersebut hanyalah masalah kecil dari masalah yang jauh lebih besar, yaitu peredaran obat dan vaksin. Atas dasar itulah Komisi IX DPR RI memutuskan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Peredaran Obat dan Vaksin pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016-2017.

Berdasarkan data-data tersebut di atas, Komisi IX DPR RI memutuskan untuk melakukan Kunjungan Kerja Panja ke Provinsi Sulawesi Barat dipimpin langsung Ketua Komisi IX Dede Yusuf Macan Effendi sedangkan



Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi beserta Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh saat Kunjungan Spesifik

foto : Eko/w

kunjungan ke Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena. Panja Pengawasan Peredaran Obat dan Vaksin Komisi IX DPR RI memandang perlu untuk mengetahui sejauh mana pengawasan terhadap obat dan vaksin di dua Provinsi tersebut.

## Tenaga dan Infrastruktur Kesehatan

Dalam kunjungan ke Sulawesi Barat tim memberikan perhatian pada dua masalah di Sulawesi Barat, kecukupan tenaga kesehatan dan infrastruktur rumah sakit di daerah ini. Menurutnya tenaga dan infrastruktur kesehatan di Sulawesi Barat harus ditingkatkan dengan bantuan pemerintah pusat.

“Yang menjadi perhatian kita kedepan SDM-nya harus kita siapkan, mungkin kalau perlu di-drop dari pusat,” ujar Dede sesaat setelah dialog dengan pemerintah setempat, di Mamuju Sulawesi Barat, baru-baru ini.

Provinsi Sulawesi Barat merupakan daerah pemekaran baru yang lokasinya dianggap terdepan dari wilayah NKRI. Karena itu lah, daerah yang dipimpin

oleh Gubernur Anwar Adnan Saleh ini dianggap masih membutuhkan bantuan perbaikan dalam berbagai macam segi, terutama di sektor layanan kesehatan yang menjadi sorotan Tim Kunjungan Spesifik Komisi IX DPR RI.

Selain tenaga medis, infrastruktur layanan kesehatan juga menjadi persoalan yang urgent untuk ditangani oleh pemerintah. “Rumah sakit, Kementerian Kesehatan bisa membantu untuk pembangunan rumah sakit daerah. Yang dibutuhkan selain bangunan tentu peralatan fasilitasnya. Tadi saya sudah sampaikan agar ini didorong melalui kementerian kesehatan untuk rumah sakit di daerah terluar. Kita katakan seperti ini, karna mungkin jauh dari pembangunannya,” papar Dede.

## Pembangunan dan Pengawasan Kesehatan

Tim Kunjungan Spesifik Komisi IX DPR RI ke Provinsi Sulawesi Barat juga memberikan perhatian soal pembangunan fasilitas kesehatan dan pengawasan peredaran obat di daerah pemekaran baru ini. Dede mengatakan

peredaran obat penting diawasi karena jika obat diselewengkan akibatnya fatal.

“Terkait kesehatan dan pengawasannya juga, selain membangun kita juga harus mengawasi. Kenapa kita perlu mengawasi, karena memang urusan obat-obatan dan kesehatan rentan dipalsukan, rentan juga diselewengkan,” ujar Dede saat dialog dengan pemerintah setempat.

Dalam dialog dengan Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh, mengungkapkan bahwa saat ini Provinsi Sulawesi Barat masih dalam area wilayah dari Balai Besar POM di Makassar. Selama ini tenaga yang melakukan kegiatan pengawasan dan pengujian masih berasal dari BPOM Makassar.

Padahal Sulawesi Barat merupakan wilayah yang terpisah dari Sulawesi Selatan dengan luas wilayah dan Medan yang sulit. Baru pada tahun 2017 akan dibangun BPOM Sulawesi Barat, yang sudah memiliki dana pembangunan lanjutan berupa gedung laboratorium, listrik, telepon, dan PDAM.

Untuk mewujudkan BPOM Sulawesi Barat, dibutuhkan dukungan tenaga SDM sebanyak 25 orang. Dengan cakupan luas wilayah setingkat Provinsi tetapi dukungan pengawasan masih berasal dari Provinsi lain.

Anggota Komisi IX DPR RI, Enny Anggraeny Anwar menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat agar pro aktif melakukan kegiatan preventif untuk mencegah peredaran vaksin dan obat-obatan ilegal di Sulawesi Barat. Selain itu dia juga meminta kepada jajaran Polda Sulawesi Barat agar tidak ada narkoba yang masuk ke Sulawesi Barat.

“Penanggulangan vaksin-vaksin dan obat palsu, sebelum terjadi saya kira kita lebih baik mencegah, dan juga soal peredaran narkoba yang tadi disampaikan pak Kapolda karena itu sangat rawan dan itu yang membuat saya merasa tidak enaklah,” ungkap Enny di Mamuju Sulawesi Barat, belum lama ini.

### Kerja Sama Atasi Peredaran Obat Palsu

Dibutuhkan kerjasama yang kuat untuk mengatasi peredaran obat palsu antara Badan POM dan Kepolisian. Masyarakat harus dijaga dari konsumsi obat-obatan palsu, vaksin palsu, hingga makanan yang berbahaya bagi

kesehatan.

Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso menyampaikan hal tersebut di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (30/9/2016). “Saya mengimbau harus kompak. Bila ada SK Gubernur menyangkut hal ini harus dijalankan, baik oleh dinas kesehatan dan balai besar POM. Semuanya harus bekerja maksimum,” pintanya.

Politisi PDI-Perjuangan ini, mengaku akan terus memantau kinerja Badan POM di Kalimantan Selatan ini. Obat-obatan dan vaksin palsu sudah beredar luas di Kalimantan Selatan. Semua pihak agar bekerja maksimal, karena korban sudah banyak berjatuh. Badan POM, sambung Imam, harus pro aktif menjalin kerjasama dengan berbagai instansi untuk melakukan penyelidikan atas peredaran obat-obatan dan vaksin palsu. Kalau menunggu sampai bisa tertangkap tangan, itu sulit. Maka sidak perlu banyak dilakukan.

### Atasi Peredaran Obat Ilegal dengan Sidak Reguler dan Edukasi

Peredaran vaksin dan obat ilegal yang terjadi begitu masif, menuntut Badan POM untuk melakukan sidak secara reguler ke sejumlah toko obat dan apotek. Koordinasi antar-instansi perlu dilakukan untuk menghentikan jalur peredaran vaksin dan obat palsu. Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena saat memimpin Tim Kunjungan Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Spesifik, di Banjarmasin,

Kalimantan Selatan.

“Komisi IX ingin hukumannya itu membawa efek jera, karena ini menyangkut nyawa manusia. Kita meminta hukuman seberat-beratnya untuk pengedar dan produsen. Kita juga minta Badan POM melakukan sidak secara reguler ke pasar-pasar seperti Pasar Pramuka, Pasar Glodok, dan Pasar Roxy,” terangnya.

Minimnya sosialisasi dan edukasi menyangkut pemilihan obat dan makanan, menjadi salah satu sumber masalah maraknya obat-obatan palsu dan makanan berbahaya. Selama ini, masyarakat masih punya mindset untuk selalu mencari obat murah. Demikian dikemukakan Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati usai mengikuti rangkaian Kunjungan Spesifik di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Masyarakat harus diberi pengertian bagaimana memilih makanan sehat dan obat-obatan yang asli. “Masyarakat kita masih suka membeli obat yang murah untuk mengobati penyakitnya. Padahal, obat yang murah itu perlu diwaspadai tanggal kadaluarsa, produsen, dan alamat produsennya,” ujar Okky.

Kelemahan masyarakat dalam membeli obat-obatan itu, kerap dimanfaatkan oleh para oknum produsen obat untuk membuka bisnis obat-obatan ilegal. Politisi PPP ini juga menyoroti SDM dan sarana Badan POM Kalimantan Selatan yang sangat minim. Untuk itu, perlu revitalisasi dan Badan POM pusat perlu memberi dana alokasi khusus kepada daerah agar pengawasan yang dilakukan lebih maksimal. ■



Tim Kunjungan Spesifik Komisi IX DPR RI saat pertemuan dengan Dinkes Banjarmasin, Kalimantan Selatan

(eko/rief)

foto : Arief/iw

# RUU Kebudayaan Sebagai Elemen Pembangunan Bangsa

**K**omisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali dan Provinsi Kalimantan Selatan untuk menerima masukan dalam pembahasan RUU Kebudayaan yang kini masih dalam pembahasan di DPR RI. RUU Kebudayaan ini penting sebagai elemen pembangunan bangsa, mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman budaya sehingga perlu dikembangkan dengan adanya Undang-Undang.

Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi X ke Provinsi Bali, Mujib Rohmat mengatakan RUU Kebudayaan yang kini masih menjadi pembahasan di DPR RI adalah elemen dalam mewujudkan pembangunan bangsa, sehingga diharapkan akan segera diselesaikan secepatnya. Hal ini diungkapkan disela kunjungannya ke Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar baru-baru ini.

“RUU Kebudayaan ini jadi perhatian utama karena ini menjadi bagian dari pembangunan bangsa. Indonesia merupakan negara kesatuan dan kita

punya keragaman dan budaya yang luar biasa. Tentu ini menjadi perhatian kita,” ujar Mujib.

Hal ini penting mengingat kini sudah ada UU teknis yang mengatur kebudayaan seperti UU Film, UU Cagar Budaya, UU Bendera dan Bahasa, UU Pariwisata namun UU induknya belum ada. Oleh karena itu, UU Kebudayaan ini menjadi penting untuk dapat dituntaskan.

“UU Kebudayaan ini merupakan kebutuhan karena sudah cukup lama UU ini dirancang. Kita berharap ini bisa diselesaikan. Karena UU yang merupakan anakan dari UU Kebudayaan sudah lahir duluan seperti UU Film, UU Bahasa dan Bendera, UU Cagar Budaya, UU Pariwisata dll. Ini sebutan UU anakan yang sudah lahir tapi UU induknya belum ada,” tegas Mujib.

Politisi Golkar ini juga menegaskan keinginannya dalam RUU Kebudayaan ini dalam upaya melestarikan kebudayaan sebagai perekat dari kesatuan bangsa. Mengingat

Indonesia memiliki kebudayaan yang cukup banyak sehingga juga turut serta dalam membangun kebudayaan dunia.

Dalam kesempatan ini, Rektor ISI Denpasar, Prof. I Gede Arya Sugiarta mengungkapkan sebagai lembaga pendidikan di bidang seni dan kebudayaan, ISI Denpasar turut memberi masukan. Salah satunya memperkuat lembaga pendidikan di bidang seni dan budaya. Menurutnya lembaga pendidikan di bidang seni, budaya, termasuk agama, perlu dibentuk pada tingkat sekolah menengah.

“Sekarang ini kan sekolah seni itu hanya ada di Denpasar, Gianyar, Bangli, dan Buleleng saja. Budaya itu tidak bisa instan diberikan pada tingkat lembaga pendidikan tinggi saja. Kalau bisa malah dari awal. Sekarang sekolah seni di Bali kan belum merata. Paling tidak di setiap kabupaten ada SMK kesenian, kebudayaan, dan agama juga,” harap Sugiarta.



Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI meninjau Sanggar Paripurna di Bali.

foto : Hendra/iw



foto : Eka/iw

Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI meninjau Taman Budaya di Kalimantan Selatan.

### Majukan Kebudayaan Nasional

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih memimpin Kunjungan Kerja Panja RUU Kebudayaan ke Provinsi Kalimantan Selatan didampingi 11 Anggota Dewan. Mereka diterima Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalsel Mohandas didampingi jajaran serta tokoh masyarakat, adat dan budayawan, Banjarmasin.

“Kunjungan kerja Panja RUU



Yang harus kita wujudkan kebudayaan tidak diurus tata nilai saja, tetapi juga bersifat benda. Kalau diurus secara konsisten dan secara penuh rasanya kewalahan. Penanganan dari aspek kebudayaan maupun infrastruktur termasuk kebijakan-kebijakan lainnya.



Kebudayaan ini dalam rangka memajukan kebudayaan nasional, memandang perlu untuk mendapatkan masukan terhadap substansi pengaturan RUU. Khususnya terkait dengan pemajuan dan pengelolaan kebudayaan serta kelembagaan kebudayaan. Atas dasar itulah kami ingin menggali dan mengidentifikasi masalah langsung dari segenap pihak yang berkepentingan khususnya kebudayaan terkait dengan strategi dan *grand design* yang perlu dikembangkan untuk pemajuan kebudayaan nasional Indonesia”, tegas Fikri.

Sementara itu, Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Mohandas menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan ini. Menurutnya dinas ini setelah perampingan sejak berlakunya PP 41 ada lima urusan yang ditangani, yaitu kebudayaan, keolahragaan, pariwisata, ekonomi kreatif. “Jadi lima urusan dan lima kementerian yang menjadi koordinasi kami. Saya kira hanya satu-satunya yang ada tergabung di Provinsi Kalsel ini yang belum terpisah,” jelasnya.

Terkait Rancangan UU Kebudayaan, dia mengatakan, sejak 2011 sudah dibicarakan namun sampai hingga kini belum lahir juga. Diakui bahwa mengurus kebudayaan sangat luas dan kompleks dan banyak keterkaitannya.

“Yang harus kita wujudkan kebudayaan tidak diurus tata nilai saja, tetapi juga bersifat benda. Kalau diurus secara konsisten dan secara penuh rasanya kewalahan. Penanganan dari aspek kebudayaan maupun infrastruktur termasuk kebijakan-kebijakan lainnya. Kami menyambut baik atas kunjungan Komisi X DPR RI kesini.” imbuhnya.

Zulkifli Mustafa, Pengurus Perhimpunan Kesenian daerah Kalsel, memberikan masukan terkait dengan UU Kebudayaan dengan mengatakan, dalam UU nanti perlu ada unsur perlindungan, serta pelestarian dan kemajuan, dan bahkan mungkin penciptaan. Oleh karena itu unsur yang sudah ada dalam RUU sudah sangat baik.

Selain itu, dia menyarankan adanya inventarisasi secara nasional, Selanjutnya peningkatan kompetensi, ini perlu dikaji betul sehingga seniman-seniman itu ada ukuran yang jelas. Selain itu dia setuju RUU Kebudayaan sebagai induk dan dalam perlindungan itu diharapkan ada pandangan yang mendasar tentang kebudayaan serta perlunya pemikiran dan solusi,

Sesditjen Kementerian Kebudayaan Nono Adya Supriyanto menyampaikan beberapa hal. Pertama, terkait dengan UU Kebudayaan pasal 32 berbunyi negara memajukan kebudayaan nasional. Pengertian memajukan ini mengandung arti pelestarian. Yang kedua, berkaitan bahwa budaya tradisional ataupun teknologi tradisional itu tidak diajarkan di sekolah.

Ada masukan, di sekolah kurikuler hanya 2 jam diberi pelajaran berkaitan tentang kebudayaan. Tapi di ekstrakurikuler itu bisa saja diberikan. Permasalahannya di Permen 92 tahun 2008 itu mengatur, kegiatan kulikuler untuk seni dan budaya dilakukan oleh guru padahal ketika berbicara seni tradisional tidak semua guru bisa mengajarkan itu.

Diharapkan dengan adanya masukan dari berbagai pihak, RUU Kebudayaan dapat segera dituntaskan dan membawa nilai positif bagi perkembangan budaya masyarakat Indonesia dan memajukan sektor ekonomi. ■

# Padepokan Aliran Sesat Bak Fenomena Gunung Es

Hampir setiap tahun selalu muncul peristiwa tentang aliran sesat di Indonesia. Pengikutnya pun beraneka ragam dari yang hanya puluhan orang, hingga ribuan orang. Tidak tanggung-tanggung pengikutnya pun tidak terbatas kalangan menengah ke bawah, melainkan kalangan atas dengan tingkat pendidikan yang juga di atas rata-rata masyarakat awam. Melihat hal tersebut, Parlementaria mencoba menyoroti fenomena Padepokan-padepokan sesat dalam edisi kali ini.



foto : Iwan Armanias/iw

Anggota Komisi III DPR RI berdialog dengan Taat Pribadi di Polda Jawa Timur

**Y**a, tahun 2016 ini masyarakat dihebohkan dengan terungkapnya dua kasus padepokan yang tergolong aliran sesat. Sebut saja kasus Padepokan Aa Gatot Brajamusti di Sukabumi, yang melibatkan banyak artis dan publik figur sebagai pengikutnya. Terakhir yang tidak kalah hebohnya bahkan sempat menjadi *trending topic* di berbagai media massa adalah kasus Padepokan Dimas Kanjeng atau saya lebih suka menyebut dengan nama aslinya, Taat Pribadi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Bak pepatah sepandai-pandainya menyimpan bangkai akhirnya tercium juga. Begitupun dengan dua contoh kasus padepokan sesat di atas. Siapa sangka praktek sesat yang telah mereka lakukan bertahun-tahun justru terbongkar karena kasus lainnya.

Gatot Brajamusti atau yang biasa disapa Aa Gatot misalnya, justru tertangkap aparat kepolisian ketika dirinya diduga tengah melakukan

pesta sabu di salah satu hotel di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saat itu, ia bersama sang istri dan beberapa rekannya tengah merayakan kemenangannya yang kedua kali sebagai Ketua Umum PARFI (Persatuan Artis Film Indonesia).

Dalam pemeriksaan kasusnya berkembang menjadi penipuan dan pelecehan seksual. Ia diduga telah melakukan pelecehan seksual oleh seorang wanita hingga hamil dan melahirkan anak. Sementara dugaan penipuan dilayangkan langsung oleh mantan salah seorang pengikutnya yang juga artis ternama, Reza Artamevia. Dari para mantan pengikutnya diketahui bahwa Gatot kerap mengelabui anggotanya lewat modus serangkaian ritual. Gatot juga mempraktikkan ritual seks menyimpang dengan menggunakan narkoba jenis sabu yang kerap disebut aspat atau makanan untuk jin.

Sementara itu Padepokan Taat Pribadi di Probolinggo terungkap atas

aduan pembunuhan dua orang mantan pengikutnya, Ismail Hidayah dan Abdul Gani. Belum juga kasus tersebut terungkap, pemberitaan mengenai DK terus bergulir pada dimensi yang lain, yakni tentang kemampuannya menggandakan uang, kasus penipuan, hingga dugaan ajaran sesat yang berkaitan dengan mistik (ilmu gaib). Sebelumnya, Dimas Kanjeng sempat menghebohkan publik dengan video penggandaan uang yang disebut-sebut dengan cara gaib. Khusus untuk kasus Dimas Kanjeng, Komisi III DPR RI pun sempat mendatangnya di Polda Jawa Timur.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI, Asli Chaidir mengatakan bahwa fenomena padepokan dengan berbagai aliran, baik yang benar-benar berpegangan dengan kitab suci maupun padepokan yang menggunakan ritual menyimpang ini sangat banyak di Indonesia. Bahkan bisa dikatakan, hampir ada di setiap daerah di Indonesia.

Hal tersebut menurut Asli tidak terlepas dari latar belakang bangsa Indonesia sendiri yang sarat akan budaya dan tradisi masa lalu yang bernuansa mistis. Kondisi demikian dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk mencari keuntungan sendiri,

serba instan. Meskipun hal tersebut sebenarnya di luar logika atau nalar.

### Dapatkan Kelebihan

Senada dengan Asli Chaidir, anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Syafii juga menilai padepokan sebagai bagian

yang terjadi di beberapa tidak hanya bersumber dari padepokan itu sendiri. Melainkan juga akibat lain, yakni adanya kecenderungan masyarakat yang merasa termarginalkan. Marginal secara ekonomi. Sehingga ketika ada yang mencoba memberikan solusi untuk mengatasi kekurangan tersebut, maka hal itu semakin mudah diterimanya dengan suka cita. Namun ketika semua itu dijalani yang ada malah kecewa, karena merasa tertipu,” papar Romo.

Terkait hal tersebut, selaku anggota Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum, Romo menilainya perlunya penegakan hukum dalam kasus ini. Hal tersebut semata untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku, sekaligus menjadi pembelajaran bagi pihak lain untuk tidak berbuat serupa.

“Kalau memang ada yang dirugikan dalam kasus itu, ya hukum harus ditegakkan. Bisa dikenakan pasal 378 tentang tindak pidana penipuan,” tambah Romo.

Meski demikian, baik Asli maupun Romo berkeyakinan mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan kata lain, lebih baik menghindarkan diri dari padepokan yang notabene memiliki ritual menyimpang dari ajaran yang ditentukan oleh Al Quran dan Hadist. Menurut keduanya, semua itu dapat lewat pendidikan agama yang kuat.

Selain pendidikan agama, yang juga tidak kalah pentingnya adalah pembinaan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian Sosial. Bukan tidak mungkin berkembangnya padepokan beraliran sesat itu disebabkan karena kurangnya kepedulian dari tokoh agama setempat. Termasuk pembinaan keagamaan dari instansi terkait tersebut. Pembinaan yang dimaksud disini tidak hanya sebatas pembinaan langsung kepada masyarakat, melainkan juga pembinaan terhadap tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat untuk lebih peduli terhadap fenomena yang terjadi di sekitarnya. Selain peduli, para tokoh juga diharapkan untuk lebih berani menyuarakan kebenaran yang diyakininya. ■



foto : Arief/iw

Anggota Komisi VIII DPR RI  
**Asli Chaidir**



foto : Arief/iw

Anggota Komisi III DPR RI  
**Muhammad Syafii**

dengan modus penipuan. Penipuan berkedok ahli spiritual yang ujung-ujungnya menjaring sejumlah dana, baik berbentuk uang, emas, ataupun harta benda lainnya. Tidak hanya itu, bahkan tidak jarang “sang guru” spiritual gadungan itu juga tega melecehkan korbannya. Agar “calon korbannya” percaya tidak jarang mereka membungkusnya dengan stempel agama dalam praktiknya.

“Modus penggandaan uang oleh Taat Pribadi itu tidak beda dengan MLM (Multi level Marketing) dimana setiap anggota baru menyetor uang yang dikumpulkan kepada orang kepercayaannya, yang kemudian uang tersebut diberikan ke anggota lama sebagai sebuah keuntungan. Disini disebut hasil penggandaan. Jadi tidak berbeda dengan MLM,” ujar Asli.

Lebih lanjut Politisi dari Fraksi PAN ini menilai banyaknya anggota atau pengikut padepokan sejenis ini merupakan tanda pergeseran karakteristik masyarakat yang menginginkan segala sesuatu yang

dari budaya bangsa. Tidak heran jika kemudian banyak bermunculan jenis padepokan. Mulai dari padepokan pencak silat, padepokan Al Quran dan lain sebagainya. Namun yang pasti, kecenderungan orang masuk ke Padepokan tersebut adalah karena ingin mendapatkan sebuah kelebihan, dan jawaban atas kegalauan atau permasalahan hidupnya, bisa berbentuk ketenangan.

Selain itu ditambahkan pria yang kerap disapa Romo ini, tidak jarang juga orang masuk padepokan karena merasa lemah. Sehingga butuh sebuah kekuatan ekstra untuk dapat bersosialisasi dengan lingkungannya. Namun tidak sedikit pula padepokan yang kerap mengajarkan ilmu-ilmu mistis yang tak dapat dilihat oleh mata telanjang. Tidak berlebihan jika kemudian fenomena Padepokan dengan Aliran sesat itu seperti gunung es yang terlihat kecil di permukaan, namun kenyataannya sangat banyak.

“Sebenarnya, penyimpangan

Pertemuan MIKTA di Australia

# Mendekatkan Parlemen dengan Rakyat

**Parlemen dan rakyat tak bisa dipisahkan. Gedung parlemen juga harus didesain sistemnya untuk lebih dekat dengan rakyat. Sebagai obyek vital, keamanan gedungnya pun harus terjaga dengan baik. Keterbukaan publik dan keamanan jadi tuntutan keseimbangan menuju parlemen yang ideal.**



foto : Dok Pri/iw

Ketua DPR RI Ade Komarudin bersama sejumlah perwakilan negara saat pertemuan ketua parlemen yang tergabung dalam MIKTA

Delegasi para pemimpin parlemen bertemu untuk membincang bersama sistem keterbukaan publik dan keamanan parlemen. Inilah pertemuan penting yang khusus membangun kedekatan rakyat dengan para wakilnya di parlemen. Awal Oktober lalu, Ketua DPR RI Ade Komarudin menghadiri pertemuan *the 2<sup>nd</sup> MIKTA Speaker's Consultation*, sebuah pertemuan konsultasi para ketua parlemen yang tergabung dalam MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia).

Pertemuan yang dihelat di Kota Hobart, Australia 5-7 Oktober 2016 itu, menghadirkan lima sesi diskusi. Sesi pertama, membahas aspek keamanan dalam konsep keterbukaan parlemen. Pada sesi kedua, dibahas *Open Governments* di negara-negara MIKTA. Sesi ketiga, membincang keterbukaan

publik dalam keterbukaan parlemen. Sesi keempat, bicara pentingnya akuntabilitas parlemen. Dan sesi terakhir, membahas independensi parlemen dari pihak eksekutif.

Pertemuan Parlemen MIKTA dibuka secara resmi oleh Presiden Senat Australia Stephen Parry. MIKTA memiliki struktur keanggotaan yang unik. Kelima negara anggotanya merupakan *middle powers*. Kelompok negara MIKTA memiliki populasi lebih dari 500 juta jiwa dengan GDP mencapai USD 5,8 triliun per tahun. Sebagai anggota G20, negara-negara MIKTA menduduki peringkat 12,14,15,16, dan 17 ekonomi terbesar di dunia.

Berbicara sistem keamanan parlemen, delegasi MIKTA menyepakati pentingnya akses masyarakat terhadap parlemen, sambil memperhatikan sistem keamanan gedung parlemen

sebagai obyek vital negara. Ade Komarudin menyampaikan, sebagai simbol demokrasi, parlemen harus terbuka dan dapat diakses oleh publik. Karakter parlemen selalu memunculkan partisipasi masyarakat yang kontinu, tidak hanya terbatas pada waktu pemilihan umum.

Untuk menjalankan fungsi representatifnya, jarak antara anggota parlemen dengan konstituennya harus diminimalisir. Dan yang harus diperhatikan, kompleks parlemen dapat menjadi target *cyber crime* dan terorisme, sehingga faktor keamanan harus diperhatikan dengan baik. Diperlukan keseimbangan antara faktor keamanan dan keterbukaan publik.

Akom, begitu Ketua DPR RI ini akrab disapa, mengapresiasi seluruh anggota MIKTA yang juga anggota *Open Government Partnership (OGP)*, yang selalu mengawal komitmen



foto : Dok Pri/iw

Ketua DPR RI Ade Komarudin berbincang dengan perwakilan negara anggota MIKTA

pemerintah dalam hal mendorong transparansi, memberdayakan masyarakat, memberantas korupsi, dan membangun teknologi untuk memperkuat tata-kelola. Dan Indonesia sendiri menginisiasi *Open Government Indonesia (OGI)* pada 2011 sebagai sebuah gerakan untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, dan inovatif.

OGI merupakan upaya kolaboratif dan partisipatif antar pemangku kepentingan, terutama pada level pemerintah dan masyarakat sipil. Akom menegaskan bahwa parlemen memiliki peranan vital dalam memastikan terealisasinya komitmen *Open Governments*. Oleh karena itu, Parlemen juga hendaknya mendukung implementasi *National Action Plan*. Dengan komitmen kuat terhadap *Open Governments*, parlemen akan semakin maju dalam menggagas dan memajukan tata kelola yang baik (*good governance*) sebagai tiang pancang demokrasi.

Di Indonesia, sambung Akom, para anggota parlemen wajib melaporkan harta kekayaannya untuk menjaga akuntabilitas dan integritas para penyelenggara negara. Ini merupakan kepatuhan pada aturan dan kesadaran moral politisi sebagai penyusun kebijakan publik. DPR RI berkomitmen membangun sistem politik demokrasi

Indonesia yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Pada sesi terakhir pertemuan ini, Akom menyampaikan pula soal independensi parlemen dari eksekutif. Pada prinsipnya, lembaga DPR RI tidak dapat dilemahkan oleh eksekutif. Jaminan independensi DPR RI dari kekuasaan eksekutif sejauh ini telah terakomodasi dalam konstitusi nasional. Namun demikian, DPR RI belum bisa sepenuhnya independen terutama dalam aspek keuangan dan penataan kepegawaian. Dua masalah ini, masih tergantung pada eksekutif.

DPR RI sendiri tengah berupaya



Pada prinsipnya, lembaga DPR RI tidak dapat dilemahkan oleh eksekutif. Jaminan independensi DPR RI dari kekuasaan eksekutif sejauh ini telah terakomodasi dalam konstitusi nasional. Namun demikian, DPR RI belum bisa sepenuhnya independen terutama dalam aspek keuangan dan penataan kepegawaian.



mendorong otonomi kelembagaan, sehingga dapat menjadi lembaga yang kuat penyeimbang eksekutif. Independensi ini, baik kewenangan, peraturan, pengelolaan anggaran, hingga kepegawaian semestinya dapat terlaksana. Kehadiran Akom pada pertemuan itu didampingi Wakil Ketua BKSAP DPR RI Syaifullah Tamliha, Anggota BKSAP Siti Hediati Soeharto, dan Anggota Komisi IV DPR RI Ichsan Firdaus. ■

(mh)



foto : Dok Pri/iw

Ketua DPR RI Ade Komarudin bersama rombongan memberikan cenderamata



foto : Hamdis/iw

Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan Fadli Zon memimpin delegasi saat berkunjung ke Meksiko dalam rangka penguatan dan pengembangan kerjasama bilateral

## DPR Harapkan KPU Belajar dari KPU Meksiko

**Wakil Ketua DPR RI/ Korpolkam, Fadli Zon memimpin delegasi DPR RI ke Meksiko pada 27-30 September 2016, dalam rangka penguatan dan pengembangan kerjasama bilateral kedua negara, terutama antar Parlemen. Dari kunjungan ini, Fadli Zon tertarik dengan keberadaan KPU Meksiko yang kuat dan independen.**

Saat mengunjungi KPU Meksiko yang dikenal dengan *Instituto Nacional Electoral* (INE), delegasi DPR RI disambut Ketua INE Meksiko, H.R. Lorenzo Córdova Vianello. Dalam pertemuan tersebut, Lorenzo menjelaskan, INE awalnya bernama *Instituto Federal Electoral*. Namun sejak 2014 menjadi *Instituto Nacional*

*Electoral*, sehingga tidak hanya bertanggung jawab atas pemilihan Presiden Meksiko, pemilihan anggota DPR RI dan Senator di tingkat federal, tapi juga di masing-masing negara bagian Meksiko. Lorenzo juga menceritakan kerjasama yang dijalin INE dengan KPU RI di tahun 2003.

Delegasi DPR RI dan INE juga berdiskusi banyak hal terkait sistem pemilu di kedua negara, salah satunya kampanye di stasiun televisi dan radio. INE mengeluarkan aturan larangan membayar stasiun televisi dan radio yang ada di Meksiko untuk berkampanye. Hal ini berlaku secara luas tidak sebatas pada calon, tapi juga pemimpin partai politik, anggota partai politik, setiap individu ataupun korporasi yang diindikasikan mengkampanyekan calon.

Untuk kampanye di stasiun televisi dan radio, INE menetapkan waktu pra kampanye adalah 18 menit dan waktu kampanye 41 menit, yang dibagi secara proposional pada masing-masing calon. Iklan kampanye ditayangkan pukul 06.00 pagi sampai tengah malam,

dengan pembagian proposional selama 3 menit setiap jam untuk seluruh calon. Bagi stasiun televisi dan radio yang tidak menayangkan iklan kampanye secara adil akan dikenakan denda uang.

“Selama 48 menit diberikan pada partai-partai politik melakukan kampanye secara gratis di seluruh televisi yang ada. Dan televisi itu wajib menyiarkan kampanye tersebut, baik itu kampanye pilpres, kampanye gubernur, walikota maupun legislatif. Jadi diberikan alokasi waktu 48 menit, dikurangi 7 menit untuk KPU menyiarkan pengumuman, himbauan dll,” ujar Fadli Zon.

Konsep pra-kampanye dan kampanye yang diterapkan INE merupakan masukan yang sangat bermanfaat bagi delegasi Indonesia, juga menjadi bahan untuk disampaikan pada KPU Indonesia. Di Indonesia, dalam peraturan KPU disebutkan iklan kampanye peserta pemilu maupun calon tidak boleh disiarkan, kecuali dalam masa 21 hari yang diperkenankan oleh UU dan peraturan perundangan. Dengan ketentuan

setiap peserta pemilu boleh memasang iklan maksimal 10 spot berdurasi paling lama 30 detik di setiap stasiun televisi setiap hari dan 10 spot berdurasi paling lama 60 detik di setiap stasiun radio setiap hari. Terkait jadwal penayangan iklan ditetapkan KPU daerah atau KPI daerah berkoordinasi dengan lembaga penyiaran, dengan memperhatikan alokasi waktu yang berimbang untuk setiap peserta pemilu atau calon.

### KPU Independen dan Kuat

Untuk itu Wakil ketua DPR RI Fadli Zon berharap KPU Indonesia bisa independen dan kuat seperti INE, dimana INE menjalankan sistem dan menegakkan aturan sesuai hukum yang berlaku di Meksiko, dengan tidak berpihak pada partai politik manapun di Meksiko dan kepada kandidat atau peserta pemilihan umum.

dalam penyiaran” tambah Fadli Zon.

Hal lain yang menarik adalah pembiayaan terhadap partai politik atau *political financing*. Di Meksiko, INE memberikan dana 200 juta USD untuk membiayai kegiatan 9 partai politik ditambah 100 juta USD untuk kegiatan kampanye.

“Ada 9 partai politik nasional yang ada di DPR RI. Jumlah anggota DPR RI ada 500. 300 dari pemilihan langsung dari proporsional terbuka, 200 dari sistem yang lebih tertutup terbatas. Ada dukungan kepada partai politik sebagai institusi demokrasi yaitu 200 juta dollar untuk kegiatan partai politik yang 30 persen dibagi secara merata, dan 70 persen dibagi secara proporsional. Kemudian 100 juta dolar dibagi untuk kegiatan kampanye,” kata Fadli Zon.

Delegasi DPR RI juga bertemu *Camara de Dipustados* atau DPR

dengan beberapa kementerian Meksiko, seperti *Secretaria De La Defensa Nacional/SEDENA* (Kementerian Pertahanan), *Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo, Rural, Pesca y Alimentacion/SAGARPA* (Kementerian Pertanian), dan *Secretaria De Relaciones Exteriores* (Kementerian Luar Negeri).

Dalam pertemuan dengan SEDENA, delegasi DPR RI disambut Menteri Pertahanan Meksiko Salvador Cienfuegos Zepeda. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam Fadli Zon menyampaikan sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, kekuatan militer menjadi bagian penting dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Delegasi DPR RI berharap Indonesia dan Meksiko dapat memperkuat hubungan kerjasama militer untuk keamanan dan pertahanan kedua negara.

### Pemasok Daging

Adapun saat berkunjung ke gedung SAGARPA, delegasi DPR RI yang disambut *Coordinado de Asuntos Internacionales*, Raul Urteaga Trani membahas isu daging halal. Meksiko menyatakan siap menjadi alternatif pemasok daging halal untuk Indonesia. Fadli Zon mengakui, Indonesia memerlukan pasokan daging halal yang meningkat dari tahun ke tahun seiring pertumbuhan ekonomi dan penduduk.

Kunjungan delegasi DPR RI ke Meksiko ditutup pertemuan dengan *Secretaria De Relaciones Exteriores*. Pertemuan membahas keinginan memanfaatkan forum MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia) untuk meningkatkan kerjasama antar negara anggota.

Turut serta dalam delegasi adalah Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasryhari, anggota Komisi I DPR RI Syaiful Bahri Anshori, anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka dan Dwie Aroem Hadiatie. ■



foto : Hamdis/iw

Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan Fadli Zon menerima cenderamata dari perwakilan Meksiko

Fadli tertarik terhadap sistem pengawasan partai yang dilakukan INE dalam penggunaan media massa elektronik sebagai sarana kampanye politik. “Dan juga menarik, mereka melakukan *monitoring*. Ada 7 televisi nasional dan hampir 400 televisi lokal dimonitor semua bahkan direkam. Mereka mempunyai alat cukup canggih untuk melakukan monitoring dan rekaman, sehingga nanti dalam keadaan sengketa atau *dispute*, itu bisa disajikan. Jadi KPUnya mengambil fungsi-fungsi

Meksiko yang diterima Wakil Ketua DPR Meksiko, Maria Guadalupe. Salah satu isu yang dibahas adalah kesetaraan gender di parlemen Meksiko dimana keterwakilan perempuan mencapai 50%. Hal ini menjadi masukan bagi delegasi DPR RI untuk mengevaluasi keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia yang hanya 17%.

Selain bertemu INE dan Parlemen Meksiko, delegasi DPR RI didampingi Duta Besar Indonesia untuk Meksiko Yusra Khan, juga melakukan pertemuan



Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf bersama delegasi Parlemen Uni Eropa

## Menuju Perdagangan Inklusif

**Isu perdagangan global mengemuka antara negara maju dan negara berkembang. Sepuluh perwakilan parlemen dunia membincang perdagangan global dengan World Trade Organization (WTO). Sistem perdagangan global yang berkeadilan bagi negara-negara berkembang dan miskin dibicarakan. Perdagangan inklusif pun dibincang serius.**

**D**PR RI mengutus delegasi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) ke pertemuan 37th Steering Committee of the Parliamentary Conference on the WTO di Jenewa, Swiss, akhir September lalu. Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf memimpin delegasi DPR sekaligus menjadi pembicara dalam pertemuan tersebut. Hadir pula delegasi Parlemen Uni Eropa, *Inter-Parliamentary Union* (IPU), dan delegasi WTO sendiri.

Dalam pertemuan yang berlangsung di markas besar IPU tersebut, ada empat agenda utama yang dibahas, yaitu pemaparan hasil kerja WTO, perkembangan terkait negara anggota baru WTO, perkiraan

perdagangan dunia ke depan, serta pembahasan pernyataan bersama (*draft statement*). Pada sesi pertama, Nurhayati menyampaikan bahwa perdagangan global dapat mengurangi tingkat kemiskinan serta menciptakan lapangan kerja baru.

“Parlemen Indonesia memandang bantuan perdagangan atau *aid for trade* dapat mendorong terciptanya perdagangan yang inklusif melalui pembangunan kapasitas, terutama bagi masyarakat dari negara berkembang dan negara miskin,” paparnya. Nurhayati menyerukan perdagangan global yang berkeadilan, agar negara-negara berkembang dan kecil bisa ikut berkompetisi dalam perdagangan global, tanpa dipersulit

dengan regulasi WTO.

Pada sesi kedua, Nurhayati juga mengingatkan bahwa negara yang ingin bergabung dengan WTO perlu melihat kapasitas negaranya. Dalam beberapa kasus, negara yang ingin bergabung diharuskan melakukan perubahan kebijakan dan membuka akses pasar yang di luar kemampuannya. “Negara anggota WTO perlu memfasilitasi proses integrasi negara baru sesuai dengan kemampuan pembangunan negara tersebut,” saran Nurhayati.

Kini, keanggotaan WTO sudah mencapai 164 negara. Dan Afganistan jadi anggota yang terakhir. Kemunculan anggota baru dimulai sejak tahun 1995, ketika 36 negara satu per satu bergabung ke dalam WTO. Dan sepuluh negara anggotanya merupakan *least developed country*. Indonesia, sambung Nurhayati, senantiasa mendukung program yang membantu negara-negara berkembang, sekaligus kelompok masyarakat yang kurang mampu untuk mendapat manfaat dari perdagangan global.

Satu hari sebelumnya (27/9), di markas besar WTO, Nurhayati juga sempat mengungkap soal dampak Nilai Rantai Global (Global Value Chain) dimana proses produksi dari bahan mentah hingga bahan jadi diproses



foto : Dok BKSAP/iw

Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf berdialog dengan delegasi Parlemen Uni Eropa

di banyak negara. Data dari WTO menyebutkan, GVC menyumbang 70% dari total perdagangan global.

Selain itu, Nurhayati juga menekankan pentingnya mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk dilibatkan dalam GVC. Seperti diketahui UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Ini disampaikan Nurhayati di forum resmi WTO untuk melindungi ekonomi lokal, menciptakan pertumbuhan yang

berkelanjutan, dan menciptakan investasi yang berkeadilan yang dapat dinikmati semua masyarakat.

Di sinilah pentingnya memberi perhatian pada UMKM, agar dapat menerima manfaat dari GVC melalui peningkatan kemampuan dan kompetensi, pembangunan kapasitas, serta transfer teknologi. Tidak hanya itu, pada beberapa pertemuan, Nurhayati juga selalu menyampaikan isu penting menyangkut pemberdayaan perempuan. Dalam konteks perdagangan global, ia juga menyebut peran strategis perempuan.

“Perempuan tidak hanya sebagai tenaga kerja dan ikut serta dalam aktivitas perekonomian, namun harus turut serta dalam pengambilan keputusan,” saran politisi Partai Demokrat ini.

Pada sesi terakhir, disusun draf penting yang berisi pengakuan atas peran UMKM, perempuan, dan anak muda dalam sistem perdagangan global. Semua negara peserta juga sepakat menciptakan kebijakan yang mendorong UMKM dan negara miskin agar terlibat dalam rantai nilai global. ■



foto : Dok BKSAP/iw

Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf saat menjadi pembicara pada pertemuan di Jenewa

(mh)

## Melestarikan Budaya Betawi dan Menggali Potensi Ekonominya



foto : dok piri/iw

Anggota DPR RI Melani Leimena Suharli berbincang dengan warga saat kunjungan kerja

Tradisi dan kebudayaan Betawi adalah salah satu dari kekayaan Nusantara yang harus dijaga dan dilestarikan. Anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta II (Jakarta Pusat, Selatan, dan Luar Negeri) Melani Leimena Suharli menunjukkan komitmennya dalam merawat tradisi Betawi.

Saat berkunjung Melani yang juga Anggota Komisi VI DPR RI, konsen terhadap pemberdayaan usaha kecil dan menengah, mencoba membuat peluang ekonomi dari tradisi

kebudayaan Betawi, seperti roti buaya, batik khas khas Betawi, beer pletok, dan dodol Betawi.

“Setiap kali saya ke dapil, saya selalu tanya usaha-usaha apa yang dilakukan masyarakat untuk melestarikan budaya Betawi, karena banyak masuk budaya dari luar, jangan sampai budaya lokal terpinggirkan,” jelas Melani Poltisi dari Demokrat.

Seperti roti buaya yang diyakini masyarakat Betawi sebagai simbol kesetiaan ini hanya digunakan dalam upacara pernikahan adat saja, sehingga konsumsi roti ini pun terbatas. Merespon hal tersebut, Melani mencari cara agar roti buaya bisa dikonsumsi kapan saja tanpa harus menunggu ada upacara pernikahan dan diproduksi tidak dalam ukuran besar saja, tapi juga dibuat yang berukuran mini, yang bisa dikonsumsi kapan saja dengan begitu ada peningkatan permintaan khalayak umum.

Selain roti buaya, batik Betawi juga menjadi perhatiannya. Batik Betawi punya beberapa motif khas seperti ondel ondel, tari topeng, burung hong, daun semanggi, kembang kelapa, monas, dan buah pace, abang none.

“Saya perlu mendorong semua stakeholder untuk terus membantu pengembangan usaha batik ini sebagai alternatif terbukanya lapangan pekerjaan baru, khususnya kaum Ibu-Ibu,” ujarnya.

“Begitu pula dengan dodol Betawi dan beer pletok. Oleh karena itu, saya berharap produk-produk Betawi tersebut bisa dijual di supermarket,” lanjutnya. ■

(eko)

## Berhasil Perjuangkan Renovasi Lapas Kelas IIA Pekalongan

Masa Reses bagi Arsul Sani adalah masa dimana dirinya bisa lebih dekat lagi dengan konstituen di daerah pemilihannya. Meskipun sejatinya sebagai wakil rakyat dirinya kerap bertemu dengan masyarakat khususnya di daerah pemilihannya kapanpun mereka membutuhkan.

“Sebenarnya saya bertemu dengan masyarakat khususnya konstituen di Dapil saya tidak terbatas saat reses saja. Tapi khusus di masa reses saya memiliki waktu yang lebih lama untuk menampung aspirasi masyarakat. Aspirasi mereka tidak terbatas lingkup bidang komisi yang saya naungi saja. Sebut saja saya di Komisi III yang membidangi masalah hukum. Lantas aspirasi mereka hanya sebatas hukum saja. Tidak demikian. Aspirasi yang mereka sampai menyangkut berbagai hal yang mereka rasakan, mereka lihat dan mereka harapkan,” papar Arsul.

Dicontohkan politisi dari Fraksi PPP ini, pihaknya kerap mendapat aduan dari para petani di dapilnya, Jawa Tengah X yang meliputi Pemalang, Pekalongan dan Batang. Para petani mengadukan mahalnya harga pupuk, serta rendahnya harga jual gabah hasil panen mereka. Tidak hanya itu, petani di Dapilnya juga mengharapkan bantuan alat pertanian untuk memudahkan tugas mereka.

Khusus untuk masukan, permintaan dan harapan masyarakat yang tidak terkait dengan komisi yang dinaunginya, Arsul mengatakan akan menampung semua masukan tersebut, mengidentifikasi masalah, dan kemudian menyampaikan



foto : dok piri/iw

Anggota DPR RI Arsul Sani saat mengunjungi Lapas Kelas IIA Pekalongan

kepada Poksi (kelompok fraksi) yang khusus membidangi masalah tersebut.

Dalam bidang hukum, perjuangan yang berhasil dilakukan politisi kelahiran Pekalongan, 8 Januari 1964 ini salah satunya adalah renovasi Lapas Kelas IIA Pekalongan. Kondisi Lapas tersebut sebelumnya sangat memprihatinkan. Namun lewat perjuangan Arsul yang melakukan advokasi kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, maka perbaikan Lembaga Perasyarakatan tersebut berhasil dimasukkan dalam salah satu program Kemenkumham. ■

(ayu)

## Dorong Pembangunan Mulai Dari Desa



foto : dok.pri/iw

Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha berdialog dengan warga

**I**r. H. Satya Widya Yudha, M.Sc, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, terpilih mewakili Daerah Pemilihan Jawa Timur IX yang terdiri dari Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro, dalam kegiatan rutin Kunjungan Kerja ke Dapil selalu menyambangi konstituen dari satu desa ke desa lain.

Temu wicara dan jaring aspirasi terhadap persoalan-persoalan yang disampaikan warga masyarakat, hal ini untuk mendengarkan kritik, saran dan masukan warga masyarakat dalam kapasitas sebagai Anggota Komisi VII DPR RI.

Dalam suatu kesempatan, memberikan bantuan pupuk cair organik produksi Bioteknologi LIPI dan alat-alat pertanian untuk kelompok petani, serta mengadakan pelatihan pengolahan pangan berbasis hasil tanaman pangan lokal seperti jagung dan singkong kepada Ibu-Ibu PKK di Desa Growok, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro.

SW Yudha, yang juga sebagai Ketua Kaukus Ekonomi Hijau DPR RI, dan Ketua Bidang SDA & LH DPP Partai Golkar berharap bahwa aspirasi yang disampaikan warga masyarakat di dapilnya dapat diperjuangkan menjadi kebijakan partisipatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan menggerakkan ekonomi rumah tangga.

SW Yudha juga mendukung program-program pemerintah saat ini yang diperuntukkan bagi warga desa melalui dana desa yang memang dianggarkan dalam APBN dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat seluas-luasnya, sesuai dengan semangat Partai Golkar yang mendorong pembangunan dimulai dari desa. ■

(as)

## Hindari Alih Profesi Masyarakat Dengan Penguatan Ekonomi

**A**lih profesi yang dilakukan oleh masyarakat saat ini telah terjadi secara masif, demikian halnya yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, yang merupakan dapil dari Anggota Komisi IV DPR RI Yadi Srimulyadi. Menurut Yadi dengan banyaknya petani yang beralih profesi menjadi buruh pabrik, atau para ibu rumah tangga yang menjadi tenaga kerja di negara lain, dan lain sebagainya, seharusnya hal tersebut menjadi perhatian semua pihak.

“Salah satu penyebab terjadinya alih profesi yang dilakukan oleh masyarakat adalah karena pola hidup yang semakin konsumtif, serta kurang mampunya mereka beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terjadi..” ucapnya.

Ia menyatakan akan mendorong dan memperkuat perekonomian, terutama pada sektor pertanian. Hal ini perlu dilakukan agar perekonomian di desa dapat terus berkembang dan berjalan. Selain itu, dia juga mendorong keberadaan lahan-lahan abadi pertanian dan pembuatan pusat produk pertanian dan perkebunan.

“Dengan pola seperti ini akan meminimalisir alih pekerjaan para petani, dan tidak ada lagi petani yang beralih profesi karena profesi petani juga bisa menjanjikan kesejahteraan,” ujar politisi F PDIP itu.

Pada kesempatan kunjungan ke dapil tersebut, Yadi berusaha menyerap aspirasi yang ada di masyarakat.



foto : dok.pri/iw

Anggota Komisi IV DPR RI Yadi Srimulyadi saat kunjungan kerja

Ia juga ingin mengidentifikasi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, sekaligus mencari jawaban atas persoalan-persoalan bangsa dan merangkul dinamika yang terjadi ditengah masyarakat dapilnya.

“Saya prihatin dengan semakin tergerusnya kesadaran dan rasa nasionalisme di benak para pemuda. Mudah-mudahan dengan adanya upaya untuk memberikan arahan ini, dapat membangkitkan semangat persatuan, budaya gotong royong, sehingga dapat menghindari perpecahan antar elemen masyarakat khususnya di Kabupaten Bandung,” pungkasnya. ■

(dep)

## Memberdayakan Pedagang Kecil

**K**omunitas pedagang kecil jadi perhatian khusus Anggota DPR RI Refrizal. Politisi PKS ini ingin memberdayakan para pemilik kedai lewat program Bedah Lapau. Dalam bahasa Minang, lapau adalah kedai atau warung. Refrizal ingin para pemilik lapau itu lebih sejahtera secara ekonomi dengan meningkatkan usahanya dari lapau menjadi mini market.

Inilah perhatian yang diberikan Refrizal kepada para pedagang pemilik lapau di dapil Sumatera Barat II yang meliputi Pariaman, Kab. Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Kab. Agam, Bukittinggi, Kab. 50 Kota, dan Payakumbuh. Ada target yang ingin diraih Refrizal, yaitu ingin membedah 1000 lapau hingga 2019. Sementara sampai tahun 2016 ini, Refrizal sudah membedah 819 lapau dari semua kabupaten di dapilnya.

Program Bedah Lapau itu sudah dijalankan Anggota Komisi XI DPR RI ini sejak Desember 2012. Para pedagang lapau pun menyambutnya dengan suka hati. "Saya berharap, lapau segera naik kelas. Sebelumnya, lapau hanya kedai kecil. Ke depan, lapau-lapau ini akan menjadi semacam mini market yang dikelola secara profesional," jelas Refrizal.

Program Bedah Lapau, tentu ditujukan untuk mengangkat derajat masyarakat ekonomi kelas bawah menjadi masyarakat kelas atas yang berkecukupan. Setelah lapau-lapau itu dibedah, Refrizal mengatakan, akan



Anggota DPR RI Refrizal bertemu warga di daerah pemilihannya

foto : dok pri/iw

memberi bantuan teknik manajemen, bagaimana mengelola mini market dengan profesional.

Di Sumatera Barat, para pedagang lapau biasanya berjualan nasi, kue-kue, kopi, dan lain-lain. Di Payakumbuh, Refrizal bahkan membantu memperjuangkan pendirian pasar untuk menyatukan sekaligus memberdayakan para pedagang kecil ini. Lewat bantuan dana Tugas Perbantuan dari Kementerian Perdagangan yang telah lama diperjuangkannya, berdirilah Pasar Kaduduk. Dan Refrizal meletakkan batu pertama pembangunan pasar tersebut. ■ (mh)

## Konflik Pembebasan Lahan Register 1 Waypisang Menjadi Perhatian Frans Agung

**K**onflik pembebasan lahan Register 1 Waypisang, yang ditempati warga 10 Desa di tiga Kecamatan Lampung Selatan, menjadi perhatian serius Anggota Komisi IX Frans Agung Mula Putra, saat kunjungan ke daerah pemilihannya Lampung Selatan.

Memang tugas DPR RI untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, terkait kasus ini, Frans sudah menemui Sekertaris Daerah Lampung Selatan, Sutono dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Daerah.

"Mereka mengatakan dalam melakukan pelepasan sebenarnya sudah memenuhi unsur. Tapi, petunjuk teknisnya belum dikeluarkan oleh 4 Menteri (Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Kepala Bappenas), sementara pembebasan ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama 4 menteri," katanya.

Lebih lanjut, Frans mengatakan akan mendesak dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar juknisnya segera dikeluarkan, dan konflik pembebasan tanah di register 1 Waypisang selesai.

"Ini harus kita kejar supaya 4 Menteri itu segera mengeluarkan juknisnya, tidak ada alasan lain bagi pemerintah pusat untuk melepaskan pelepasan hak tanah register. Karena ini adalah hak masyarakat. Apalagi status



Anggota Komisi IX DPR RI Frans Agung MP kunjungi daerah pemilihannya

desa di sini sudah menjadi desa *definitive*," katanya.

"Saya juga melakukan kordinasi dengan Komisi II, dan Komisi IV supaya dapat ikut mendorong pelepasan tanah register. kita dorong ke pemerintah pusat supaya pelepasan hak tanah register cepat rampung. Apalagi ini sudah 20 tahun ditempati. Saya optimistis ini akan berhasil selama ada dukungan dari semua pihak," lanjutnya. ■ (rnm)

foto : dok pri/iw

## Bantuan Rumah Swadaya Paling Diapresiasi Rakyat

Pembangunan Rumah Swadaya merupakan salah satu program pemerintah yang sangat dinanti rakyat kecil. Melalui program ini, rakyat kecil mendapatkan bantuan untuk memperbaiki rumahnya yang rusak, sehingga menjadi layak huni.

Hal tersebut dikemukakan oleh Anggota Komisi V DPR RI Soehartono, menurutnya bantuan rumah swadaya merupakan salah satu bantuan yang paling diapresiasi masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang kurang mampu.

“Rumah swadaya adalah bantuan pemerintah yang sangat ditunggu oleh rakyat, karena itu yang bantuan langsung. Ini yang diharapkan oleh *wong cilik* daripada bantuan yang lain,” ungkap politisi dari Fraksi Nasdem itu.

Selain mengawal pembangunan 200 unit rumah swadaya di Kabupaten Madiun. Saat ini, Soehartono juga sedang menjalankan program pemberian bibit varietas buah sebanyak 59.000 bibit, yang terdiri dari bibit alpokat 12.000, bibit nangka mini 40.000 dan bibit durian 7.000 kepada warga setempat.

Disebutkan politikus dari dapil Jawa Timur VIII itu, bibit unggul didapatkan langsung dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan akan bekerjasama hingga 3 tahun kedepan. Nantinya, ia mengharapkan dengan adanya pembagian bibit pohon jenis buah itu dapat bermanfaat untuk meningkatkan



Anggota Komisi V DPR RI Soehartono berikan bibit nangka mini

foto : dok pri/iw

pendapatan warga setempat melalui kegiatan UMKM.

“Ada konsep industrialisasi yang ingin saya selipkan kepada masyarakat. November ini akan dikirim, masing-masing desa dapat alokasi 300 biji. Jadi 3 tahun kemudian sudah 120 ribu, bisa jadi daerah unggulan nangka. Harapan saya di Madiun ada brem baru, yakni brem nangka,” tandasnya. ■

(ann)

## Perlu ada Sosialisasi PIP

Program Indonesia Pintar (PIP) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi salah satu fokus Anggota Komisi X DPR RI Yayuk Basuki saat kunjungan ke daerah pemilihannya, Jawa Tengah I, yang meliputi Kota Semarang, Salatiga, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal, baru-baru ini.

Saat bertandang ke Sekolah Dasar Ignasius Slamet Riyadi, Kota Semarang, ia mendapat laporan bahwa masih



Anggota Komisi X DPR RI Yayuk Basuki meninjau SD Ignasius Slamet Riyadi, Kota Semarang

foto : dok pri/iw

banyak orang tua siswa yang belum mengerti peruntukkan dari dana PIP tersebut. Hingga akhirnya tidak sedikit orang tua siswa yang menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan rumah tangga lainnya.

“Tentu hal ini sangat disayangkan, apalagi ada beberapa siswa juga yang belum melunasi biaya bulanan mereka,” kata politisi Fraksi Partai Amanat Nasional itu, saat berkoordinasi dengan Dewan Guru SD Ignasius Slamet Riyadi.

Menyikapi hal ini, Yayuk menghimbau sekolah tidak melepas begitu saja siswa yang menerima PIP. Kedepannya, perlu dikumpulkan para orang tua untuk diberikan sosialisasi atau penjelasan dari mulai mekanisme pencairan di bank sampai dengan penggunaan dana PIP. “Sehingga kita semua memiliki tanggung jawab untuk mengontrol penggunaan beasiswa PIP tersebut,” kata mantan atlet tenis profesional era 1990-an ini, hingga mendapat julukan *The Jaguar of Asia*.

Masih dalam kesempatan yang sama, Yayuk juga meninjau langsung proses pengerjaan rehabilitasi ruang kelas di SMP Tri Mulya, Kota Semarang, dan pengrajin tas di Desa Truko, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal yang tergabung dalam Paguyuban Sentra Industri Tas kendal (SINTAK).

“Kreatifitas yang dimiliki masyarakat Desa Truko ini perlu diapresiasi, karena mereka mampu memproduksi tas dengan kualitas bagus dan memiliki daya saing tinggi. Saya menghimbau kepada masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri,” pesan Yayuk. ■

(sf)

## Pemekaran Daerah Menunggu Kondisi Ekonomi Stabil

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy menjadi salah satu pembicara dalam Musyawarah Besar (Mubes) Pembentukan Kabupaten Pelalawan Selatan pada Senin (08/08/2016) di Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan, Pelalawan, Provinsi Riau.

Ia menegaskan bahwa kini sudah tidak ada lagi istilah moratorium, namun yang ada yakni penundaan karena dalam pemekaran perlu dikaitkan kemampuan keuangan negara, mengingat kini keuangan negara sedang terjadi defisit. "Sudah tidak ada istilah moratorium, sudah dicabut oleh pemerintah karena tidak sesuai dengan UU dan UUD, pemerintah merevisinya dengan istilah penundaan melihat kemampuan keuangan tahun ini yang berat sekali, akibat dari penerimaan sektor pajak yang tidak memenuhi target," tegas Lukman.

Sektor ekonomi nasional memang sedang kurang bagus, di Provinsi Riau saja terdapat dua kabupaten yang pembayaran Dana Alokasi Umum (DAU) tertunda yakni Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu. Hal itu pula yang menjadi sorotan Lukman Edy. "Bukan saja program seperti pemekaran yang ditunda, di Riau saja ada 2 Kabupaten yang ditunda pembayaran DAUnya yakni Indragiri Hilir dan Rokan Hilir dan setiap kementerian dan lembaga rata-rata dikurangi anggarannya 25% - 40%" tuturnya.



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy berkunjung ke Pelalawan, Riau

"Memang sangat tergantung dari kemampuan keuangan, makanya pemerintah berupaya mencapai uang sebanyak-banyaknya, salah satu yang signifikan adalah lahirnya UU Tax Amnesty yang per hari ini sudah terkumpul 90 triliun dan target pemerintah akhir tahun ini bisa memperoleh 500 sd 1000 triliun dan target akhir tahun depan terkumpul 4000 triliun dan ini akan menyebabkan ekonomi Indonesia akan meroket," sambungnya.

Ia pun menegaskan jika kondisi ekonomi Indonesia sudah membaik maka pemekaran daerah kemungkinan sudah bisa dilaksanakan. "Termasuk agenda pemekaran, akan kita mulai lagi setelah kondisi keuangan negara membaik. Saya optimis tahun depan sudah membaik, dan rencana pemekaran sudah bisa kita laksanakan," tuturnya.

Mubes ini dihadiri 8 unsur perwakilan Desa/ Kelurahan terdiri dari 64 Desa 6 Kelurahan serta 6 Kecamatan yakni Bandar Petalangan, Bunut, Pangkalan Kuras, Pangkalan Lesung, Ukui dan kerumutan. Mubes ini dibuka oleh Bupati Pelalawan HM Harris. ■ (hs, mp)

## Dua Perusahaan Belum Hasilkan Apa-apa, Korban Sudah Berjatuh

Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menyoroti tentang keberadaan tambang emas di Madina (Mandailing Natal) dan eksplorasi panas bumi di kawasan Gunung Sorik Marapi yang kemudian mengambil korban masyarakat setempat.

Hal itu disampaikannya baru-baru ini setelah dirinya berkunjung ke Mandailing Natal dalam masa reses dan langsung meninjau keberadaan dua perusahaan di daerah itu.

Politisi Gerindra ini mengaku heran atas keberadaan tambang emas PT SMM dan perusahaan eksplorasi gas PT SMGP yang sudah diakuisisi perusahaan lain. "Ini yang saya tidak habis pikir. Dua perusahaan itu hadir di bumi Mandailing Natal. Belum menghasilkan apa-apa tapi korban sudah berjatuh," ujarnya

Seperti diketahui, kata Gus, keberadaan dua perusahaan itu diprotes masyarakat setempat. Intinya mereka tidak bisa mengakomodasi dan mendengar keluhan rakyat. "Akibatnya apa? Yang terjadi adalah bentrokan antar masyarakat dan antara masyarakat dengan aparat keamanan. Jadi sebenarnya mereka belum menghasilkan apa-apa tapi masyarakat sudah jadi korban,"



Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu

sambungnya.

Bahkan, menurutnya kehadiran tambang emas dan perusahaan eksplorasi gas di Sorik Marapi sudah merusak kearifan lokal. "Kita tahu kearifan lokal dan kekerabatan di Mandailing Natal itu sangat kuat karena saling mendukung. Namun kehadiran perusahaan tambang memecah belah kearifan lokal itu," tuturnya.

Gus menyatakan semua yang dijelaskannya merupakan temuan reses. Bahkan SMM sudah berdiri lama tapi tidak jelas apa yang dilakukan di sana. "Begitu juga dengan SMGP. Kalau kondisinya begitu saya menyarankan cabut

saja izinnnya. Jangan tambah korban berjatuh. Hasil tak ada tapi korban berjatuh," jelas Gus.

Desakannya agar izin perusahaan itu dicabut karena hingga saat ini tidak jelas progress apa yang sudah dilakukan SMM dan SMGP. "Masa mereka tidak menjelaskan ke publik apa saja yang sudah mereka lakukan. Bagi saya ini sangat aneh. Saya mempertanyakan kesiapan investor. Jangan-jangan mereka ini makelar saja itu. Faktanya hari ini belum ada apa-apa action di lapangan," untkannya. ■ (hm)



foto : Jaka/iw

Ketua DPR RI Ade Komarudin didampingi sejumlah Anggota DPR RI dan Sekjen DPR RI menghadiri acara press gathering Wartawan Koordinatoriat DPR RI di Bali.

## Dari Akuntabilitas Parlemen, E-Budgeting Hingga Soal Daging Sapi

**Kuta 7 Oktober 2016.**  
**Hari Jumat malam, seperti hari itu telah terlampaui, meski demikian lalu lalang kendaraan dan turis dari berbagai negara dan domestik tetap mengisi kegiatannya yang membuat Pulau Dewata ini tak pernah sepi.**

Tak terkecuali satu ruang pertemuan Hotel yang terletak di jantung kota di Bali itu terasa hangat Para jurnalis peserta *Press Gathering* Wartawan Koordinatoriat DPR RI telah berkumpul. Jumlahnya cukup banyak, terhitung 110 juru warta baik dari media cetak, *online* maupun elektronik sedang berbaur dan bercengkrama satu sama lain, sesekali menengok ke arah pintu depan seperti menunggu kedatangan seseorang.

Detik berlalu berganti menit, lalu tampilkan sosok yang cukup familiar di kalangan jurnalis DPR RI, dia adalah Ade Komarudin. Sambil berjalan menuju

podium, ia tersenyum simpul dan berjabat tangan dengan para wartawan yang menghampirinya.

Tak hanya Akom, sapaan akrab Ketua DPR RI, di panggung terlihat beberapa pimpinan DPR RI lainnya, yaitu Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fadel Muhammad, pejabat di lingkungan Sekretariat DPR RI, dan Asisten Gubernur II Provinsi Bali I Ketut Wija.

Saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara *Press Gathering* ini, pria yang kerap kali mengenakan peci hitam itu, melaporkan



foto: Jaka/iw

Ketua DPR RI Ade Komarudin bersama sejumlah pimpinan memberikan cenderamata kepada Asisten Gubernur II Provinsi Bali.

hasil kunjungannya dalam pertemuan konsultatif antar lima negara MIKTA, yakni Meksiko, Indonesia, Korea, Turki dan Australia.

Namun, sebelum melanjutkan laporannya, Akom menceritakan perjalanannya yang cukup panjang hingga tiba di Pulau Dewata malam itu. “Dari hotel kami berangkat jam 3 dini hari ke bandara Tasmania terbang ke Melbourne, dari Melbourne jam 10 terbang ke sini. Esok hari saya juga enggak bisa lama, saya ke Surabaya, Madura dan Banyuwangi, Senin balik ke Jakarta” ia mengisahkan.

Menurut Akom, kegiatan yang diselenggarakan selama beberapa hari oleh kelima negara anggota G-20 itu cukup menginspirasi. “Pertemuannya cukup produktif, ini saya sampaikan sebagai pertanggungjawaban, karena jangan dianggap menghamburkan uang negara. Dari pada dibilang begitu, lebih baik saya laporkan kepada teman-teman,” gurau Akom.

Lebih lanjut, politikus Fraksi Golkar itu menyoroti soal keterbukaan dan akuntabilitas parlemen disana. Diakuinya, sistem Parlemen Tasmania cukup terbuka tanpa mengesampingkan faktor keamanan. Semua pengamanan berjalan dengan tertib, bekerja sama dengan kepolisian dan tentara.

“Semua ruang pertemuan seperti balkon paripurna dan komisi tertutup kaca, tapi proses semua orang tahu, banyak tv disediakan

sehingga seluruh proses bisa dipantau. Itu artinya keterbukaan. Di kita, terbuka masih diterjemahkan telanjang-setelanjanya,” ungkapnya.

Ia juga menilai, pengamanan di Gedung Parlemen perlu dievaluasi, sistem pengamanan belum dikelola dengan baik. Di DPR RI saat ini pengamanan sudah dijalankan oleh pengamanan dalam (pamdal) dan sejumlah petugas kepolisian yang menjaga sisi terluar gedung parlemen.

“Sudah ada pamdal yang jaga, tapi masih *blong-blong*, ini juga harus dievaluasi. Kita sudah ada rencana memperketat keamanan tapi belum konsisten dilaksanakan,” kritisinya.

### Terapkan E-Budgeting

Sementara terkait akuntabilitas dan cita-cita DPR RI menuju parlemen modern, Akom mengupayakan agar DPR RI menerapkan sistem keuangan e-budgeting. E-budgeting adalah sistem keuangan yang disimpan secara online dengan tujuan transparansi terhadap publik.

Biasanya, sistem e-budgeting diterapkan sebagai dokumen penyusunan anggaran di sebuah lembaga. Setiap orang bisa mengakses data-data anggaran yang disusun oleh lembaga negara, sehingga diharapkan bisa mencegah upaya penggelapan dana atau kecurangan dari birokrasi.

Ia menuturkan saat ini sudah banyak parlemen ataupun sektor lain yang

sudah memulai e-budgeting. “Kenapa tidak di DPR RI kita lakukan, kita harus lakukan e-budgeting, e- government,” tutur politisi dari dapil Jawa Barat VII itu.

Menindaklanjuti hal tersebut, dia mengatakan sudah berdiskusi dengan Kementerian PAN RB, agar melakukan semacam MoU untuk merencanakan kerjasama dengan Kesekjenan DPR RI.

“Kita tata Dewan Perwakilan Rakyat, bukan hanya memaksimalkan kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat secara keseluruhan, tetapi juga kesekjenan sebagai *supporting system*, kita harus tata dengan baik, kian hari harus lebih baik,” sergahnya kepada seluruh wartawan yang menyimak.

Selain itu, dalam pertemuan MIKTA ia juga mediskusikan alasan harga daging sapi impor yang selalu melonjak setiap tahunnya, apalagi menjelang hari raya keagamaan. Menurutnya, harga daging sapi yang selalu naik tidak menguntungkan pemerintah Australia, namun merugikan masyarakat Indonesia.

“Kita ingin mendorong agar tahun ke depannya tidak ada lagi masalah soal kenaikan harga daging pada saat lebaran. Ini *concern* saya, agar tahun depan tidak gila-gilaan menjelang lebaran,” sebut politisi dari F-Golkar itu.

“Setelah diteliti, disimpulkan harga yang diambil oleh ‘broker’ \$400 USD/ekor, kalo dirupiahkan 6 juta, kalau dihitung per kilogram sekitar \$1,5 USD, disana doang, belum lagi sampai sini pengusaha importir juga pasti ambil untung juga, bagaimana tidak Rp120.000/kg,” sergahnya.

Ia pun mendorong pemerintah segera membuatkan peraturan pemerintah tentang pembentukan Badan Ketahanan Pangan yang sudah diamanatkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

“Itu produk DPR RI, kenapa belum dijalankan. Saya sedang mendorong, dan Pak Asman (Menpan RB) sedang menggodok itu, sehingga kita bisa capai swasembada pangan,” imbuh Akom.

Setelah *berbagi oleh-oleh* tersebut, Akom secara resmi membuka kegiatan rutin Kesetjenan DPR RI itu. Kali ini temanya “Melindungi Bali, Sebagai

Destinasi Wisata Berkearifan Lokal”.

Tak hanya Akom, Wakil Ketua DPR RI Korinbang Agus Hermanto pun memberikan sambutannya. Pria yang mengenakan batik bermotifkan *dandelion* itu mengatakan *Press Gathering* Wartawan Kordinatoriat DPR RI merupakan acara yang menarik untuk meningkatkan silaturahmi antara DPR RI dengan wartawan.

“Acara *Press Gathering* ini sangat menarik, karena semakin ada keakraban diantara pers dan DPR RI. Paling tidak Pimpinan DPR RI dan AKD makin akrab lagi dengan wartawan,” sambut Agus.

Dalam sambutannya, politisi dari F Demokrat itu menyampaikan harapannya agar berita tentang DPR RI semakin positif.

“Sekali-kali negatif tidak apa-apa, asal saja DPR RI jangan dibully. Saya yakin teman-teman (wartawan) tidak ada yang *bully* saya,” kata Agus, disambut tawa seluruh wartawan yang hadir.

### Jaga Harta Karun Indonesia

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menyambut baik *Press Gathering* secara berkala itu. *Gathering* kali ini merupakan yang ke-19 kalinya, sejak tahun 2009. Politisi dari F-Gerindra itu mengaku mendapat banyak masukan dari wartawan, dan juga dari pemerintah daerah terkait hal-

hal bidang komisi yang dipimpinnya.

“Banyak sekali *input* yang kita dapat di daerah. Misalnya tema kali ini terkait pariwisata kearifan lokal. Kita ketahui, salah satu kunci keberhasilan pariwisata Bali adalah menjaga kearifan lokal,” kata Sutan.

Menurut Sutan, Bali mempunyai daya tarik budaya dan adat istiadat yang menarik bagi wisatawan, bukan hanya wisatawan domestik, tapi juga mancanegara. “Tradisi Bali sangat luar biasa. Kondisi ini wajib dipertahankan oleh Bali, agar tetap menjadi tujuan destinasi favorit dunia,” sambung Sutan.

Di dunia, lanjut politisi Dapil Jambi itu, Bali menduduki urutan ke dua teratas tujuan wisatawan mancanegara setelah Hawaii dan nomor satu di Asia. Ia juga mendorong pemerintah agar segera mencetak Bali-Bali lainnya. “Kita harus mempromosikan Indonesia ini, bukan hanya Bali tetapi daerah lainnya,” imbaunya.

Dalam kesempatan yang sama, I Ketut Wija mengatakan pulau seribu pura itu hanyalah sebagian kecil dari wilayah Indonesia. “Hanya 0,2 persen dari luas Indonesia dengan jumlah penduduk 4,2 juta. Jumlah wisatawan hampir 11 juta wisatawan domestik maupun mancanegara yang ke Bali setiap tahunnya,” ujarnya.

Menurut Ketut Wija, jika berbicara

mengenai Bali, maka kita berbicara dua sisi yaitu, manusia dan alam. Kedua hal tersebut harus dipelihara untuk tetap menjaga potensi pariwisatanya. Terbukti dengan, kunjungan para wisatawan asing terus meningkat sejak 1902 dimana tercatat seorang anggota parlemen Belanda menjadi pelancong pertama yang menginjakkan kakinya di pulau Dewata itu.

“Alam Bali jika dibandingkan wilayah lain tidak terlalu hebat-hebat amat, Sumatera, NTT juga luar biasa alamnya. Tetapi alam Bali memiliki nilai unik, yaitu Budaya,” tegas Asisten Gubernur II Provinsi Bali itu.

Budaya menjadi salah satu ke-eksotisan Bali, maka, alam Bali dengan unsur kebudayaannya harus dipelihara. “Oleh karena itu, kami di Bali itu semua punya upacara, untuk gunung, laut, danau, pohon, hewan, ada upacaranya. Artinya, kita memuliakan danau, gunung, laut, pohon-pohonan, bukan menyembah tetapi memuliakan mereka, karena mereka semua itulah memberikan kehidupan kepada masyarakat Bali,” jelasnya.

Untuk mengenal Pariwisata Bali lebih baik, peserta diajak untuk mengunjungi *monkey forest* atau hutan lindung yang dihuni sekitar 400-an populasi *monkey*. Dari Alas Kedaton, wartawan melanjutkan perjalanan ke Tanah Lot. ■ (ann)



foto : Jaka/iw

Pimpinan DPR RI Ade Komarudin dan wartawan kordinatoriat DPR RI foto bersama.

# Ustad Selebriti yang Konsisten Berdakwah

**Abdullah Gymnastiar atau yang dikenal dengan nama Aa Gym ini sejatinya adalah seorang ustadz dan pendakwah. Tidak jarang kegiatan berdakwahnya itu diliput oleh berbagai media massa, baik media cetak maupun elektronik. Tak ayal jika kemudian media kerap menyejajarkan pria kelahiran Bandung 29 Januari 1962 dengan para selebriti. Ditemui Rahayu Setiowati dan Jaka Nugraha saat pengajian PIA (Persaudaraan Isteri Anggota) DPR RI, Aa Gym mengungkapkan tentang berbagai hal.**

“DPR RI saat ini sudah lebih bagus. Tapi harus lebih baik lagi. Karena anggota dewan itu kan wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Jadi harus menjalankan amanah rakyat dengan baik. Kalau jika kemudian ada beberapa anggota dewan yang terlibat kasus hukum. Saya melihat itu hanyalah oknum saja. Saya masih berbaik sangka dan percaya bahwa masih banyak anggota DPR RI yang memiliki niat tulus untuk membangun negeri ini,” papar Aa Gym saat ditanya penilaiannya tentang DPR RI.

Hal itu ditandai dengan berbagai hal, salah satunya adalah dengan

berhasil dibentuknya beberapa peraturan dan Undang-undang. Terkait dengan aturan Pilkada, Aa juga menilai undang-undang yang ada saat ini sudah cukup bagus. Terlebih lagi adanya pemilihan kepala daerah secara langsung, dimana rakyat bebas memilih pemimpin di daerahnya masing-masing.

“Pro-kontra dalam memilih pemimpin itu hal yang wajar. Begitupun ketika umat muslim memiliki keyakinan bahwa seorang pemimpin harus muslim. Itu adalah hak warga negara yang harus dihormati. Bukan permasalahan SARA. Jadi hormatilah hal itu,” ungkap pemilik Pondok Pesantren Darut Tauhid ini.

Di kesempatan berbeda, Aa Gym yang sejatinya merupakan pendakwah dengan pembawaan tenang, lembut, dan cukup toleran dengan umat lainnya ini pun sempat memberikan komentar terkait dengan video pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau Ahok di Kepulauan Seribu yang membahas surat Al Maidah ayat 51.

Ia menilai pernyataan Ahok itu telah menyakiti hati umat Islam. Namun ia meminta umat Islam untuk tidak bersikap berlebihan, tetap tenang dan tidak melampaui batas. Meski demikian mantan Komandan Resimen Mahasiswa Akademi Teknik Jenderal Achmad Yani ini mengaku akan ikut aksi damai menuntut penegakan hukum atas kasus

Ahok tersebut.

“Minta maaf bagus, tapi kan hukum tetap harus dijalankan. Kita jangan hanya melihat demonya saja. Tapi juga harus diperhatikan penyebab aksi demo itu. Penegakan hukum harus tetap dijalankan agar para pemimpin ke depannya lebih berhati-hati lagi dalam berbicara dan bertindak. Jangan lagi sampai menimbulkan keresahan umat,” ujar Aa Gym.

## Karir

Terlahir sebagai salah satu anak dari empat bersaudara pasangan Engkus Kuswara yang seorang perwira angkatan darat dan Yeti Rohayati. Sebagai seorang anak tentara, sudah dapat dipastikan masa kecil



KH Abdullah Gymnastiar

foto : Jaka/Iw



foto : Jaka/iw

KH Abdullah Gymnastiar saat berceramah di pengajian Ibu-ibu PIA DPR RI.

Aa Gym sarat akan kedisiplinan. Di berbagai kesempatan Aa Gym kerap menyebutkan kedisiplinan yang dimaksud disini adalah jauh dari kekerasan dan kekasaran.

Pendidikan agama yang diterima Aa dari kedua orangtuanya tidak berbeda dengan keluarga lainnya. Ketika itu ia malah lebih merasa sikap demokratis selain disiplin yang terus diajarkan kedua orangtuanya. Ia bersama ketiga saudara kandungnya dididik untuk berani menyatakan pendapatnya dengan santun.

Meski bisa dikatakan perekonomian kedua orang tuanya mampu memenuhi kebutuhannya, namun Aa muda yang terbiasa dengan kemandirian tertantang untuk mencari sendiri dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia pernah menjajal kemampuan menjadi penjual koran dan supir angkot hanya untuk membiayai sekolahnya di teknik elektro.

Ia pun aktif di berbagai organisasi, salah satunya organisasi resimen mahasiswa atau Menwa. Berkat kedisiplinan dan keberanian ditambah dengan sisi religi yang mulai menonjol dalam dirinya, Aa Gym dipercaya menjadi Komandan Menwa di kampusnya, Akademi Teknik Jenderal Achmad Yani.

Ia mulai memperdalam berbagai



Minta maaf bagus, tapi kan hukum tetap harus dijalankan. Kita jangan hanya melihat rencana demonya saja. Tapi juga harus diperhatikan penyebab aksi demo itu. Penegakan hukum harus tetap dijalankan agar para pemimpin ke depannya lebih berhati-hati lagi dalam berbicara dan bertindak. Jangan lagi sampai menimbulkan keresahan umat.



ilmu agama sekaligus mendalami pemahaman spiritual. Saat bersamaan, jiwa usahawannya muncul. Bersama dengan teman-temannya ia mendirikan keluarga mahasiswa Islam wiraswasta (KMIW). Melalui KMIW inilah Aa Gym mulai merintis usaha sablon, pembuatan stiker, kaos, gantungan kunci, dan peralatan kantor dengan berbagai slogan i religi. Ia pun membuat minyak wangi yang diraciknya sendiri. Pundi-pundi rupiah pun ia kumpulkan, hingga kemudian ia mampu membeli satu unit angkutan umum. Tak jarang selepas kuliah ia menyupir sendiri angkot tersebut.

Singkat cerita, bersama KMIW Aa Gym mendirikan pondok pesantren da'arut tauhid (DT) di rumah kedua orangtuanya, sebelum pindah ke jalan Geger Kalong. Kini, Daarut Tauhid tidak hanya berkiprah dalam bidang pondok pesantren saja melainkan juga taman kanak-kanak, taman pendidikan Al Quran, penerbitan, percetakan, swalayan, mini market, bahkan stasiun radio dan gedung pertemuan. Meski bisa dikatakan sudah menjadi pengusaha, namun Aa Gym enggan meninggalkan dunia dakwah. Ia akan terus konsisten berbagi ilmu dan pengalaman kepada umat. ■

(ayu)

# Mengenal Sistem Parlemen Kanada

Dalam beberapa tahun terakhir ini, Kanada menjadi sorotan dunia karena Perdana Menteri yang baru, Justin Trudeau, mengambil langkah-langkah yang dianggap oleh publik dunia sebagai langkah yang revolusioner, diantaranya adalah: menyusun komposisi kabinet yang terdiri dari 15 Laki-laki dan 15 Perempuan dengan latar belakang yang sangat beragam pula, mulai dari kelompok minoritas hingga penyandang disabilitas. Justin Trudeau meraih kemenangan setelah Partai Liberalnya meraih suara mayoritas di parlemen dengan memenangkan 184 dari 338 kursi di Parlemen.

Selain itu, beberapa kebijakan Kanada yang mendapatkan banyak perhatian dunia adalah pemberian bantuan yang sangat besar bagi para pengungsi Suriah dan konflik di Timur Tengah, penarikan pasukan Kanada dari Suriah, sampai yang paling terakhir, disahkannya Undang-undang Euthanasia oleh Parlemen Kanada, yakni undang-undang yang mengizinkan kematian yang dibantu secara medis atau proses euthanasia bagi orang-orang yang sakit parah. Seluruh kebijakan tersebut diatas, sedikit banyak melibatkan Parlemen Kanada. Terlebih bentuk negara Kanada adalah Monarki Konstitusional dengan sistem Parlementer dimana Perdana Menteri akan sangat tergantung dengan keputusan dengan Parlemen. Sistem pemerintahan dan sistem Parlemen menarik untuk dikaji sehingga kita dapat mengetahui bagaimana sebuah kebijakan di Kanada dihasilkan. Tulisan ini mencoba

untuk menjelaskan secara singkat Sistem Pemerintahan dan Parlemen di Kanada.

## Sistem Pemerintahan

Kanada secara historis dikenal sebagai *Dominion of Canada* yaitu negara paling utara benua Amerika. Ibukota Kanada adalah Ottawa yang merupakan bekas jajahan Perancis dan Britania Raya. Bentuk negara Kanada adalah federasi, dimana beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuk negara kesatuan. Negara Kanada mengadopsi sistem pemerintahan Monarki Konstitusional seperti Kerajaan Inggris. Dengan kata lain, sistem Pemerintahan Kanada adalah kerajaan yang dipimpin oleh raja atau ratu. Jabatan tersebut diduduki secara turun-temurun dan dijabat seumur hidup. Kekuasaan raja atau ratu di Kanada dibatasi oleh konstitusi karena sistemnya Monarki Konstitusional. Negara Kanada menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Parlemen memiliki kewenangan untuk mengangkat perdana menteri dan juga dapat menjatuhkan pemerintahan dengan mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Pada 2015 lalu, pemimpin baru Kanada, Justin Trudeau dilantik sebagai perdana menteri. Justin Trudeau menjadi pembicaraan dunia karena kebijakan-kebijakannya yang dianggap banyak berpihak terhadap keadilan dunia seperti: penarikan pasukan Kanada dari Suriah, Pemilihan anggota kabinet dengan komposisi 50:50 antara perempuan dan laki-laki, dll.

Negara Kanada memiliki tiga level pemerintahan, yaitu; pertama, pemerintahan tingkat federal yang berkaitan dengan hukum yang tercantum dalam Undang-undang

Konstitusi 1867 dan secara umum mencakup seluruh aspek negara; kedua, pemerintahan tingkat provinsi di masing-masing 10 provinsi bertanggung jawab untuk daerah yang tercantum dalam UU Konstitusi 1867 seperti pendidikan, kesehatan, beberapa sumber daya alam, dan peraturan jalan; dan ketiga, pemerintahan tingkat kota yang bertanggung jawab pada bidang-bidang seperti perpustakaan, taman, sistem air, polisi setempat, jalan raya, dan parkir.

Pemerintahan Negara Kanada terdiri dari tiga institusi politik (*Trias Politica*) yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif yang juga disebut pemerintah terdiri dari *Monarch* yang diwakili oleh Gubernur Jenderal, Perdana Menteri, dan Kabinet. Sementara, lembaga legislatif Kanada terdiri dari dua kamar yaitu Senat dan *House of Commons*.

### Sistem Parlemen Kanada

Kanada menganut sistem Parlemen bikameral yakni terdiri dari dua kamar, Senat dan *House of Commons* (Majelis Rendah). Majelis Tinggi (Senat) terdiri dari 105 orang yang ditunjuk oleh gubernur jenderal dengan saran dari perdana menteri untuk melayani hingga usia 75 tahun. Kursi Senat ditentukan secara regional dengan perwakilan yang sama dari empat daerah utama, yaitu Ontario, Quebec, *the Maritime Region*, dan *Western Provinces*.

Senat mempunyai peranan penting dalam pengambilan kebijakan. Senat mempunyai kewenangan untuk membahas dan juga mengajukan rancangan undang-undang, namun rancangan yang diajukan terbatas, tidak boleh yang berkaitan dengan pajak dan anggaran negara. Meski demikian dalam prakteknya, Senat sangat jarang mengusulkan, mereka

hanya membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Majelis Rendah.

Majelis rendah, sebagai badan legislatif utama, dipilih setiap empat tahun sekali, dengan masa jabatan tidak lebih dari lima tahun. Majelis Rendah terdiri dari 338 anggota dimana setiap pemilih menggunakan suaranya untuk seorang wakil untuk distrik pemilihan atau konstituen. Partai yang memperoleh wakil paling banyak di Majelis Rendah berhak membentuk pemerintahan.

Hampir sama dengan Majelis Rendah di banyak negara, *House of Commons* Kanada bertugas untuk membuat atau membahas undang-undang bersama Senat, membahas anggaran negara serta mengawasi jalannya pemerintahan. Tradisi yang ada di dalam parlemen Kanada, Partai dengan jumlah suara terbanyak kedua dalam Pemilu akan menjadi Oposisi bagi pemerintahan yang sedang berkuasa.

Secara historis, terdapat dua partai politik dominan di Kanada yaitu Partai Liberal Kanada dan Partai Konservatif Kanada. Akan tetapi, Partai Demokrat Baru (NDP) saat ini semakin terkenal dan bahkan mengancam keberadaan dua partai politik dominan tersebut. Selain itu, partai-partai kecil seperti *Quebec Nasionalis Blok Quebecois*, dan Partai Hijau Kanada juga pengaruhnya mulai diperhitungkan dalam perpolitikan di Kanada. ■

**Kekuasaan raja atau ratu di Kanada dibatasi oleh konstitusi karena sistemnya Monarki Konstitusional. Negara Kanada menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Parlemen memiliki kewenangan untuk mengangkat perdana menteri dan juga dapat menjatuhkan pemerintahan dengan mengeluarkan semacam mosi tidak percaya**

**Moh Hasbi Rofiqi, S.IP dan Hilda Piska, S.IP,**  
Peneliti pada Center for Election and Political Party FISIP UI. Sumber: *Our Country, our Parliament: a guide for learners of English as a second language and an introduction to how Parliament works*



foto: ddkpfi/w

**Kopi telah dikenal oleh manusia selama lebih dari 1200 tahun. Identitas kopi terkait kesehatan-penyakit telah dikenal sejak era kedokteran Hipokrates-Galenik, berlanjut ke Pasteurianisme, epidemiologi, hingga kedokteran genetik. Kopi dikenal sebagai sumber diet antioksidan di pelbagai negara, seperti USA, Italia, Spanyol, dan Norwegia. Rata-rata satu orang di komunitas Eropa mengonsumsi kopi 5,1 kg/tahun. Penduduk Amerika meminum lebih dari 400 juta cangkir kopi setiap hari.**

**K**opi merupakan minuman kompleks, dengan lebih dari seribu zat kimiawi yang berbeda, termasuk karbohidrat, lemak, senyawa nitrogen, vitamin, mineral, alkaloid, senyawa (poli)fenol, mikronutrisi (magnesium, kalium, niasin, vitamin E). Senyawa utama kopi adalah kafein, alkohol diterpen, asam klorogenat, kafestol, kahweol.

**Identifikasi**

Berdasarkan klasifikasi botani, kopi termasuk *kingdom* sayuran, *subkingdom* Angiospermae, kelas Dicotyledoneae, subkelas Sympetalae/

# Kontroversi Kopi

*Metachlamydeae*, ordo *Rubiales*, famili *Rubiaceae*, genus *Coffea*, subgenus *Eucoffea*, memiliki banyak spesies: *Coffea arabica*, *C. canephora*, *C. liberica*, *C. eugenioides*, *C. excelsa*, *C. congensis*, *C. salvatrix*, *C. racemosa*, *C. zanguebariae*, *C. pseudozanguebariae*, *C. mongensis*, *C. humilis*, *C. kapakata*, *C. betrandi*, *C. perrieri*, *C. pervilleana*, dsb.

Kopi secara anatomis dibagi menjadi lima bagian: epikarp/eksokarp (kulit), mesokarp (kayu), endokarp (*parchment*), integumen/perisperm (kulit berwarna perak), endosperm (biji kopi).

Untuk identifikasi asal-mula botani, geografis, keaslian olahan kopi, digunakan parameter UM (*unsaponifiable matter*). UM kopi menilai tiga senyawa: alkohol diterpen, sterol, tokoferol. UM kopi Robusta mengandung kadar delta-5-avenasterol lebih tinggi daripada Arabica. Proses roasting memicu pembentukan dehidrokafestol, dehidrokahweol, diterpen E di kopi Arabica, sedangkan di kopi Robusta hanya terdapat dehidrokafestol. Roasting juga menghasilkan pelbagai furan dan senyawa aromatik yang diproduksi asam klorogenat.

Fraksi lipid kopi merupakan indikator kuat untuk optimalisasi teknologi roasting dan untuk mendapatkan olahan kopi terbaik. Reaksi Maillard berperan

penting di dalam kekhasan citarasa kopi.

**Kandungan – Khasiat**

Alkaloid utama di kopi adalah kafein, berefek antiradang, immunosupresan, stimulan kuat, bronkodilator. Kafein menstimulasi sistem saraf pusat, sehingga membuat peminumnya lebih giat beraktivitas. Kafein juga digunakan sebagai pereda nyeri. Dosis ideal sebesar 500-600 mg per hari. Bila terlalu banyak, dapat berefek cemas, gelisah, mudah marah, sakit kepala, gejala *withdrawal*.

Senyawa polifenol pada kopi, berupa tanin, flavanol, flavon, antosianin, proantosianidin, asam fenol, asam hidroksibenzoat, asam hidroksisinamat.

Polifenol bermanfaat bagi kesehatan manusia. Antioksidan efektif mengatasi aterosklerosis, kanker tertentu, penyakit neurodegeneratif, proses penuaan, terkait peran stres oksidatif yang dihasilkan oleh ROS (*reactive oxygen species*). Antimikrobal (antibakteri, antijamur, antivirus) berperan di sistem imun, berpotensi menghambat mikroorganisme, termasuk virus influenza dan HIV. Antikarsinogenik meminimalkan kerusakan DNA, berpotensi menghambat tumorigenesis di paru-paru, lambung, esofagus, usus, kolon, pankreas, hati, prostat, kulit. Efek yang bermanfaat di sistem kardiovaskuler, untuk m e n c e g a h /



memperbaiki gangguan sirkulasi (hipertensi, penyakit arteri koroner). Inhibisi kuat terhadap oksidasi lipoprotein densitas rendah terkait pembentukan plak aterosklerotik yang berkontribusi terhadap perkembangan penyakit jantung koroner. Aktivitas antitrombotik karena inhibisi agregasi platelet. Memperbaiki kesehatan tulang dengan meningkatkan pembentukan tulang. Mencegah asma, katarak, penglihatan kabur karena usia, degenerasi makuler. Mengurangi risiko penyakit neurodegeneratif, seperti penyakit Parkinson dan Alzheimer. Polifenol juga berefek antihiperlipidemia, antiobesitas, antidiabetes, antiradang.

Asam klorogenat memiliki aktivitas neurotrofik, antikanker, antimutagenik, antioksidan, antiradang, antivirus, neuroprotektif.

Beberapa studi menyatakan kebiasaan minum kopi protektif terhadap sel-sel hati (hepatosit). Maksudnya, minum kopi mengurangi risiko terkena sirosis dan kanker hati, juga menurunkan kadar *aspartate aminotransferase* (AST), *gamma-glutamyltransferase* (GGT), dan *alanine aminotransferase* (ALN).

### Anti Kanker?

Belum ada bukti kuat pengaruh kopi terhadap kanker. Hipotesis implikasi dari aksi proinflamasi kafein menjadi mekanisme potensial kopi di dalam melawan kanker (Ohta, Sitkovsky, 2011). Kafein bertindak sebagai antagonis reseptor A2 di konsentrasi selama asupan normal kopi pada manusia. Konsekuensinya, kafein tidak dapat bertindak sebagai inhibitor fosfodiesterase, suatu efek farmakologis dari alkaloid saat beraksi pada konsentrasi tinggi. Kurangnya stimulasi ini mereduksi ketersediaan cAMP intraseluler, yang merupakan agen antiinflamasi di limfosit T. Kafein dapat bertindak sebagai agen pro-inflamasi. Dengan cara ini, alkaloid dapat berperilaku serupa dengan imunoterapi di dalam pengobatan tumor, termasuk tumor ganas (kanker). Respon inflamasi

adalah sasaran pendekatan modern yang menggunakan pelbagai vaksin kanker, yang secara genetik mendesai sel-sel antitumor T, dsb.

### Kontroversial

Hubungan kopi dan metabolisme tulang juga menjadi perdebatan seru di kalangan ilmuwan selama bertahun-tahun. Dasarnya, asupan kopi meningkatkan *output* kalsium urin, paling sering sebagai hasil *acidic load* dari kopi. Karena tulang menyediakan cadangan besar kapasitas buffering dari isi garam kalsium, mobilisasi cadangan ini merupakan imbalanced fisiologis terhadap asidosis (Lemann,



**Status kesehatan dan usia peminum kopi, berapa cangkir kopi yang diminum setiap hari, medikasi serta minuman lain yang diminum selain kopi, faktor ekonomi, faktor genetik (mutasi, polimorfisme, dsb). Semua faktor ini membuat konklusi di setiap studi kopi cenderung menjadi kontroversi.**



1966). Studi yang dilakukan oleh *Mediterranean Osteoporosis Study* (MEDOS) dan peneliti lain tidak dapat mendeteksi hubungan apapun antara asupan kopi, fraktur tulang, dan status kesehatan tulang. Berbagai pro-kontra studi kopi dan kesehatan tulang telah diungkapkan oleh Cano-Marquina dkk (2013). Perdebatan panjang berakhir saat kopi tidak ada di dalam daftar FRAX (*predictive scale for fracture*) yang dikeluarkan oleh WHO.

Beberapa perancu studi epidemiologi/asosiasi konsumsi kopi-kesehatan (Higdon, Frei 2006), misalnya: spesies dan kandungan metabolit/senyawa aktif kopi, perokok aktif/pasif, ibu hamil, riwayat menderita penyakit tertentu dan komorbiditas, status kesehatan dan usia peminum kopi, berapa cangkir kopi yang diminum setiap hari, medikasi serta minuman lain yang diminum selain kopi, faktor ekonomi, faktor genetik (mutasi, polimorfisme, dsb).

Semua faktor ini membuat konklusi di setiap studi kopi cenderung menjadi kontroversi.

Sampai kini memang belum ada konklusi jelas apakah keseimbangan lipidik kopi membawa manfaat atau malah membahayakan manusia. Ada konsensus yang secara konsisten menyebutkan efek membahayakan kopi. Kopi meningkatkan kolesterol total, kolesterol LDL, dan trigliserid. Sementara tim peneliti lainnya menyatakan efek proteksi kopi. Kopi mengurangi rasio kolesterol LDL/HDL, rasio apolipoprotein B/AI, dan menurunkan sensitivitas kolesterol LDL terhadap oksidasi. Keduanya sama-sama memiliki bukti penelitian yang kuat dan valid, sehingga kopi memang kontradiktif. Di satu sisi “menyembuhkan”, di sisi lain membahayakan. Diperlukan kearifan para penikmat kopi, regulasi pemerintah, pengawasan BPOM, sinergi-kolaborasi riset multidisipliner dan lintas sektoral untuk menyikapinya. ■ (dr. Dito Anurogo, dokter digital, penyuka kopi, penulis 18 buku, S-2 IKD Biomedis FK UGM)

## Asal Jangan di Bully

**W**akil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Agus Hermanto ikut hadir dalam acara Press Gathering di Bali baru-baru ini. Pria yang akrab dipanggil Pak Agus ini dalam sambutan yang banyak diwarnai canda tawa ini mengaku acara Press Gathering sangat menarik, karena itu setuju kalau ditambah menjadi 6 kali setahun.

Dengan demikian makin ada keakraban antara pers dan DPR RI. Paling tidak Pimpinan DPR RI dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) makin akrab lagi dengan wartawan. “Walaupun saya sudah akrab dengan wartawan, nanti beritanya lebih bagus, beritanya positif semua. Sekali-sekali negatife nggak apa-apa, asal saja jangan di *bully* saja. Saya yakin teman-teman nggak ada yang *bully* saya” tegasnya.

Silaturchami seperti ini kata politisi Partai Demokrat ini memang perlu dilakukan, dan bulan depan diadakan lagi. Ada usulan di Cirebon, namun kata dia serba susah, naik kereta lama kalau pesawat

tidak bisa. Ia mengusulkan karena lokasinya dekat, bisa dengan naik mobil kalau jauh, pakai pesawat.

“Jadi memang sangat suka dengan acara ini paling tidak komunikasi saya dengan teman-teman wartawan itu sangat perlu. Sekali lagi sangat perlu,” jelas Pimpinan DPR RI Korinbang ini.

Diakuinya, kalau lagi nggak *mood* bisa dibilang benci tapi rindu, pasti rindu. “Ini Pak Agus suka sombong, *petintang petinting*, tapi kalau tidak ketemu kangen juga. Begitu pun saya, kalau ketemu wartawan saya PD kok nggak dipanggil. Namun tetap optimis nanti sebentar lagi dipanggil,” katanya disambut tawa hadirin.

Pria yang dikenal ramah ini tidak pernah menolak wawancara. Dia merasa harus dekat dengan awak pers sebab bisa menyampaikan apa yang ada di hatinya dan apa-apa yang diketahuinya. “Wartawan kan ujung tombak penyampai informasi ke masyarakat. Buktinya kalau naik pesawat, ditegur mari Pak Agus, ini dikenal lantaran masuk TV dan dimuat media,” katanya menambahkan. ■

(mp)



foto : Jaka/iw

Pimpinan DPR RI, Pimpinan Komisi VII dan X beserta Sekjen DPR RI, Kepala BKD, Asisten II Pemrov Bali dan Ketua Koordinatariat Wartawan DPR RI.



foto : Mastur/iw

Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI bersama Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara.

## Beruntungnya Minahasa Utara

**S**alah satu tujuan Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI pada masa Sidang I tahun 2016/2017 lalu adalah ke Propinsi Sulawesi Utara khususnya Kabupaten Minahasa Utara (Minut). Komisi yang membidangi infrastruktur ini menilai, wilayah yang terletak di utara NKRI ini perlu dipercepat pembangunannya.

Sebelumnya Bupati dan jajaran Pemkab Minut bertandang ke DPR RI dan meminta Komisi V memperjuangkan sejumlah proyek infrastruktur, termasuk bendungan Kuwil-Kawangkoan. Saat Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi Lasarus akhir September lalu, sejumlah proyek juga dipaparkan.

Kabupaten ini mencanangkan jadi Kabupaten agribisnis, industry dan pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan. Selain itu jalan strategis dari Matungkas-Jalan Pinili kurang lebih 17 km. Kabupaten yang terletak antara Bitung-Manado ini akan membangun jalur jalur kereta api.

“Kami butuh dukungan DPR RI terkait pembangunan jalan strategis Matungkas- Pinili sepanjang 17 km, pembangunan Zero Poin yang akan menjadi *land*

*mark* Minut *land mark* Sulut, pembangunan Pelabuhan Munte dan pembangunan kota baru Airmadidi,” ungkap Kepala Bappeda. Proyek lain yang dicanangkan adalah Kawasan Pariwisata Marinsu dan Waleo, Rumah Susun Sederhana Milik yang akan dibangun di tiap kecamatan dengan 1 sampai 2 tower.

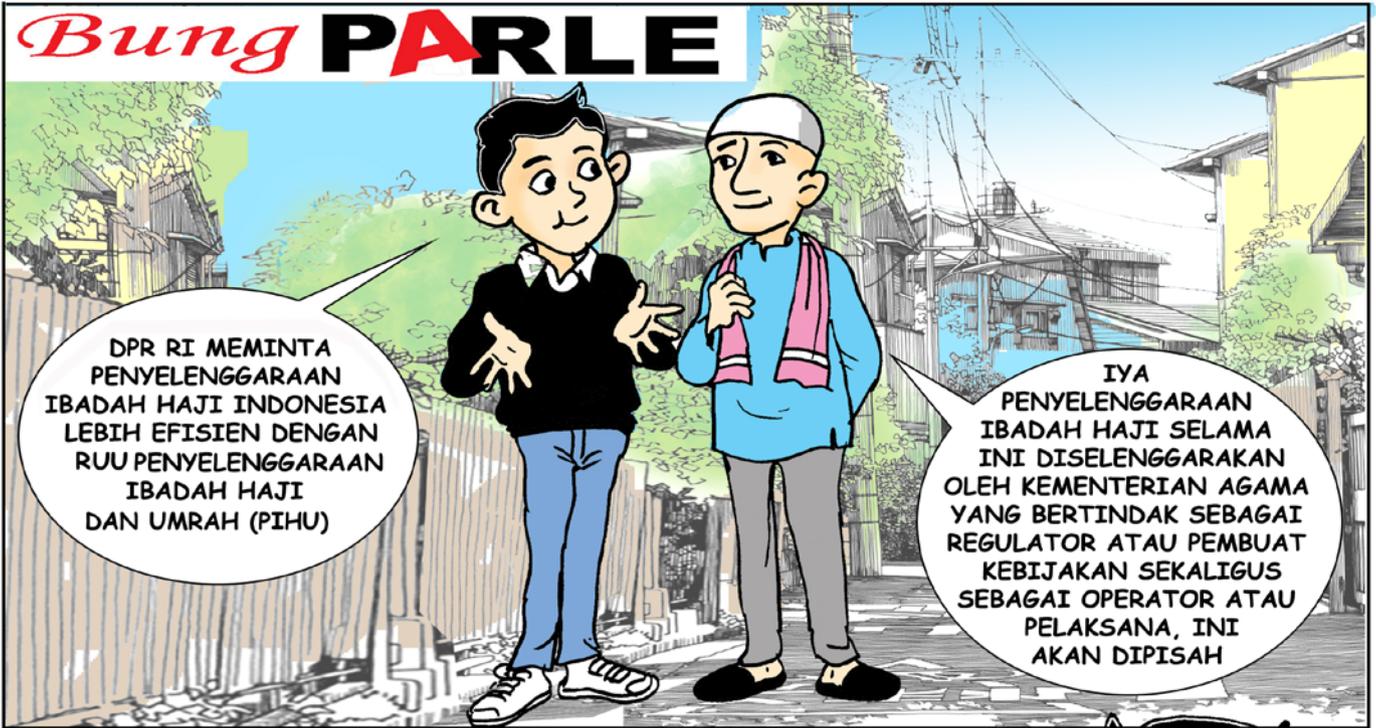
Ketua Tim Kunjungan Spesifik Lasarus menyambut baik usulan tersebut dan bila menyangkut kewenangan pusat dengan APBN maka akan mendukungnya. Sedangkan yang bukan kewenangan pusat masih perlu diproses lebih dulu sesuai ketentuan yang berlaku. Khusus proyek Waduk Kuwil Kawangkoan yang dianggarkan 1,4 T *multi years* akan didukung Komisi V.

“Beruntunglah Kabupaten Minahasa Utara dengan Bupati Vonne Anneke Panambunan yang cantik dan Wakil Bupati Joppy Lengkonng yang ganteng, daya tariknya lebih kuat, sehingga Kabupaten ini mendapat giliran lebih dulu,” ungkap Lasarus.

Banyak daerah yang mau membangun bendungan, tapi kata Lasarus, tidak semua daerah kebagian bendungan. “Bahkan di daerah saya sendiri Kalbar belum ada. Beruntunglah Minahasa Utara,” ucapnya disambut senyum dan tawa hadirin. ■

(mp)

# Bung PARLE



DPR RI MEMINTA  
PENYELENGGARAAN  
IBADAH HAJI INDONESIA  
LEBIH EFISIEN DENGAN  
RUU PENYELENGGARAAN  
IBADAH HAJI  
DAN UMRAH (PIHU)

IYA  
PENYELENGGARAAN  
IBADAH HAJI SELAMA  
INI DISELENGGARAKAN  
OLEH KEMENTERIAN AGAMA  
YANG BERTINDAK SEBAGAI  
REGULATOR ATAU PEMBUAT  
KEBIJAKAN SEKALIGUS  
SEBAGAI OPERATOR ATAU  
PELAKSANA, INI  
AKAN DIPISAH



PERAN  
KEMENAG  
HANYA SEBAGAI  
REGULATOR ATAU  
PEMBUAT KEBIJAKAN.  
SEDANGKAN,  
PENYELENGGARA  
HAJI AKAN DIBENTUK  
LEMBAGA BARU  
LANGSUNG DI  
BAWAH  
PRESIDEN

WAH...BERARTI  
MONOPOLI KEMENAG  
TAMAT DONG YA !!

DAN  
MUDAH-MUDAHAN  
PEMISAHAN INI DAPAT  
MENYEHATKAN BUDAYA  
DAN IKLIM  
PENYELENGGARAAN  
IBADAH HAJI  
DI INDONESIA  
YA...



BETUL...  
SEMOGA NANTINYA  
PENYELENGGARAAN IBADAH  
HAJI AKAN LEBIH MUDAH DAN  
TRANSPARAN, KARENA  
JUMLAH DANANYA BESAR  
LHO...

SIIP  
PAK HAJI...  
!!!